

MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA



Direktorat
Budayaan

598
|

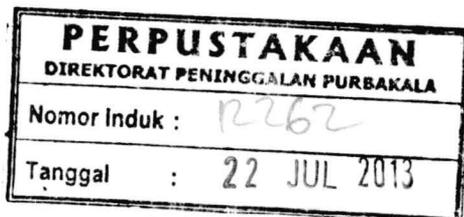
069.52
IND
M

MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA



623.19598

WAH
M



DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
MUSEUM BENTENG VREDEBURG
YOGYAKARTA

Jl. Jenderal A. Yani 6 Yogyakarta 55121



Tim Penyusun : Drs. Gunawan Haji
V. Agus Sulistya, S.Pd
Drs. Suharja

Penyunting : Drs. Wahyu Indrasana

Desain : Drs. Rudi Bambang

KATA PENGANTAR

Perlu diketahui, bahwa tahun 2008 memasuki usia satu abad (100 tahun) Kebangkitan Nasional Indonesia. Suatu momen yang sangat tepat untuk mengadakan refleksi atas kadar nasionalisme bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi generasi mudanya. Lahirnya Nasionalisme Indonesia yang dibidani oleh Organisasi Budi Utomo, menjadi cikal bakal kebanggaan nasional Indonesia. Untuk selanjutnya, kebanggaan nasional mustahil dicapai jika tanpa melalui proses rekonstruksi masa silam. Salah satu media rekonstruksi peristiwa masa silam adalah Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.

Museum merupakan “forum dialog” antara masyarakat (pengunjung) dengan “jamannya” melalui “bahasa benda”. Artinya melalui benda-benda yang disajikan dalam pameran, museum berusaha menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang sebuah peristiwa, dalam hal ini adalah peristiwa sejarah. Guna memahami sebuah peristiwa sejarah diperlukan sebuah pemikiran yang kontekstual, artinya di dalam memahami peristiwa sejarah tidak sepotong-sepotong, tetapi harus dipandang secara utuh.

Buku ini disusun bukan untuk “memindahkan museum” ke dalam tulisan, namun akan lebih bijaksana jika buku ini dianggap sebagai “penunjuk jalan” bagi pengunjung dalam menikmati materi koleksi tata pameran Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Uraian-uraian yang ada dalam buku ini, tentang informasi koleksi serta sejarah Benteng Vredeburg, relatif singkat. Karena buku ini memang bukan porsinya untuk menjelaskan hal-hal tersebut secara lebih rinci. Meski demikian kami tetap berharap agar buku ini memiliki manfaat positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Kami menyadari bahwa buku ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kami mohon maaf. Masukan, saran, kritik, atau komentar apapun, dengan lapang dada kami terima, demi peningkatan

mutu di masa-masa yang akan datang. Untuk menutup pengantar ini, akan kami ajak masyarakat khususnya generasi muda untuk berkunjung ke museum. "Ayo kunjungi museum, sebelum anda menjadi museum bagi diri sendiri". Terima kasih.

Penyusun

SAMBUTAN KEPALA MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirobil'amin, saya menyambut baik atas terbitnya buku "Museum Benteng Vredeburg" pada tahun ini. Semoga buku ini benar-benar tepat sasaran, sesuai dengan maksud dan tujuan diterbitkannya. Saya sependapat jika buku ini tidak lebih merupakan "penunjuk jalan" bagi masyarakat pengunjung museum dalam menikmati sajian materi koleksi dalam tata pameran di Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Uraian-uraian singkat yang tersurat dalam buku ini, lebih tepat jika dianggap sebagai "stimulus" atau rangsangan bagi masyarakat untuk menggali lebih jauh lagi, sehingga fungsionalisasi fasilitas pendukung di museum seperti perpustakaan, ruang studi koleksi, dan buku-buku hasil penelitian museum menjadi optimal.

Guna menyongsong "Satu Abad Kebangkitan Nasional Indonesia" pada tahun 2008, kehadiran buku "Museum Benteng Vredeburg" ini memang sangat diperlukan. Hal ini mengingat masih ada masyarakat pengunjung museum yang belum memiliki gambaran sama sekali tentang "apa dan bagaimana" Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Dengan adanya buku ini bagi mereka yang masih "awam" tentang Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, akan merasa lebih mudah dalam memahami alur cerita yang disajikannya.

Kami mengharapkan agar penerbitan buku semacam ini dapat terus dilakukan secara periodik. Bagi pengunjung pameran buku tersebut akan memberikan perbendaharaan baru referensi mereka, khususnya referensi buku-buku sejarah. Kemudian bagi para penyelenggara pameran, akan meningkatkan kualitas mereka melalui kebiasaan menulis.

Demikianlah, kita semua berharap semoga Museum Benteng

Vredeburg terus mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga ketakutan “ditinggalkan pengunjunnya” tidak hadir dalam sejarah Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta tercinta ini. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, Maret 2007
Kepala,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line on the left that curves upwards and then loops back down to the right, ending in a small flourish.

Drs. Wahyu Indrasana
NIP 130924348

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN KEPALA MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II SEJARAH SINGKAT BENTENG VREDEBURG	5
A. Awal Pembangunan Benteng Vredeburg	5
B. Pemanfaatan Benteng Vredeburg	7
C. Benteng Vredeburg Menjadi Museum	13
BAB III MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA ...	17
A. Nama, Status dan Jenis Museum	17
B. Visi dan Misi Museum	19
C. Ruang Lingkup	19
BAB IV MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA JENDELA SEJARAH PERJUANGAN BANGSA	35
A. Koleksi Bangunan Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta Media Perlawatan Ke Masa Silam	36
B. Ruang Pameran Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta sebagai Album Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia	47
BAB V PENUTUP	103

DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	108

BAB I PENDAHULUAN

Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta merupakan salah satu museum khusus sejarah perjuangan nasional yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia pada umumnya dan rakyat Yogyakarta pada khususnya. Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta menempati tanah seluas 22.480 m² dengan batas sebelah utara : Jl. Pabringan, sebelah timur : Jl. Sriwedani, sebelah selatan : Jl. Panembahan Senopati, dan sebelah barat : Jl. Jenderal A. Yani. Sedangkan luas bangunan yang ada di dalam kompleks Benteng Vredebrug adalah 8.483 m². Museum tersebut menempati bekas bangunan Benteng Vredeburg, yaitu sebuah benteng yang dibangun untuk mendukung keberadaan penguasa Belanda di Yogyakarta pada masa kolonial Belanda.

Dengan posisinya sekarang, berarti Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta terletak pada kawasan 0 km dari pusat kota Yogyakarta. Keberadaan Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949 serta bangunan-bangunan bergaya Indis lainnya seperti Kantor Pos, Bank Indonesia, BNI 1946, Gedung Agung, Seni Sono yang telah menjadi satu kawasan dengan Gedung Agung, Gereja Kristen Indonesia Marga Mulya, serta Societeit menambah kharisma Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta sebagai bangunan peninggalan masa kolonial semakin besar.

Refungsionalisasi (pemanfaatan kembali) bangunan bekas Benteng Vredeburg peninggalan kolonial Belanda menjadi sebuah museum khusus sejarah perjuangan Bangsa Indonesia lebih didasari pada aspek nasionalisme bangsa Indonesia yang tercermin dari peristiwa-peristiwa sejarah di Yogyakarta, dan bukan karena Benteng Vredeburg adalah bangunan peninggalan penjajah Belanda. Munculnya kekuatan baru yaitu Belanda yang telah mengusik ketentraman di wilayah raja-raja penguasa lokal menyebabkan timbulnya perlawanan fisik. Dari waktu ke waktu model perlawanan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan jaman. Dari perlawanan lokal kedaerahan yang mengandalkan otot dan semangat perlawanan ditentukan oleh seorang

pemimpin, berubah menjadi model perjuangan melalui organisasi pergerakan.

Seusai masa penjajahan Jepang, dan kemerdekaan Indonesia telah dicapai, perjuangan melawan Belanda masih tetap dilakukan baik melalui kekuatan fisik maupun diplomasi. Hal itu karena Belanda ingin tetap menguasai RI. Perlawanan fisik dikenal dengan Perang Kemerdekaan, yaitu Perang Kemerdekaan Pertama tahun 1947 menghadapi agresi militer pertama Belanda, dan Perang Kemerdekaan Kedua menghadapi agresi militer kedua Belanda tahun 1948.



Perjuangan para pahlawan negara waktu itu membuahkan hasil dengan ditandatanganinya piagam pengakuan kedaulatan RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Meski pengakuan kedaulatan telah diraih, namun belum berarti perjuangan telah selesai. Usaha-usaha untuk menata kembali pemerintahan serta pemulihan keamanan di dalam

negeri masih terus diusahakan. Di sinilah kemudian muncul orde-orde kepemimpinan di Indonesia. Faktanya dalam kurun waktu itu, peristiwa-peristiwa seputar perjuangan lokal kedaerahan hingga masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, di Yogyakarta banyak terjadi peristiwa-peristiwa besar sejalan dengan lahir dan berkembangnya negara Republik Indonesia.

Dari Yogyakarta dikenal tokoh antara lain : Sultan Agung, Raja Mataram yang mengadakan serangan terhadap VOC di Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Pangeran Diponegoro, bangsawan Kraton Kasultanan Yogyakarta yang melakukan perlawanan terhadap Belanda tahun 1825-1830. Dokter Wahidin Soedirohoesodo, ketua kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta tahun 1908. Kyai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi keagamaan Muhammadiyah tahun 1912. Ki Hadjar Dewantara, pendiri perguruan Tamansiswa tahun 1922. Serta tokoh-tokoh lain yang besar peranannya dalam merintis, mencapai, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

Tahun 1946, ketika menjadi tempat tujuan hijrahnya para pemimpin RI dari Jakarta, Yogyakarta praktis menjadi ibukota RI. Dengan demikian berarti pula menjadi pusat perjuangan yang sekaligus menjadi sasaran Belanda dalam usahanya menguasai RI kembali. Pada periode inilah total Yogyakarta menjadi "Benteng Proklamasi" hingga tahun 1949. Pertempuran yang mengakibatkan gugurnya para pahlawan pembela kemerdekaan sering terjadi di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Demikian pula pada masa penataan kembali pemerintah dan pemulihan keamanan hingga Orde Baru, Yogyakarta selalu tampil di atas panggung sejarah.

Bagi bangsa Indonesia, khususnya rakyat Yogyakarta, peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut merupakan suatu dokumen sejarah yang harus dilestarikan dan diwarisi oleh generasi muda. Adanya "media komunikasi" antara masyarakat dengan masa lalu dan masa kini sangat diperlukan. Dengan pola pikir itulah maka bangunan bekas Benteng Vredenburg difungsikan sebagai Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta.

BAB II

SEJARAH SINGKAT BENTENG VREDEBURG

A. Awal Pembangunan Benteng Vredeburg

Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tanggal 13 Pebruari 1755 berhasil membelah Kerajaan Mataram menjadi dua yaitu Kasunanan Surakarta dibawah kekuasaan Sri Susuhunan Paku Buwono III dan Kasultanan Yogyakarta dibawah kekuasaan Pangeran Mangkubumi (kelak menjadi Sri Sultan Hamengku Buwono I).

Dibawah pimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono I, Kasultanan Yogyakarta berkembang begitu pesat. Istana raja yang mulai dibangun sejak 9 Oktober 1755 dan mulai ditempati tanggal 7 Oktober 1756 dilengkapi dengan sarana pertahanan yang sempurna waktu itu, seperti parit dan benteng kraton. Untuk mengimbanginya maka pihak Belanda meminta ijin dari Sultan untuk membangun sebuah benteng bagi pasukan VOC (Verenegde Oost Indie Compagne) di Yogyakarta. Orang Jawa kemudian lebih mengenal VOC dengan sebutan Kompeni.

Sebelum dibangun benteng pada lokasinya yang sekarang (Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta), pada tahun 1760 atas permintaan Belanda, Sultan HB I telah membangun sebuah benteng yang sangat sederhana berbentuk bujur sangkar. Di keempat sudutnya dibuat tempat penjagaan yang disebut seleka atau bastion. Oleh Sultan keempat sudut tersebut diberi nama Jayawisesa (sudut barat laut), Jayapurusa (sudut timur laut), Jayaprakosaningprang (sudut barat daya) dan Jayaprayitna (sudut tenggara).

Menurut penuturan Nicolas Harting seorang Gubernur dari Direktur Pantai Utara Jawa di Semarang, bahwa pada tahun 1761 benteng Kompeni tersebut keadaannya masih sangat sederhana. Tembok dari tanah yang diperkuat dengan tiang-tiang penyangga dari kayu pohon kelapa dan aren. Bangunan di dalamnya terdiri atas bambu dan kayu dengan atap ilalang sehingga sangat mudah terbakar.

Setelah melihat kondisi benteng waktu itu, maka Willem Hendrik Van Ossenberch, seorang gubernur yang menggantikan Nicolas

Hartingh, pada tahun 1765 mengusulkan kepada Sultan agar benteng Kompeni di Yogyakarta diperkuat menjadi bangunan yang lebih permanen supaya dapat lebih menjamin keamanan Kasultanan Yogyakarta. Usul tersebut dikabulkan, dan rencananya akan diselesaikan pada tahun itu juga. Namun pada kenyataannya pembangunan benteng baru dilaksanakan pada tahun 1767 yang pelaksanaannya diserahkan kepada seorang ahli ilmu bangunan berkebangsaan Belanda bernama Ir. Frans Haak.

Proses pembangunan benteng berjalan sangat lambat. Dalam laporan yang disampaikan oleh J. Vos, pengganti Willem Hendrik van Ossebergh, bahwa pada tahun 1777 pembangunan benteng kompeni di Yogyakarta belum banyak mengalami kemajuan. Sebelumnya J.R. van den Burgh yang kemudian menggantikan J. Vos, pada tahun 1774 pernah melaporkan bahwa pembangunan benteng di Surakarta dan Yogyakarta sedang dalam giat-giatnya. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 1774, bangunan benteng Kompeni di Yogyakarta belum juga selesai.

Selanjutnya pada tahun 1781, J. Siberg, seorang gubernur pantai utara Jawa melaporkan bahwa benteng Kompeni di Yogyakarta telah terwujud, meski belum sempurna. Dalam laporannya dijelaskan bahwa rumah komandan belum selesai dan beberapa gedung belum dilengkapi dengan langit-langit. Laporan tersebut selanjutnya dilengkapi tahun 1787, bahwa lambatnya pembangunan benteng itu karena Sultan sedang disibukkan oleh pembangunan kratonnya. Namun akhirnya pada tahun 1788 benteng kompeni di Yogyakarta dapat diselesaikan. Selanjutnya benteng tersebut diberi nama Rustenburg yang berarti "Benteng Peristirahatan". Benteng kemudian dimanfaatkan secara sempurna oleh VOC sebagai benteng pertahanan.

Pada tahun 1867 di Yogyakarta terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat sehingga banyak merobohkan beberapa bangunan besar seperti Gedung Residen (yang dibangun tahun 1824), Tugu Pal Putih, dan Benteng Rustenburg serta bangunan-bangunan lain yang mempunyai peranan penting di Yogyakarta waktu itu. Bangunan-bangunan tersebut segera dibangun kembali. Benteng Rustenburg segera diadakan

pembenahan di beberapa bagian bangunan yang rusak. Setelah selesai diperbaiki, bangunan benteng yang semula bernama Rustenburg diganti menjadi *Vredeburg* yang berarti “Benteng Perdamaian”. Nama ini diambil sebagai manifestasi hubungan antara Kasultanan Yogyakarta dengan pihak Belanda yang tidak saling menyerang waktu itu.

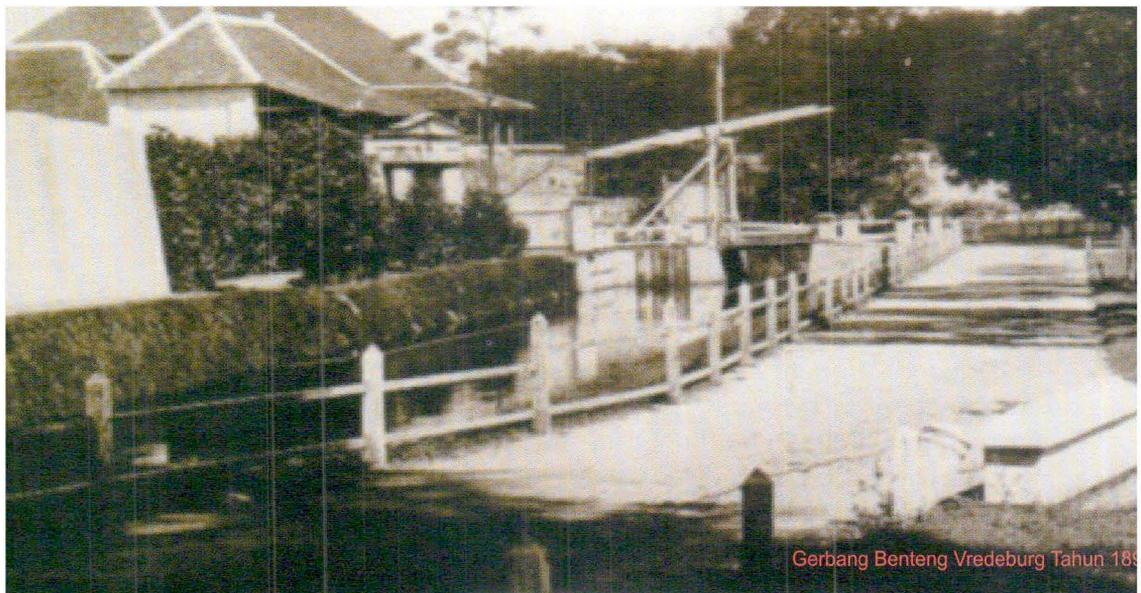
B. Pemanfaatan Benteng Vredeburg

Benteng Kompeni di Yogyakarta, sejak awal dibangunnya hingga kemudian berganti nama dari Rustenburg menjadi Vredeburg, dimanfaatkan oleh Belanda guna mendukung penyelenggaraan kekuasaannya di Yogyakarta.

Sejak tahun 1760, dimana keadaan benteng masih dalam kondisi sangat sederhana, hingga runtuhnya VOC pada tahun 1799, benteng dimanfaatkan oleh Belanda sebagai markas pertahanan. Keruntuhan VOC di Indonesia, yang menyebabkan seluruh aset VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda (Bataafsche Republik), menyebabkan penguasaan atas benteng mengalami perubahan pula. Benteng dengan sendirinya berpindah tangan dari VOC kepada pemerintah Belanda (Bataafsche Republik). Hal ini berlangsung hingga tahun 1807 dibawah pengawasan Gubernur Jenderal Van Den Burg.

Ketika Belanda berubah menjadi kerajaan vasal Perancis, akibat dari perkembangan politik di Eropa dimana Inggris yang merupakan sekutu Belanda mengalami kekalahan perang terhadap Perancis, maka penguasaan Benteng Vredeburg di Yogyakarta juga mengalami perubahan, yaitu berada di bawah penguasaan Konkljik Hollands (Pemerintah Kerajaan Belanda). Waktu itu raja Belanda Louis Lodlijk Napoleon menugaskan Herman Willem Daendels (Daendels) untuk memerintah di Indonesia. Benteng berada dibawah pengawasan Daendels berlangsung dari tahun 1807-1811, yang diakhiri dengan masuknya tentara Inggris ke Indonesia.

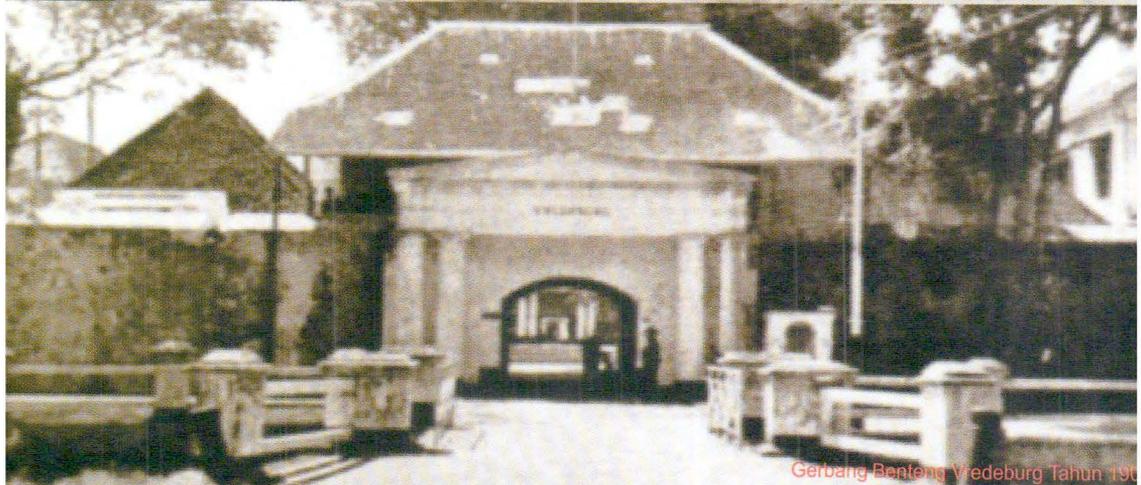
Masuknya pasukan Inggris ke Indonesia ditandai dengan adanya Rekapitulasi Tuntang yang ditandatangani pada tanggal 18 November 1811 oleh Willem Jansens (pengganti Daendels) dengan pihak Inggris. Di



Gerbang Benteng Vredeburg Tahun 1890



Suasana di Depan Gerbang Benteng Vredeburg Tahun 1900



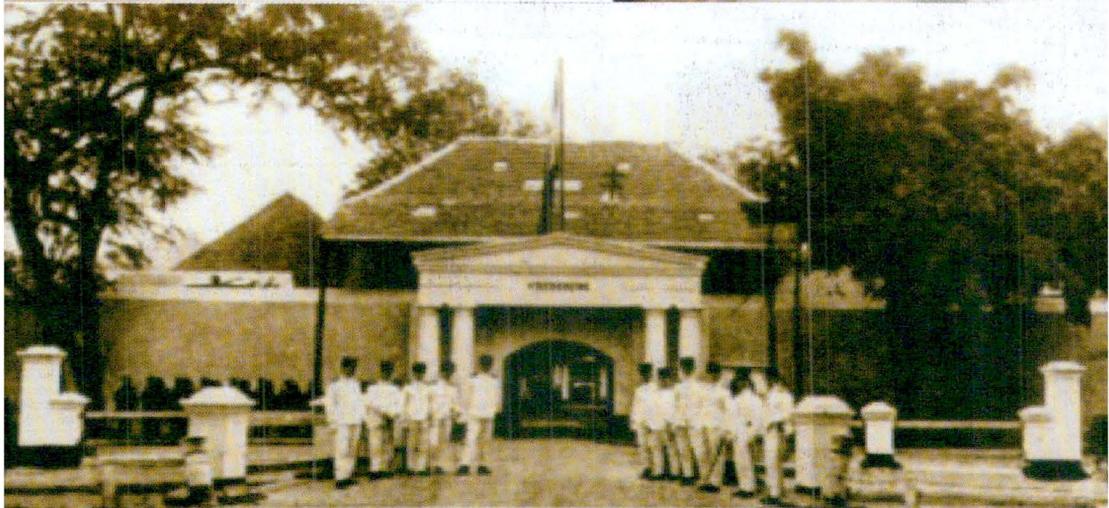
Gerbang Benteng Vredeburg Tahun 1900



Gerbang Benteng Vredeburg Dari Gedung Agung Tahun 1896



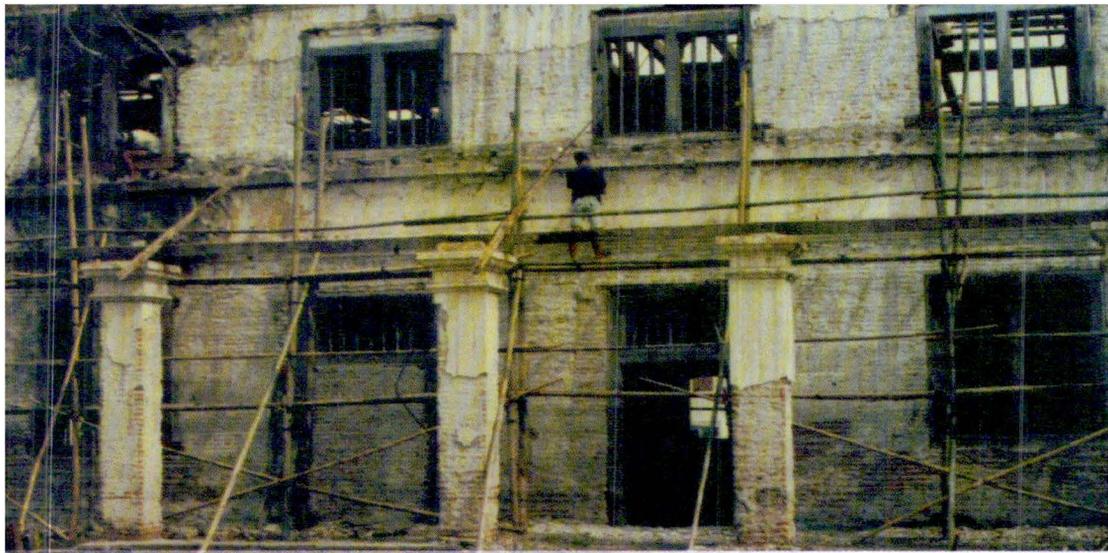
Anjungan Sudut Barat Daya Benteng Vredeburg Tahun 1920



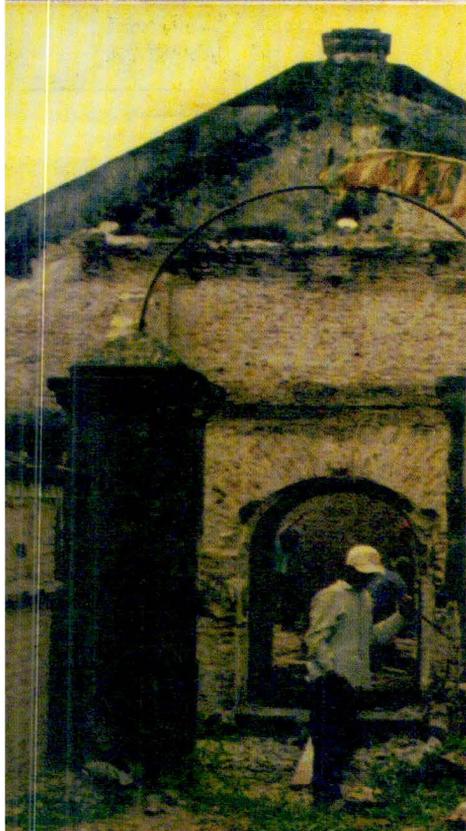
Gerbang Benteng Vredeburg Tahun 1920



Suasana Sekitar Benteng Vredeburg Tahun 1925 - 1935



Pemugaran Gedung C
Gedung C Dahulu Merupakan Gedung Societeit, Setelah Dipugar Difungsikan Sebagai Ruang Pameran Tetap Dan Ruang Diskusi



Pemugaran Gedung I
Dahulu Sebagai Gudang Mesin Setelah Dipugar Menjadi Gudang Koleksi



Pemugaran Gedung I
Dulu Sebagai Paviliun Setelah Dipugar Menjadi Gedung Penginapan

bawah pemerintahan Inggris, Indonesia dipimpin oleh Gubernur Sir Stamford Raffles. Indonesia berada di bawah kekuasaan Inggris berlangsung relatif singkat, yaitu sejak 1811-1816. Hal ini terjadi dipengaruhi oleh peristiwa di Eropa, dimana Napoleon Bonaparte pemimpin Perancis mengalami kekalahan di berbagai peperangan, sehingga negara-negara yang berada dibawah pengaruhnya mulai melepaskan diri, termasuk negara Belanda. Keberhasilan Belanda memperoleh kedaulatannya kembali menyebabkan Pangeran Willem VI memperoleh kembali kekuasaannya sebagai raja dan berdaulat. Hal ini menyebabkan kembalinya kekuasaan Belanda di Indonesia menggantikan Inggris.

Belanda kembali menguasai Indonesia pada tahun 1816 setelah pasukan Inggris meninggalkan wilayah tersebut. Hingga tahun 1942, Belanda dengan leluasa tetap berkuasa di Indonesia. Demikian pula penguasaan atas Benteng Kompeni di Yogyakarta yang kemudian diberi nama Vredeburg tersebut dimanfaatkan secara sempurna oleh Belanda sebagai benteng pertahanan. Beberapa fasilitas yang terdapat di dalam kompleks benteng tersebut mengarah pada fungsinya sebagai sarana pertahanan. Disamping itu benteng juga digunakan sebagai gudang mesiu, ruang tahanan, dan barak prajurit.

Sejak Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati bulan Maret 1942, Indonesia berada dibawah kekuasaan Jepang. Kekuatan baru tersebut mulai masuk kota Yogyakarta pada tanggal 6 Maret 1942, dan kemudian menduduki tempat-tempat yang dulunya dipergunakan oleh Belanda untuk menjalankan pemerintahannya, termasuk Benteng Vredeburg. Dibawah kekuasaan Jepang, Benteng Vredeburg dimanfaatkan sebagai markas kesatuan militer yang terkenal sangat kejam yaitu Kempeitei (Polisi Militer), disamping sebagai gudang mesiu dan rumah tahanan. Perlengkapan militer Jepang yang didatangkan dari Semarang, sebelum didistribusikan ke pos-pos yang ditentukan, terlebih dulu disimpan di Benteng Vredeburg.

Benteng Vredeburg dibawah kekuasaan Jepang berlangsung dari tahun 1942 hingga 1945. Ketika berita Proklamasi 17 Agustus 1945 di

Jakarta sampai ke Yogyakarta, para pemuda, pelajar, dan BKR segera mengadakan tindakan nasionalisasi aset tentara pendudukan Jepang, serta mengadakan gerakan pelucutan senjata Jepang. Terkait dalam hal ini, Benteng Vredenburg menjadi sasaran gerakan nasionalisasi yang dilakukan oleh para pemuda dan BKR. Selanjutnya pada masa kemerdekaan Benteng Vredenburg diserahkan kepada Instansi Militer yang kemudian dipergunakan sebagai asrama dan markas pasukan yang tergabung dalam pasukan dengan kode Staf "Q" di bawah Komandan Letnan Muda I Radio, yang bertugas mengurusi perbekalan militer.

Pada tahun 1946 di dalam kompleks Benteng Vredenburg didirikan Rumah Sakit Tentara untuk melayani korban pertempuran. Namun dalam perkembangannya rumah sakit tersebut juga melayani tentara beserta keluarganya.

Ketika tahun 1946 kondisi politik Indonesia mengalami kerawanan disaat perbedaan persepsi akan arti revolusi yang sedang terjadi, maka meletuslah peristiwa yang dikenal dengan "Peristiwa 3 Juli 1946", yaitu percobaan kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Mayor Soedarsono. Karena usaha tersebut gagal maka para tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut seperti Mohammad Yamin, Tan Malaka dan Soedarsono ditangkap. Sebagai tahanan politik mereka pernah ditempatkan di Benteng Vredenburg. Hingga meletusnya Agresi Militer II Belanda, Benteng Vredenburg dimanfaatkan sebagai markas TNI.

Pada tanggal 19 Desember 1948, ketika meletus agresi militer II Belanda, Benteng Vredenburg menjadi sasaran serangan Belanda. Setelah berhasil menguasai kota Yogyakarta, Benteng Vredenburg yang semula dipergunakan sebagai markas TNI, dikuasai oleh Belanda dan dipergunakan sebagai markas IVG (Informatie Voor Geheimen / Dinas Rahasia Tentara Belanda). Disamping itu Benteng Vredenburg juga difungsikan sebagai asrama prajurit Belanda dan juga dipergunakan sebagai tempat penyimpanan senjata berat seperti tank, panser dan kendaraan militer lainnya.

Sebelum terjadi peristiwa Yogya Kembali tanggal 29 Juni 1949, Benteng Vredenburg telah berhasil dikuasi oleh TNI ketika terjadi

Serangan Umum 1 Maret 1949, meskipun hanya dalam waktu 6 jam. Kemudian setelah Yogya Kembali, Benteng dikuasai oleh pemerintah RI sampai sekarang.

Setelah Belanda meninggalkan kota Yogyakarta, Benteng Vredenburg dikuasai oleh APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia). Kemudian pengelolaan benteng diserahkan kepada Militer Akademi Yogyakarta. Pada waktu itu Ki Hadjar Dewantara pernah mengemukakan gagasannya agar Benteng Vredenburg dimanfaatkan sebagai ajang kebudayaan. Akan tetapi gagasan itu terhenti karena terjadi "Tragedi Nasional" Pemberontakan G 30 S / PKI tahun 1965. Waktu itu untuk sementara Benteng Vredenburg digunakan sebagai tempat tahanan politik terkait dengan peristiwa G 30 S / PKI yang langsung berada di bawah pengawasan HANKAM.

Benteng Vredenburg juga pernah dipergunakan sebagai ajang Jambore Seni (26 - 28 Agustus 1978), Pendidikan dan latihan Dodiklat POLRI, serta pernah pula dipergunakan sebagai markas Garnizun 072 dan markas TNI AD Batalyon 403. Waktu itu pengelolaan benteng pernah diserahkan dari pihak HANKAM kepada Pemerintah Daerah Yogyakarta.

C. Benteng Vredenburg Menjadi Museum

Gagasan pertama untuk memanfaatkan Bekas Benteng Vredenburg Yogyakarta sebagai ajang kebudayaan muncul dari Ki Hadjar Dewantara. Namun gagasan itu tidak dapat direalisasikan karena pada tahun 1965, Benteng Vredenburg dimanfaatkan sebagai tempat tahanan politik yang terkait dengan peristiwa G 30 S / PKI. Pada tahun 1976 diadakan studi kelayakan bangunan bekas Benteng Vredenburg oleh Lembaga Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Awal dari pelaksanaan pemugaran Benteng Vredenburg dilakukan oleh Yayasan Budaya Nusantara dengan akte notaris RM. Soeryanto Partaningrat No. 81 tanggal 15 September 1979, dalam berita negara No. 90 tanggal 9 November 1979. Dalam akte tersebut Benteng Vredenburg akan dijadikan "Pusat Informasi dan Pengembangan Budaya

Nusantara". Tanggal 28 Agustus 1979 pengurus yayasan menghadap presiden. Dalam pertemuan tersebut presiden memberikan arahan bahwa pemugaran Benteng Vredeburg bukan berarti memugar kemegahan bangunan kolonial, namun sebaliknya pemugaran tersebut mencerminkan perjuangan dan kemampuan bangsa Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan. Presiden bersedia menjadi 12 Pembina Utama Yayasan Budaya Nusantara dan sekaligus memberikan dana. Selanjutnya pemanfaatan Benteng Vredeburg sebagai Pusat Informasi dan Pengembangan Budaya Nusantara dikukuhkan dengan adanya penandatanganan piagam perjanjian antara Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Pihak Pertama dan Dr. Daud Jusuf (Mendikbud) sebagai Pihak Kedua, pada tanggal 9 Agustus 1980. Selanjutnya pemugaran Benteng Vredeburg dijalankan pada tahun anggaran 1980/1981 dengan sumber dana dari bantuan presiden (banpres) dan dana pembangunan. Dengan pertimbangan bahwa bangunan tersebut merupakan bangunan bersejarah yang sangat besar artinya maka pada tahun 1981 bangunan di tetapkan sebagai Benda Cagar Budaya (BCB) berdasarkan Ketetapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0224/U/1981 tanggal 15 Juli 1981. Secara fisik pemugaran baru dapat berjalan pada bulan Agustus tahun 1981. Sebagai Ketua Umum Yayasan Budaya Nusantara waktu itu adalah Ki Suratman.

Tentang pemanfaatan bangunan Benteng Vredeburg, dipertegas lagi oleh Prof. Dr. Nugroho Notosusanto (Mendikbud RI) tanggal 5 November 1984 yang mengatakan bahwa bangunan bekas Benteng Vredeburg tidak dimaksudkan untuk tujuan melestarikan simbol keperkasaan dan kejayaan kolonial Belanda, melainkan diarahkan untuk mendapatkan fungsi baru yang dapat memberikan informasi dan aspirasi perjuangan nasional bagi generasi mendatang. Untuk itu bangunan Benteng Vredeburg dimanfaatkan sebagai museum Perjuangan Nasional yang khas dan tidak ada duanya di Indonesia. Karena itulah maka sejak tahun anggaran 1985/1986 Benteng Vredeburg dipugar untuk difungsikan sebagai museum.

Sesuai dengan Piagam Perjanjian serta surat Sri Sultan Hamengku

Buwono IX Nomor : 359/HB/IV/85 tanggal 16 April 1985 menyebutkan bahwa perubahan-perubahan di dalam diizinkan sesuai kebutuhan.

Tahun 1987 museum dapat dikunjungi oleh umum yang pembukaannya secara simbolik dilakukan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. Dr. Hariyati Soebadio. Waktu itu pengelolaan museum dilaksanakan oleh Kanwil Depdikbud Prop DIY.

Pada tanggal 23 November 1992 bangunan bekas Benteng Vredeburg secara resmi menjadi Museum Khusus Perjuangan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (ketika itu Prof. Dr. Fuad Hasan) Nomor 0475/O/1992 dengan nama Museum Benteng Yogyakarta.

BAB III

MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA

A. Nama, Status dan Jenis Museum

Sebelum menjadi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, nama yang dipakai untuk menyebut museum tersebut telah mengalami perubahan beberapa kali. Yang pertama kali digunakan adalah Museum Bekas Benteng Vredeburg Yogyakarta. Nama ini dipakai sejak awal mula museum dibuka untuk umum yaitu pada tahun 1987 oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Depdikbud RI Prof. Dr. Haryati Soebadio. Waktu itu museum berada di bawah Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.

Pada tahun 1992, tepatnya tanggal 23 November secara resmi Museum Bekas Benteng Vredeburg Yogyakarta menjadi UPT (Unit Pelaksana Teknis) di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0475/0/1992, dengan nama Museum Benteng Yogyakarta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu dijabat oleh Prof. Dr. Fuad Hasan. Secara administratif kepala museum bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY, dan secara teknis kepada Direktur Permuseuman Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Kemudian pada tahun 2002, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pariwisata Nomor : KEP-05/BP BUDPAR/2002, tanggal 21 Agustus 2002 disebutkan bahwa Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta adalah Museum Khusus yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Direktorat Purbakala dan Permuseuman, Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya. Dalam hal ini Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, perawatan, pengawetan, penelitian, penyajian, penerbitan hasil penelitian dan pemberian bimbingan edukatif tentang benda dan sejarah perjuangan

bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta. Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata waktu itu adalah Setyanto P. Santosa.

Satu tahun kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.48/OT.001/MKP/2003 tanggal 5 Desember 2003, disebutkan bahwa Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala, yang sehari-hari dilaksanakan oleh Asisten Deputi Urusan Kepurbakalaan dan Permuseuman. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata waktu itu adalah I Gede Ardike.

Selanjutnya pada tahun 2006, berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.34/OT.001/MKP-2006, tanggal 7 September 2006, disebutkan bahwa Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta sebagai museum khusus merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Museum. Menteri kebudayaan dan Pariwisata periode ini adalah Jero Wacik.

Mengenai status Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta, sejalan dengan perubahan nama departemen serta susunan herarki instansi terkait yang ada di bawahnya, selalu mengalami perubahan. Pada saat pertama kali museum menjadi UPT tahun 1992 hingga sekarang (tahun 2007), statusnya adalah museum negeri (pemerintah). Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh museum didukung dengan dana APBN.

Menurut jenisnya, Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta adalah termasuk Museum Khusus, yaitu museum khusus sejarah perjuangan bangsa Indonesia di Wilayah Yogyakarta. Sebagai museum khusus sejarah, koleksi-koleksi museum selalu berorientasi pada peristiwa-peristiwa sejarah, baik dalam merintis, mencapai, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan.

B. Visi dan Misi Museum

a. Visi Museum

Visi Museum Benteng Vredeburg adalah terwujudnya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan museum, yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkokoh jati diri, ketahanan budaya dan integrasi nasional.

b. Misi Museum

1. Mewujudkan peran museum sebagai sarana edukasi, pariwisata, pusat informasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Mewujudkan pelestarian benda-benda peninggalan sejarah dan kebudayaan untuk memperkokoh jati diri bangsa.
3. Mewujudkan museum sebagai sarana dan prasarana bagi pengembangan pembelajaran ilmu sejarah dan kebudayaan.
4. Mewujudkan nuansa edutainment dalam penyajian tata pameran benda-benda peninggalan sejarah dan kebudayaan.
5. Meningkatkan pemahaman sejarah dan kebudayaan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesadaran nasional dalam rangka memperkokoh jati diri, ketahanan budaya dan integrasi bangsa.

C. Ruang Lingkup

a. Letak

Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta terletak pada pusat Kota Yogyakarta, tepat di kawasan 0 KM. Letaknya sangat strategis tepat berada di depan Gedung Agung, Gedung Kepresidenan Yogyakarta. Secara administratif Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani 6 Yogyakarta. Bagian utara dibatasi oleh Jalan Pabringan, yaitu sebuah jalan yang berhimpitan dengan Pasar Beringharja Yogyakarta. Sebelah barat dibatasi oleh Jalan Jenderal Ahmad Yani, merupakan jalan lama yang dulunya

bernama Jalan Residen (Residenstraat). Kemudian bagian selatan dibatasi oleh Jalan Panembahan Senopati, sedangkan di bagian timur dibatasi oleh Jalan Sriwedani.

Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta terletak di daerah kawasan bangunan-bangunan Indis (bangunan bergaya Hindia Belanda). Bangunan-bangunan tersebut antara lain Gedung Agung, Kantor Pos, Bank Indonesia, Seni Sono, BNI 1946, Gereja Margamulya, dan Societeit. Dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, bangunan-bangunan tersebut merupakan harta karun yang tak ternilai harganya, karena mengandung informasi sejarah terkait dengan keberadaan Kota Yogyakarta pada masa kolonial Belanda.

Disamping itu Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta terletak tidak jauh dari pusat wisata dan belanja. Kraton sebagai salah satu tujuan wisata yang sangat menarik di Yogyakarta, dapat ditempuh cukup 10 menit dengan jalan kaki dari Museum Benteng Yogyakarta, demikian pula dengan Museum Sonobudoyo sebagai museum tertua di Yogyakarta. Di sebelah timur yang letaknya berhimpitan dengan Benteng Vredeburg terdapat Taman Pintar, yaitu taman bermain bagi anak-anak yang berpotensi untuk dapat dijadikan media pendidikan. Disamping itu untuk menuju pusat perbelanjaan, dari Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta tidak mengalami kesulitan. Ke Pusat Perbelanjaan Malioboro cukup ditempuh dalam waktu 5 menit jalan kaki, demikian pula untuk menuju ke Pasar Beringharjo, sebuah pasar tua yang dibangun pada masa-masa awal Kasultanan Yogyakarta.

b. Koleksi

Melihat kembali Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.34/OT.001/MKP-2006, tanggal 7 September 2006, disebutkan bahwa Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta sebagai museum khusus merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kebudayaan

dan Pariwisata, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Museum. Disebutkan pula bahwa Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, perawatan, pengawetan, penelitian, penyajian, penerbitan hasil penelitian dan memberikan bimbingan edukatif kultural mengenai benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam lingkup tempat, orientasi tentang benda koleksi museum adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Sedangkan dalam lingkup waktu adalah masa perjuangan baik merintis, mencapai, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

Mengenai bentuk koleksi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Bangunan yaitu meliputi bangunan keseluruhan yang terdapat di dalam kompleks Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta lengkap dengan pendukungnya, antara lain tembok benteng, parit (jagang), jembatan, anjungan, tanah lapang di luar benteng, lapangan di dalam benteng, dan bangunan-bangunan yang ada di dalam benteng.
2. Benda realia saksi peristiwa bersejarah dalam perjuangan merintis, mencapai, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.
3. Benda replika, yaitu tiruan dari benda asli yang berperan dalam perjuangan dalam rangka merintis, mencapai, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.
4. Benda visualisasi peristiwa bersejarah dalam rangka merintis, mencapai, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, yang dapat berupa patung, lukisan, minirama, maket, miniatur, dan sebagainya.
5. Foto dan duratran serta hasil pendokumentasian lainnya

yang terkait dengan perjuangan dalam rangka merintis, mencapai, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Untuk kelompok ini dapat berupa foto, foto duratran, film, microfilm, slide dan sebagainya.

Benda-benda tersebut dalam penyimpanannya dipisahkan dalam dua tempat yaitu dalam ruang pameran dan dalam gudang koleksi (storage). Koleksi yang telah terpajang di ruang pameran adalah koleksi yang telah mengalami proses penelitian, sehingga kredibilitas informasinya telah memenuhi kriteria untuk disajikan. Sedangkan koleksi yang tersimpan di gudang koleksi (storage), adalah koleksi-koleksi yang belum mengalami proses penelitian. Meskipun demikian, ada juga koleksi yang telah mengalami proses penelitian namun disimpan di gudang koleksi karena keterbatasan luas ruang pameran.

c. Kegiatan

Sebagai aktualisasi dari visi dan misinya, Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta telah mencanangkan berbagai kegiatan dalam program kerja yang disusun pada setiap tahun anggaran. Meskipun bentuk serta materinya dapat berubah-ubah dan selalu mengalami improvisasi, namun pada hakekatnya kegiatan yang dilakukan di museum meliputi : pameran, seminar, penelitian, dan lomba. Setelah dikemas dengan tambahan tema-tema tertentu kegiatan-kegiatan tersebut akan mempunyai judul yang banyak ragamnya. Untuk pengembangan kegiatan tersebut tentunya harus disesuaikan dengan visi dan misi Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta.

d. Fasilitas

Fasilitas yang dimiliki oleh Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta untuk menunjang fungsionalisasinya sebagai museum khusus sejarah, antara lain :

1. Ruang Pameran

Ruang Pameran adalah ruang yang ditata sedemikian rupa sehingga menjadi tempat untuk menyajikan koleksi-koleksi museum yang dapat dikunjungi oleh umum pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Ruang pameran yang terdapat di Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta dibagi menjadi dua kategori, yaitu ruang pameran tetap dan ruang pameran temporer. Ruang pameran tetap adalah ruang pameran yang dipergunakan untuk menyajikan koleksi-koleksi museum dalam jangka waktu relatif lama, kurang lebih tiga tahun. Sedangkan ruang pameran temporer adalah ruang pameran yang dipergunakan untuk menyajikan koleksi dengan tema-tema tertentu dalam kurun waktu tertentu yang relatif singkat.

Ruang pameran tetap Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta terdiri dari Ruang Pameran Minirama I sampai dengan IV, yang masing-masing menempati gedung, M3, M1 dan M2, E, dan G. Pada masa lampau gedung tersebut dipergunakan masing-masing sebagai Barak Perwira Selatan I, Barak Perwira Utara II, Barak Perwira Utara I, dan Societeit.

Ruang minirama I menceritakan peristiwa sejarah yang terjadi di Yogyakarta sejak berakhirnya Perang Diponegoro hingga masa pendudukan Jepang. Ruang Minirama II menceritakan tentang peristiwa-peristiwa sejarah di Yogyakarta sejak Proklamasi Kemerdekaan sampai dengan Masa Agresi Militer Belanda I. Ruang Minirama III menceritakan tentang peristiwa sejarah yang terjadi di Yogyakarta sejak ditandatanganinya Perjanjian Renville hingga Pangakuan Kedaulatan RIS. Sedangkan untuk Ruang Minirama IV dipakai untuk menyajikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Yogyakarta sejak Pemilu I tahun 1951 sampai dengan Pencanangan P4 oleh Presiden Soeharto di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1974.

Sedangkan untuk tata pameran di luar gedung, yang

juga termasuk dalam tata pameran tetap Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, adalah susunan dan tata letak bangunan di dalam kompleks Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Meskipun itu merupakan bangunan, namun karena nilai sejarah yang terkandung di dalamnya, serta merupakan saksi terjadinya peristiwa-peristiwa penting masa kolonial Belanda di Yogyakarta, maka bangunan-bangunan tersebut diberlakukan sebagai koleksi museum.

Sedangkan ruang pameran temporer yang terdapat di Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta menempati gedung E lantai 2 dan Gedung D lantai 2. Dulu bangunan-bangunan tersebut berfungsi masing-masing sebagai Barak Perwira Utara I, dan Barak Prajurit Barat. Ruang pameran temporer ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk keperluan pameran maupun keperluan lain yang identik, seperti gelar seni budaya, workshop, dan sebagainya. Selain ruang pameran indoor (di dalam ruang), ada juga masyarakat yang memanfaatkan ruang-ruang lain selain yang telah disebutkan di atas untuk menggelar pameran. Antara lain di serambi ruang minirama III dan halaman tengah.

2. Perpustakaan

Bagi museum, sebagai institusi yang bergerak dalam bidang ilmu pengetahuan, keberadaan perpustakaan adalah menjadi sebuah keharusan. Disamping sebagai sumber informasi pendamping di museum, perpustakaan ini diperuntukkan untuk umum, khususnya bagi masyarakat pelajar. Kekuranglengkapan informasi yang tertera dalam label koleksi materi pameran, dapat dinetralisir dengan tersedianya berbagai referensi yang tersedia di perpustakaan ini.

Buku-buku yang disimpan dan dikelola di perpustakaan Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta antara lain buku-buku sejarah, sastra, serta ilmu-ilmu sosial lainnya. Sebagai

pelengkap juga ada buku-buku pengetahuan alam, dan teknologi.

Perpustakaan Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta menempati gedung J (dulu gudang perlengkapan non militer). Sebelumnya perpustakaan menempati gedung F lantai 1. Gedung ini dulu dipergunakan sebagai ruang fasilitas umum (rumah sakit). Perpindahan tersebut dengan pertimbangan agar pelayanan terhadap pengunjung museum, khususnya para pengguna perpustakaan lebih meningkat, mengingat letaknya yang relatif dekat dengan pintu masuk museum sehingga sangat mudah diakses oleh pengunjung. Disamping itu untuk memisahkan ruang publik dan ruang administrasi agar perannya optimal.

3. Ruang Audio Visual

Ruang audio visual dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti pemutaran film, seminar/diskusi, atau kegiatan lain yang menggunakan peralatan multi media lainnya. Ruang audio visual ini menempati gedung F lantai 2 dan berkapasitas kurang lebih 150 orang.

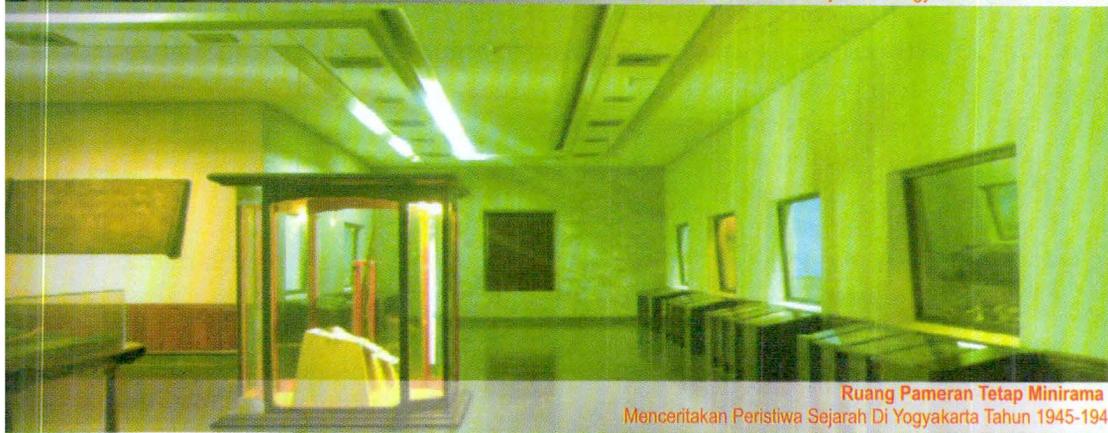
Berbagai kegiatan telah diselenggarakan di ruang ini, antara lain festival film dokumenter, seminar film, pekan animasi, dan sebagainya. Juga tidak jarang di ruang ini diselenggarakan workshop, seminar, diskusi, dan kegiatan-kegiatan lain yang memerlukan dukungan peralatan multimedia. Pertimbangan para pemakai ruangan ini, bahwa ruangan ini sangat representatif dalam mendukung kegiatan mereka karena ketersediaan fasilitas yang mereka butuhkan seperti sound sistem, LCD Proyektor, Ruang Seminar, dan sebagainya.

4. Ruang Auditorium

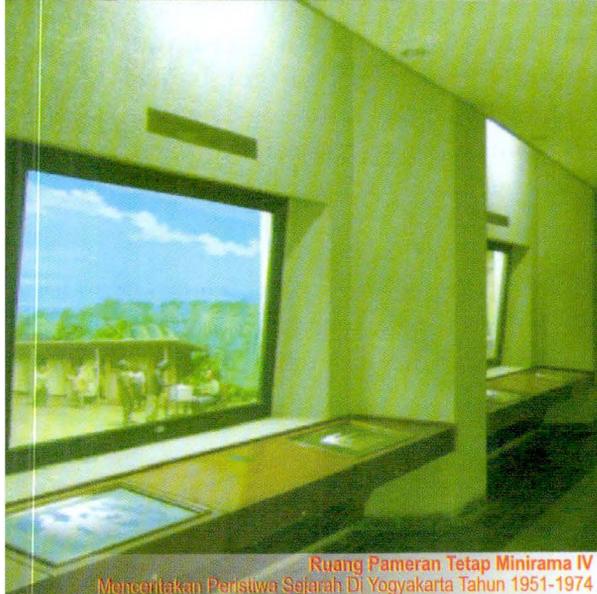
Ruang auditorium atau ruang diskusi dan seminar menempati gedung G lantai 2 (dulu dipakai sebagai societieit), sedang untuk lantai 1 dimanfaatkan untuk ruang pameran



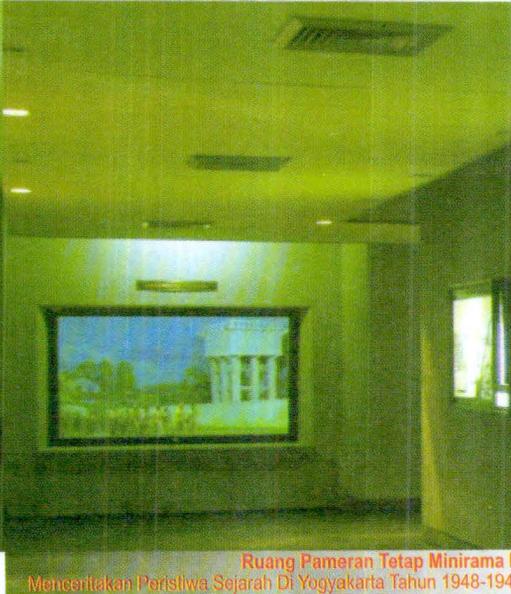
Ruang Pameran Tetap Minirama
Menceritakan Peristiwa Sejarah Di Yogyakarta Tahun 1830-194



Ruang Pameran Tetap Minirama
Menceritakan Peristiwa Sejarah Di Yogyakarta Tahun 1945-194



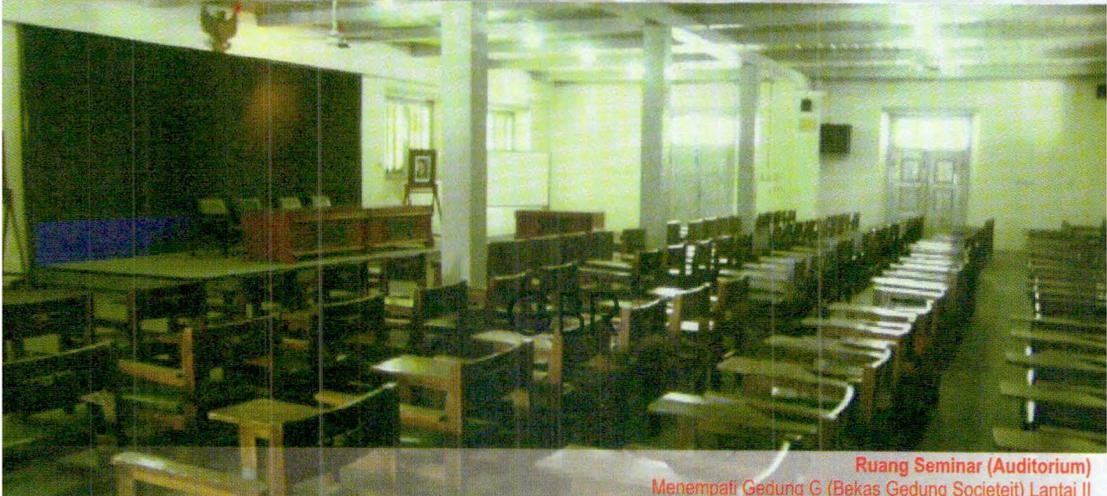
Ruang Pameran Tetap Minirama IV
Menceritakan Peristiwa Sejarah Di Yogyakarta Tahun 1951-1974



Ruang Pameran Tetap Minirama I
Menceritakan Peristiwa Sejarah Di Yogyakarta Tahun 1948-194



Ruang Pameran Temporer
Menempati Gedung E (Bekas Barak Prajurit Utara) Lantai II



Ruang Seminar (Auditorium)
Menempati Gedung G (Bekas Gedung Societeit) Lantai II



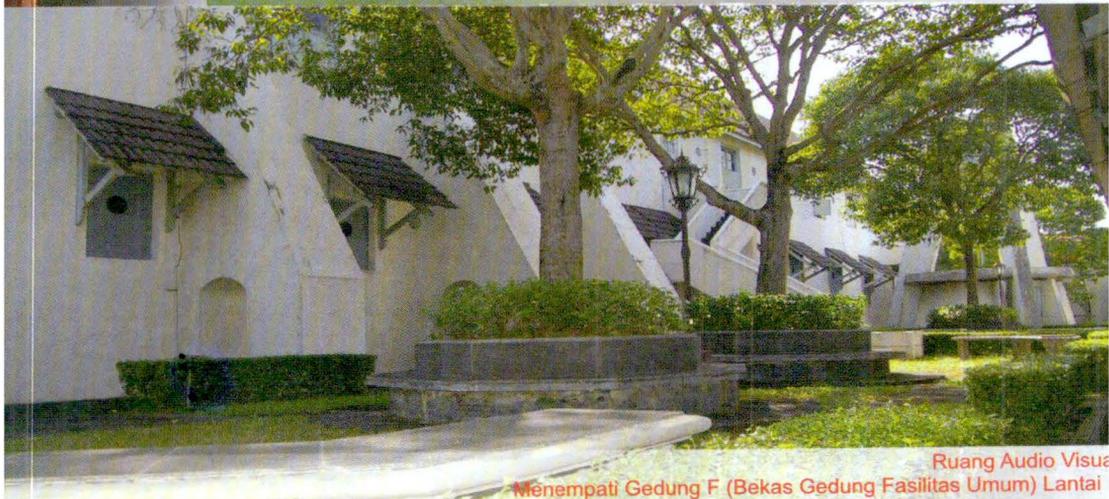
Ruang Audio Visual
Menempati Gedung F (Bekas Gedung Fasilitas Umum) Lantai II



Panggung Terbuka Bekas Lokasi Banguna
Panggung Terbuka Menjadi Sarana Yang Multi Fungsi Bagi Pelayanan Terhadap Masyarakat



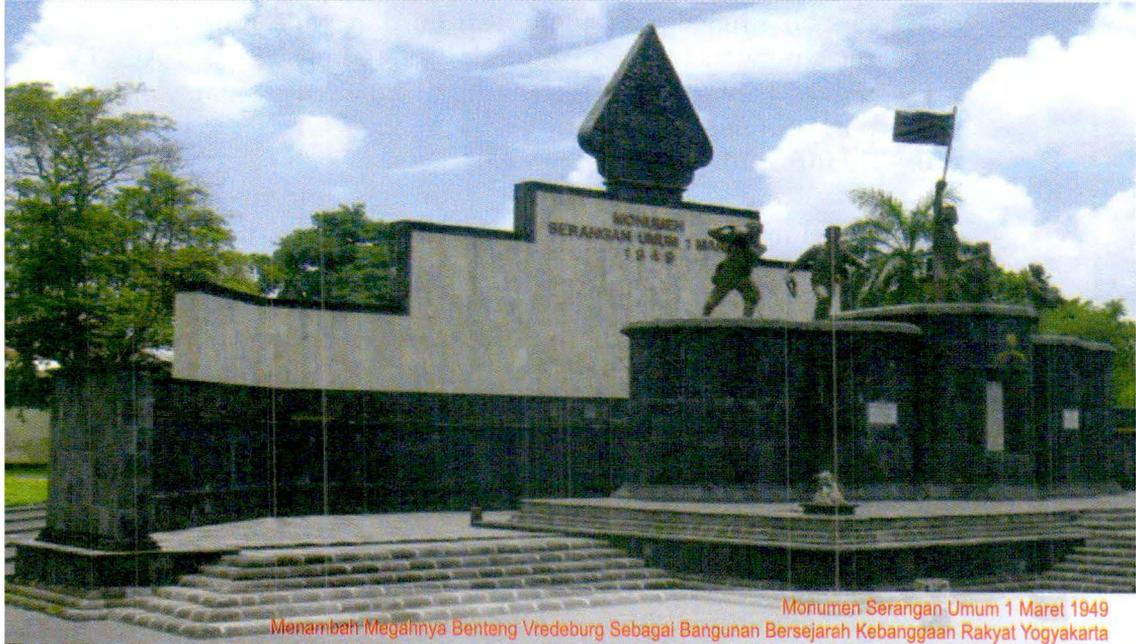
Taman Bermain / Play Ground di Gedung D Lantai
Menempati Gedung F (Bekas Gedung Fasilitas Umum) Lantai



Ruang Audio Visual
Menempati Gedung F (Bekas Gedung Fasilitas Umum) Lantai



Taman Yang Indah Dan Luas
Merupakan Fasilitas Pendukung Sebagai Tempat Rekreasi



Menambah Megahnya Benteng Vredenburg Sebagai Bangunan Bersejarah Kebanggaan Rakyat Yogyakarta



Areal Parkir Yang Relatif
Luas Merupakan Fasilitas Penting Yang Dimiliki Oleh Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta

tetap minirama IV. Di ruang ini tersedia fasilitas seminar antara lain sound sistem, OHP (Over Head Projector), layar, meja kursi para pembicara, kursi peserta, serta ruang lobi yang berada di lantai 1 bersebelahan dengan ruang pameran minirama IV. Ruang ini berkapasitas kurang lebih 250 orang.

5. Guest House

Guest House (penginapan) menempati gedung H, yaitu sebuah gedung di dalam kompleks Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta yang pada masa penjajahan Belanda merupakan Paviliun (rumah tinggal perwira). Beberapa pejabat dari pusat pernah singgah di penginapan ini dan pada intinya mereka puas dengan fasilitas yang ada di dalamnya seperti AC, TV, kulkas, kamar mandi, serta didukung oleh pelayanan yang baik dari petugas.

6. Ruang Studi Koleksi (Storage)

Ruang studi koleksi (storage) merupakan ruang penyimpanan koleksi-koleksi museum yang tidak disajikan dalam tata pameran. Sistem penyimpanan koleksi museum berbeda dengan penyimpanan barang-barang bukan koleksi. Suhu dan kelembaban ruangan harus senantiasa dikontrol dan dikondisikan pada keadaan standar penyimpanan koleksi museum, baik yang berbahan organik maupun anorganik. Hal ini dilakukan untuk menjaga koleksi dari kerusakan baik oleh alam maupun manusia.

Ruang studi koleksi Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta terdiri dari 3 (tiga) buah, yaitu gedung K1 (bekas dapur selatan), K2 (bekas dapur utara), dan gedung I (bekas gudang mesiu). Ruang studi koleksi di gedung K1 tersimpan koleksi-koleksi realia maupun replika, sedang di gedung K2 tersimpan koleksi foto. Untuk gedung I terdapat koleksi realia maupun foto.

7. Ruang Konservasi

Ruang konservasi adalah ruang yang dipergunakan untuk

merawat koleksi baik secara kuratif maupun prefentif. Ruang konservasi menempati gedung N yang dulu pada masa kolonial Belanda difungsikan sebagai gudang senjata berat dan ringan. Di dalam ruang ini terdapat bermacam-macam perlengkapan yang terkait dengan penanganan koleksi (kuratif/prefentif), antara lain oven, kotak fumigasi, mikroskop, obat-obat kimia, dan sebagainya.

8. Kamar Gelap

Merupakan tempat untuk melakukan proses cuci cetak foto hitam putih secara analog. Dalam ruang ini terdapat beberapa alat yang terkait dengan pekerjaan proses cuci cetak gambar hitam putih, antara lain enlarger, timer, dan sebagainya. Dalam ruang ini juga tersimpan obat-obat kimia yang digunakan untuk proses cuci cetak foto.

9. Taman

Taman merupakan fasilitas yang dimiliki oleh Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Taman ini dibedakan menjadi dua yaitu taman yang berada di dalam benteng dan taman yang berada di luar benteng. Taman yang berada di dalam benteng cukup luas dan dapat dipakai untuk berbagai kegiatan seperti FKY, pameran pendidikan, pameran pembangunan, serta di sisi paling timur dapat dibuat panggung terbuka.

Sedangkan di luar benteng, adalah lokasi taman yang terletak di sisi barat dan selatan Museum Benteng Vredenburg. Di bagian barat daya, terdapat Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949. Monumen tersebut menjadi bagian dari taman. Mengingat letaknya yang sangat strategis maka situs monumen Serangan Umum 1 Maret 1949 sering dipergunakan sebagai ajang pentas pertunjukan seperti band, pagelaran wayang, dan sebagainya.

10. Ruang Playground

Ruang playground saat ini masih menempati gedung D lantai 1. Di ruang ini terdapat beberapa koleksi museum yang

keterangannya disembunyikan. Hal ini untuk memancing pendapat pengunjung khususnya bagi anak-anak. Juga tersedia model-model pakaian masa perjuangan yang dapat dikenakan oleh pengunjung khususnya anak-anak. Diharapkan diruang ini apresiasi pengunjung (khususnya anak-anak) tentang nilai-nilai kejuangan, kepahlawanan, kesatuan, nasionalisme, dan patriotisme dapat timbul.

11. Mushola

Mushola menempati bangunan L yang dulu difungsikan sebagai penjara para tawanan Belanda. Terkait dengan keberadaan Mushola ini dilengkapi dengan tempat wudlu. Fasilitas ini disediakan oleh Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta bagi masyarakat pengunjung museum, serta bagi karyawan-karyawati Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta.

12. Kamar Mandi dan Toilet

Kenyamanan, kebersihan, dan keindahan sebuah lokasi tujuan wisata, sering diindikasikan dengan keberadaan toilet dan kamar mandi. Demikian juga di lingkungan Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta yang merupakan sebuah tempat tujuan wisata budaya di Yogyakarta. Kamar mandi dan toilet menjadi fasilitas utama yang perlu diperhatikan. Kamar mandi yang diperuntukkan untuk para pengunjung museum berada di ruang publik, artinya diluar kantor yang sekarang menempati bangunan L1, L2, dan L3 (bekas gedung kamar mandi selatan). Sedangkan untuk karyawan dan karyawati berada di dalam lingkup kantor dan menempati Gedung M4 dan M5 (bekas gedung para perwira remaja).

13. Ruang Penjaga

Ruang penjaga terletak di bangunan B1 lantai bawah, atau bersebelahan dengan ruang penjualan tiket masuk museum. Ruang penjaga diperuntukkan untuk kantor para petugas jaga (Satpam) Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Keberadaanya di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat pengunjung museum, dimaksudkan untuk

memberi kemudahan bagi para pengunjung museum yang memerlukan bantuan dari petugas jaga (Satpam).

14. Ruang PPPK

Ruang PPPK dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi karyawan dan pengunjung Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta yang mengalami gangguan kesehatan ringan. Di ruang ini tersedia obat-obatan ringan yang dapat dimanfaatkan oleh umum secara cuma-cuma. Keberadaan ruang PPPK ini tidak lepas dari misi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta sebagai pelayan masyarakat.

15. Ruang Preparasi/Bengkel

Ruang preparasi / bengkel merupakan ruangan yang disediakan bagi kelompok preparasi dalam rangka persiapan penyelenggaraan pameran atau kegiatan lainnya yang memerlukan sistem display. Di ruang inilah pekerjaan persiapan pembuatan vitrin, dak, voostuk, panel dan properti pameran lainnya dikerjakan. Alat-alat perbengkelan yang diperlukan dalam kegiatan preparasi tersedia di ruang ini, seperti kompresor, raut kayu, gergaji elektrik, sprayer, dan sebagainya. Ruang preparasi / bengkel ini menempati bangunan R, yaitu bangunan yang pada masa Benteng Vredeburg dimanfaatkan oleh Belanda dipergunakan sebagai istal (kandang kuda).

16. Ruang Dokumentasi

Ruang dokumentasi adalah ruangan yang dipergunakan sebagai tempat pengelolaan dokumentasi museum, baik dokumentasi koleksi secara khusus atau dokumentasi museum dan berbagai kegiatan secara umum. Di ruang dokumentasi ini juga tersimpan dokumen-dokumen audio yaitu suara hasil rekaman wawancara tokoh maupun pelaku sejarah, audio visual yaitu hasil rekaman dengan teknik multimedia tentang tokoh, peristiwa, maupun film berlatar belakang sejarah, serta dokumentasi visual berupa foto-foto tokoh dan peristiwa sejarah. Kebanyakan dari dokumen-dokumen tersebut sudah

dilakukan proses digitalisasi sehingga sudah dapat diakses dalam bentuk CD untuk data visual, dan dalam bentuk VCD untuk data audio visual.

17. Tempat Parkir

Satu hal yang penting dan perlu diperhatikan bagi sebuah tempat tujuan wisata, adalah masalah parkir kendaraan pengunjung. Hal ini penting karena parkir kendaraan merupakan salah satu indikasi kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung. Terkait dengan hal tersebut Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta telah mengantisipasi keluhan pengunjung terkait masalah parkir. Tempat parkir bagi pengunjung Museum Benteng Vredeburg terletak di depan pintu gerbang sebelah barat. Tempat ini cukup luas terletak dipinggir jalan Jenderal A. Yani Yogyakarta. Bagi pengunjung museum yang datang secara rombongan dan mengendarai bus ukuran besar dapat langsung parkir tepat di depan pintu masuk Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.

BAB IV

MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA

JENDELA SEJARAH PERJUANGAN BANGSA

Pendirian Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta dilandasi adanya pemikiran tentang proses pewarisan nilai-nilai luhur kejuangan bangsa terhadap generasi muda. Dilihat dari sejarah berdirinya Benteng Vredeburg tampak bahwa keberadaannya terdapat pada empat jaman yaitu jaman penjajahan Belanda, Jaman Penjajahan Inggris, Jaman Penjajahan Jepang, dan Jaman Kemerdekaan. Tiap-tiap jaman mempunyai "roh" yang memberikan "warna" pada jaman itu sendiri.

Pada masa pendudukan Belanda di Yogyakarta, Benteng Vredeburg dimanfaatkan sebagai markas tentara, gudang mesiu, tempat tinggal komandan, penjara, serta barak prajurit. Demikian pula pada masa-masa sesudahnya ketika benteng dikuasai oleh tentara pendudukan Inggris maupun Jepang. Baru setelah masa kemerdekaan pemanfaatan Benteng Vredeburg sedikit mengalami perubahan, yaitu dari fungsinya sebagai markas tentara kemudian berubah menjadi ajang kebudayaan.

Dilihat dari keberadaan Benteng Vredeburg yang telah berdiri tahun 1760 hingga sekarang, tentunya banyak peristiwa besar yang telah melingkupinya. Kita berharap hendaknya Benteng Vredeburg dapat bercerita tentang apa yang terjadi di sekitarnya pada masa lampau. Atau paling tidak, dari Benteng Vredeburg kita dapat melihat peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Dari sinilah Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta berperan sebagai jendela sejarah perjuangan bangsa. Dari Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta kita mencoba melihat peristiwa-peristiwa perjuangan di masa silam, melalui koleksi-koleksi yang disajikannya dalam pameran baik pameran tetap maupun pameran temporer. Disamping itu koleksi bangunan Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta juga dapat dipakai sebagai media perlawatan ke masa silam,

masa kolonial, yaitu melalui pemahaman koleksi bangunan Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta sebagai bangunan bekas benteng Belanda di Yogyakarta.

A. Koleksi Bangunan Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta Media Perlawatan Ke Masa Silam

Koleksi bangunan Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta terdiri dari bangunan-bangunan pokok yang ada di dalamnya ditambah dengan bangunan-bangunan pendukung yang ada di sekitarnya. Sebagai sebuah benteng pertahanan, Benteng Vredeburg semula dilengkapi dengan lapisan-lapisan pertahanan. Yang paling luar adalah open space (daerah terbuka) yang terletak pada lapisan terluar. Lapisan ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan pada para penghuni benteng untuk melakukan perlawanan bagi mereka yang hendak mendekati benteng ketika melewati lapisan tersebut.

Setelah melewati lapisan terluar, lapisan pertahanan selanjutnya adalah parit (jagang) yang berupa kolam berisi air yang relatif dalam dan luas. Periode 1765-1830 parit dibangun mengelilingi benteng. Setelah tahun 1830, parit sebagai sarana pertahanan sudah tidak urgen lagi dan hanya berfungsi sebagai saluran pembuangan saja. Pada tahun 1898 parit sebelah utara benteng mulai ditutup. Pada periode 1945-1977 parit sudah mulai kering dan selanjutnya seluruh parit yang ada ditutup.

Untuk menghubungkan lingkungan luar dan dalam benteng yang dipisahkan oleh parit (jagang), dibuatkan jembatan. Semula jembatan tersebut adalah jembatan angkat, yang bisa diangkat jika sudah memasuki jam malam, dan akan diturunkan lagi ketika waktu jam malam habis. Jembatan hanya terpasang di sebelah barat, timur, dan selatan. Jembatan mulai tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai sarana pertahanan dengan sistem jembatan angkatnya akibat perkembangan teknologi dimana Belanda mulai menggunakan kendaraan berat pendukung kekuatan militernya yang disimpan di Benteng Vredeburg. Saat itu jembatan angkat dirubah menjadi jembatan biasa.

Lapisan pertahanan selanjutnya setelah parit (jagang) adalah tembok benteng. Semula tembok benteng tersebut terbuat dari tanah. Setelah dipugar ke dalam bentuk permanen, tembok benteng dapat menjalankan fungsinya sebagai sarana pertahanan. Tembok benteng dibangun mengelilingi daerah dalam benteng. Di bagian atas tembok benteng terdapat relung-relung untuk menempatkan meriam dan senjata tangan lainnya. Di beberapa tempat, tembok benteng diberi lubang untuk pengintaian.

Di sekeliling tembok benteng bagian dalam diberi anjungan sebagai tempat para pasukan yang bertugas. Semula anjungan dibangun mengelilingi benteng bagian dalam sebagai sarana pertahanan. Di anjungan ini ditempatkan prajurit dengan senjata tangan dan meriam yang dikonsentrasikan pada sudut-sudut anjungan. Tahun 1830, anjungan di sudut timur laut dibongkar dan dibangun gedung Societet. Tahun 1898 anjungan utara dibongkar dan dibuat terowongan untuk mengakses unit service baru di utara benteng. Selanjutnya anjungan tidak punya arti strategi militer dan difungsikan sebagai sarana rekreasi dan kebun sayur. Sekarang anjungan yang masih tersisa adalah di sisi timur sebagian, selatan, dan barat.

Untuk memasuki wilayah dalam benteng, terlebih dahulu melewati pintu gerbang di sebelah barat yang selalu dijaga oleh penjaga. Pintu gerbang utama barat terdiri dari dua lantai. Pada periode 1765 - 1830, lantai atas digunakan sebagai kantor komando. Hal ini sangat memungkinkan karena letaknya relatif tinggi dan mempunyai jarak pandang yang bagus baik ke dalam maupun ke luar benteng. Sedangkan lantai bawah baik di sisi kanan maupun kiri jalan masuk merupakan ruang jaga. Diperkirakan sejak awal mula hingga perkembangan terakhir bangunan ini tetap tidak mengalami perubahan fungsi, yaitu sebagai kantor komando dan ruang jaga. Sekarang ruangan di sebelah selatan pintu gerbang barat difungsikan sebagai tempat penjualan tiket, dan di sisi utara di fungsikan sebagai kantor penjaga (satpam).

Guna memenuhi kebutuhan air di dalam kompleks benteng Vredenburg, diperlukan adanya sumur. Bangunan sumur terletak di

sebelah selatan pintu gerbang barat. Sewaktu terakhir ditemukan, daerah ini difungsikan sebagai kamar mandi dan tempat parkir sepeda. Sekarang bangunan ini dilestarikan sebagaimana mulanya yaitu sebagai sumur.

Dari pintu gerbang, jika dilihat ke utara dan keselatan, akan terlihat bangunan di pojok utara dan di pojok selatan yang bentuknya mirip. Di sebelah utara adalah bangunan yang sekarang difungsikan sebagai (storage) gudang koleksi foto. Bangunan tersebut merupakan bangunan yang relatif baru. Dalam peta tahun 1937 bangunan ini belum muncul, sehingga diperkirakan bangunan ini dibangun bersamaan dengan bangunan kembarannya yaitu bangunan dapur selatan. Bangunan yang ada merupakan bangunan bentuk asli meski relatif baru dan tidak mengalami perubahan. Fungsi semula bangunan tersebut adalah sebagai dapur. Meski demikian pada masa benteng dikuasai oleh TNI maka bangunan dapur ini dimanfaatkan sebagai rumah tinggal prajurit.

Dari pintu gerbang, membujur ke arah utara bangunan berupa ruang-ruang yang berjajar memanjang ke utara dan masing-masing menghadap ke timur. Pada jaman dulu, bangunan ini diperkirakan sebagai bangunan sel/ruang tahanan yang dibangun sesudah tahun 1830 menempel pada anjungan sebelah barat. Dalam perkembangannya bangunan ini tidak begitu banyak mengalami perubahan bentuk sehingga fungsinyapun tidak banyak mengalami perubahan. Adanya peninggian lantai sewaktu ditemukan pada bangunan ini diduga merupakan tempat tidur. Besar kemungkinan pemanfaatan lain selain sebagai ruang tahanan bangunan ini lebih tepat mengarah pada fungsinya sebagai gudang. Sekarang ruang-ruang tersebut dimanfaatkan sebagai ruang PPPK, ruang sekretariat Barahmus (Badan Musyawarah Musea) DIY, dan Mushola.

Bangunan kembar sebelah timurnya dikenal dengan bangunan pengapit, yaitu pengapit utara dan pengapit selatan. Bangunan Pengapit Utara pada mulanya diperkirakan sebagai kantor administrasi di kompleks benteng. Berdasarkan hasil penelitian bentuk asli, bangunan yang ada merupakan bentuk yang asli dengan ornamen-ornamen gaya Yunani masa Renaissance. Hal itu menunjukkan usianya yang relatif lebih tua dibanding dengan bangunan yang lain. Gaya atap yang lancip,

menunjukkan gaya Eropa dengan maksud mengurangi beban salju di musim salju. Ini menunjukkan bahwa arsitekur untuk bangunan ini masih murni gaya Eropa. Sedangkan bangunan pengapit selatan fungsi semula diperkirakan telah mengalami perkembangan. Dilihat dari bentuknya sangat mungkin dimanfaatkan sebagai kantor administrasi. Namun ketika di benteng terdapat tawanan yang berderajat tinggi (tawanan kraton yang berpangkat tinggi) maka ruangan ini dimanfaatkan sebagai sel tahanan khusus. Juga ada kemungkinan ruangan ini dipergunakan sebagai ruang tamu VIP. Hal ini terlihat dari bentuk dan performance ruangnya. Pemanfaatannya sekarang, bahwa pengapit selatan sebagai ruang tamu VIP, dan pengapit utara sebagai ruang kerja pemandu.

Berhimpitan dengan bangunan ruang VIP adalah bangunan barak prajurit sebelah barat. Bangunan tersebut terdiri dari dua lantai. Lantai bawah terdiri satu ruang luas dan empat ruang kecil. Dua ruang kecil di sebelah selatan di lantai bawah diperkirakan merupakan fasilitas barak bagian bawah karena posisinya menyatu dengan ruang lantai bawah. Sedangkan dua ruang kecil di utara diperkirakan sebagai ruang pengawasan perwira jaga, karena ruang-ruang tersebut terpisah dengan barak. Dalam perkembangan selanjutnya fungsi bangunan ini tidak mengalami perubahan. Sekarang bangunan tersebut, lantai atas dipergunakan sebagai ruang pameran temporer dan di lantai bawah dipergunakan sebagai playground atau tempat bermain.

Sedangkan gedung yang berhimpitan dengan bangunan pengapit sebelah utara adalah bangunan yang pada masa lalu dipergunakan sebagai gudang non militer. Pada masa benteng dikuasai TNI bangunan ini dipergunakan sebagai tempat tinggal prajurit. Hal ini diperkuat dengan adanya penambahan kamar mandi dan WC pada bagian paling utara dengan memanfaatkan ruang yang sebelumnya diperkirakan sebagai gudang. Hal ini terjadi mengingat kebutuhan tempat tinggal TNI waktu itu cukup tinggi. Sekarang bangunan tersebut dipergunakan sebagai ruang perpustakaan. Sedangkan kamar mandi dan WC tetap pada fungsinya semula.

Bangunan yang saling berhadapan setelah bangunan pengapit adalah bangunan yang dulunya dipergunakan sebagai perumahan perwira utara II dan perumahan perwira selatan I. Perumahan perwira utara II diperkirakan pada mulanya berfungsi sebagai mess/tempat para perwira muda. Selanjutnya karena adanya kebutuhan tempat tinggal bagi komandan yang memerlukan fasilitas lengkap maka bangunan ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, sehingga pada tahap kedua bangunan ini berfungsi sebagai rumah komandan. Selanjutnya bangunan ini diubah menjadi bentuk kopel, sehingga diperkirakan bangunan ini dalam tahap berikut difungsikan sebagai tempat para perwira tinggi pasukan di lingkungan benteng. Sekarang bangunan ini difungsikan sebagai ruang pameran tetap minirama II.

Sedangkan bangunan perwira selatan I, berdasarkan analisa bentuk asli bangunan, mempunyai susunan ruang yang terdiri dari teras depan, bangunan utama, dan teras belakang. Berdasarkan struktur bangunan diperkirakan berfungsi sebagai perumahan perwira. Dengan adanya perubahan teras depan menjadi ruang depan, menunjukkan indikasi bangunan difungsikan sebagai perumahan prajurit atau perwira yang dengan keluarganya, bukan untuk perwira saja. Ini terjadi ketika benteng dimanfaatkan oleh TNI AD. Sekarang bangunan ini difungsikan sebagai ruang pameran tetap minirama I.

Sebelah utara bangunan perumahan perwira utara II adalah perumahan perwira utara I. Berdasarkan analisa dari bentuk bangunan asli diperkirakan bangunan ini semula mempunyai fungsi sebagai tempat tinggal perwira. Dengan adanya perubahan bentuk teras depan menjadi ruang depan maka diperkirakan bangunan ini telah mengalami perubahan fungsi yaitu sebagai kantor administrasi. Kemudian ketika benteng digunakan oleh TNI bangunan ini digunakan sebagai tempat tinggal prajurit yang telah berkeluarga. Hal itu sangat mungkin mengingat kebutuhan akan tempat tinggal TNI waktu itu cukup besar. Saat ini bangunan tersebut difungsikan sebagai ruang pameran temporer di lantai dua, dan untuk ruang pameran tetap minirama III untuk lantai satu.

Di bagian timur bangunan perumahan perwira selatan I berhimpitan dengan perumahan perwira selatan II. Berdasarkan analisa bentuk asli bangunan perumahan perwira selatan II, diperkirakan semula berfungsi sebagai asrama Perwira Remaja. Hal itu dikuatkan dengan diketemukan adanya ruang-ruang lapang. Kemudian pada perkembangan selanjutnya dengan tingkat *privasi* yang lebih tinggi maka bangunan ini diduga difungsikan sebagai perumahan perwira tinggi dan menengah. Adanya penambahan ruang dan penembusan dinding, diperkirakan perkembangan fungsi bangunan ini adalah sebagai sarana prajurit. Kini bangunan ini difungsikan sebagai ruang kantor tata usaha.

Disamping bangunan-bangunan yang diperuntukkan sebagai barak prajurit maupun perwira, di dalam kompleks benteng Vredenburg terdapat bangunan yang berkedudukan sebagai fasilitas umum. Bangunan tersebut terletak di sebelah selatan bangunan barak perwira II. Berdasarkan analisa bentuk fisik aslinya, bangunan ini bukan merupakan tempat tinggal, tetapi lebih mengarah pada bangunan fasilitas umum. Berdasarkan data bahwa di dalam benteng pernah dibangun rumah sakit, maka bangunan ini diperkirakan sebagai rumah sakit. Ketika benteng dikuasai oleh TNI bangunan ini dimanfaatkan sebagai mushola. Meski fungsi yang sebenarnya masih memerlukan penelitian lebih mendalam namun yang jelas bangunan ini bukan sebagai tempat tinggal melainkan sebagai fasilitas umum.

Di sebelah selatan bangunan fasilitas umum, terdapat kamar mandi. Bangunan ini merupakan bangunan kamar mandi selatan, terdiri dari dua unit yaitu unit satu sebelah timur dan unit dua sebelah barat. Namun menurut peta tahun 1937 bahwa unit dua yaitu sebelah barat belum tercantum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bangunan tersebut relatif baru. Unit satu terdapat 4 kamar mandi dan unit dua terdapat 4 kamar mandi. Dari bentuk bangunan diperkirakan tidak banyak mengalami perubahan sehingga dari segi fungsi juga diperkirakan masih tetap sama yaitu sebagai kamar mandi. Sekarang bangunan tersebut difungsikan tetap seperti semula yaitu sebagai kamar mandi.

Deretan bangunan yang terletak di sebelah barat tembok benteng



Pintu Gerbang Benteng Vredeburg
Sebelum Dipugar



Bangunan M3 (Bekas Barak Perwira I)
Sebelum Dipugar



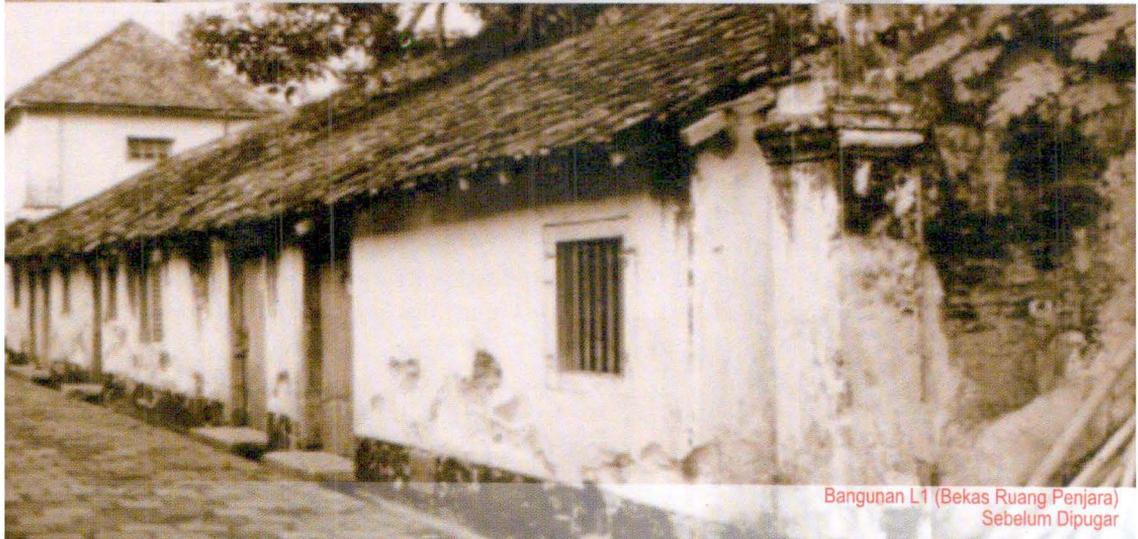
Bangunan D (Bekas Barak Prajurit Barat)
Sebelum Dipugar



Bangunan N (Bekas Gudang Senjata)
Sebelum Dipugar



Bangunan C (Bekas Ruang Tamu VIP)
Sebelum Dipugar



Bangunan L1 (Bekas Ruang Penjara)
Sebelum Dipugar

yang membujur ke utara selatan jika disebutkan urut dari yang paling utara adalah bangunan *societeit militaire*, pavilion, bangunan utama/bangunan VIP, gudang senjata, gudang mesiu, dan istal (kandang kuda).

Bangunan *societeit militaire*, sekarang difungsikan sebagai ruang seminar (auditorium) untuk lantai 2, dan ruang pameran tetap minirama IV di lantai 1. Fungsi terakhir berdasarkan hasil penelitian, bangunan ini dimanfaatkan sebagai gedung pertemuan. Hal ini diperkuat adanya data bahwa tahun 1838 di dalam kompleks benteng pernah ada *societet militaire* yang mempunyai lokasi di timur laut. Namun bangunan ini diperkirakan juga pernah difungsikan sebagai tempat tinggal di lantai 1 atau juga di lantai 2. Hal ini terjadi pada masa benteng dipergunakan oleh TNI. Tetapi tahun berikutnya dikembalikan ke fungsi semula yaitu sarana fasilitas umum dan bukan tempat tinggal.

Di sebelah selatan bangunan *societeit militaire* adalah gedung pavilion. Berdasarkan pada bentuk bangunan yang masih asli, bangunan pavilion semula berfungsi sebagai tempat tinggal (perumahan) perwira atau pavilion (guest house). Hal itu didukung oleh adanya fasilitas pelengkap seperti dapur, kamar mandi dan WC. Pada masa benteng dipergunakan oleh TNI besar kemungkinan bangunan ini dimanfaatkan sebagai tempat tinggal prajurit maupun perwira. Sekarang bangunan tersebut dimanfaatkan sebagai penginapan, salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta guna melayani tamu-tamu dinas.

Sewaktu Benteng masih dalam kondisi utuh, terdapat satu bangunan utama yang terletak di tengah-tengah antara pavilion dan gudang senjata. Sekarang bangunan tersebut sudah tidak ada, dan tempat berdirinya sekarang berupa tanah lapang (open state) yang sering dimanfaatkan sebagai panggung terbuka bagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam kompleks Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Berdasarkan pondasi yang ditemukan, diperkirakan bangunan yang ada pada tempat tersebut berkarakter megah dan besar. Bangunan yang ada diperkirakan sebagai gedung agung atau bangunan

pokok dan utama tempat tamu agung seperti gubernur jenderal, residen, atau tamu agung lainnya di terima. Hal itu dapat dianalogikan dengan kondisi benteng yang membujur dari barat ke timur. Dalam peta tahun 1830 bangunan tersebut masih terlihat kokoh dan juga masih terekam dengan baik pada foto udara tahun 1930.

Berada di sebelah selatan bangunan utama, terdapat bangunan yang terdiri dari dua lantai. Semula bangunan ini dimanfaatkan sebagai barak prajurit dan gudang senjata. Berdasarkan analisa dari bentuk asli, diperkirakan bangunan ini semula difungsikan sebagai barak prajurit. Hal ini dikuatkan bahwa pada bangunan ini terdapat jendela dan pintu. Namun juga sangat besar kemungkinan berfungsi sebagai tempat penyimpanan senjata ringan di lantai bawah dan barak prajurit di lantai atas. Hal ini dikuatkan dengan letaknya yang berdekatan dengan bangunan di sebelah selatannya yang berdiri berhimpitan dengan bangunan ini. Bangunan tersebut berfungsi sebagai gudang senjata berat. Di samping itu juga berdekatan dengan gudang mesiu yang terletak di sebelah selatannya. Sekarang bangunan ini difungsikan sebagai ruang rias pendukung panggung terbuka di sebelah utaranya di lantai 1, dan ruang sekretariat kegiatan yang diadakan oleh masyarakat (pengguna) museum dalam kegiatan-kegiatan tertentu di lantai 2.

Berhimpitan dengan gedung ini adalah gedung yang sekarang dimanfaatkan sebagai ruang fumigasi, kamar gelap, dan ruang karantina koleksi. Semula bangunan ini difungsikan sebagai gudang senjata. Berdasarkan analisa dari bentuk asli bangunan, besar kemungkinan bangunan ini berfungsi sebagai gudang senjata. Jika hal itu didasarkan pada letaknya yang sangat berdekatan dengan bangunan di sampingnya yaitu gudang senjata ringan dan gudang mesiu, hal ini sangat beralasan sekali. Sedangkan keberadaan ruang-ruang yang berdekatan diperkirakan mempunyai fungsi yang berkaitan dengan keberadaan gudang senjata ini, antara lain untuk perkantoran bagian administrasi gudang, perawatan senjata, dll.

Berdekatan dengan gedung-gedung tersebut, di sebelah selatannya berdiri bangunan yang dulu difungsikan sebagai gudang mesiu.

Berdasarkan hasil penelitian bangunan tersebut tidak mengalami banyak perubahan bentuk. Sehingga sangat dimungkinkan bahwa bangunan tersebut juga tidak mengalami perubahan fungsi. Karakteristik bangunan yang dilengkapi dengan adanya peninggian lantai dan tanpa jendela tetapi hanya ventilasi saja, menguatkan dugaan bahwa fungsi bangunan ini adalah sebagai gudang mesiu. Fungsi ini tetap bertahan dari tahun ke tahun meskipun benteng mengalami pergantian penguasa dari Belanda, Inggris, Jepang, dan TNI. Sekarang bangunan ini difungsikan sebagai gudang koleksi (storage).

Disamping bangunan-bangunan yang berdiri di tengah tanpa menempel pada tembok benteng bagian anjungan, terdapat bangunan-bangunan yang menempel pada tembok anjungan. Salah satunya adalah kamar mandi timur. Bangunan ini ketika diketemukan terdiri dari tiga unit. Diperkirakan bahwa unit satu (berada di bawah dan menempel di anjungan) merupakan bangunan pokok yang telah berubah. Sedang unit dua dan tiga merupakan bangunan asli meskipun tergolong baru. Meski demikian bangunan unit dua dan tiga dalam peta tahun 1937 sudah ada sehingga termasuk bangunan tua. Diperkirakan bangunan yang mempunyai fungsi penting adalah unit satu yaitu sebagai pos pengintaian yang dilengkapi dengan lubang-lubang penembakan. Sekarang bangunan tersebut sebagian sudah tidak ada, dan yang masih ada difungsikan sebagai gudang dan tempat generator pompa hidran.

Sebelah selatan gudang senjata, adalah bangunan yang dipergunakan sebagai istal (kandang kuda). Penyebutan ini didasarkan pada analisa bahwa berdasarkan sisa-sisa reruntuhan berupa tempat makanan kuda maka bangunan ini besar kemungkinan pada mulanya berfungsi sebagai istal (kandang kuda). Hal ini dikuatkan dengan letak bangunan yang sangat berdekatan dengan sarana pertempuran yaitu gudang mesiu dan gudang senjata. Dengan adanya meja-meja beton di bagian barat, bangunan ini diperkirakan sebagai dapur. Sedangkan ruang-ruang lain yang berdekatan diperkirakan berfungsi sebagai tempat tinggal juru masak, dan gudang makanan. Sekarang kesatuan bangunan ini difungsikan sebagai ruang bengkel preparasi, parkir kendaraan dinas,

dan parkir kendaraan karyawan Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.

Dengan melihat bangunan-bangunan di dalam kompleks Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, imajinasi kita terbawa dalam sebuah perlawatan, yaitu perlawatan kemasa silam. Informasi sejarah yang berhasil dimunculkan dari gedung-gedung peninggalan jaman kolonial Belanda tersebut memberikan gambaran kepada pengunjung akan adanya sebuah komunitas yang mewakili jaman tertentu (jaman kolonial) yang pernah eksis di dalam komplek Benteng Vredeburg.

B. Ruang Pameran Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta sebagai Album Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian, tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya. Perjuangan para tokoh lokal kedaerahan dan kaum pergerakan nasional cukup besar dalam hal ini. Perjuangan yang dilakukan oleh para pendiri negara tersebut meninggalkan jejak, yaitu jejak-jejak sejarah perjuangan. Jejak-jejak sejarah perjuangan mereka ada yang sampai kepada kita berupa benda-benda bernilai sejarah dan berupa informasi peristiwa sejarah yang diperoleh dengan cara wawancara tanpa memperoleh bukti materialnya.

Perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang bangsa, adalah untuk mencapai perubahan, sesuai dengan jiwa jamannya. Pada jaman penjajahan, perjuangan yang dilakukan para pendahulu dan pendiri negara adalah sebuah proses mencapai perubahan, perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka.

Koleksi museum lengkap dengan informasi yang menyertainya, merupakan suatu bukti material terjadinya peristiwa bersejarah. Dengan menikmati koleksi museum lengkap dengan pemahaman informasi yang menyertainya, berarti pengunjung telah membuka lembaran album sejarah perjuangan bangsa. Koleksi-koleksi museum yang dipamerkan untuk umum, dapat dipandang sebagai lembar demi lembar album

sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Diharapkan hal tersebut dapat memancing munculnya apresiasi masyarakat terhadap perjuangan yang dilakukan oleh para pendiri negara Indonesia. Dengan menyerap informasi dari koleksi materi pameran di Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta serta memberinya makna baru, pengunjung mampu mengambil hikmahnya, kemudian dapat memproyeksikannya pada tindakan positif guna menyongsong masa depan. Inilah pentingnya memahami pola pikir sejarah dengan memandang sejarah sebagai peristiwa dalam kesatuan tiga dimensi waktu yaitu lampau (*past*), sekarang (*present*) dan akan datang (*future*). Artinya, memandang peristiwa masa lampau dengan pemaknaan baru dalam konsep kekinian guna menyongsong masa depan.

1. Pameran Tetap Minirama I

Di dalam ruang pameran tetap minirama I terdapat 11 (sebelas) buah visualisasi peristiwa bersejarah di Yogyakarta sejak berakhirnya Perang Diponegoro tahun 1830 sampai dengan masa pendudukan Jepang di Yogyakarta tahun 1942 dalam bentuk minirama. Garis besar alur cerita dalam ruang tata pameran ini adalah sebagai berikut:

Pangeran Diponegoro adalah seorang bangsawan istana Kasultanan Yogyakarta yang mengobarkan perang melawan Belanda (*Kompeni*) sejak tanggal 20 Juli 1825. Perlawanan baru berhenti setelah beliau tertangkap dalam tipu daya Belanda di sebuah perundingan yang diadakan di Karesidenan Kedu Magelang tanggal 28 Maret 1830.

Perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda disebabkan antara lain oleh sifat Belanda yang selalu turut campur dalam masalah intern kasultanan Yogyakarta seperti pergantian raja, perubahan tata upacara maupun pengangkatan pejabat kasultanan. Juga diangkatnya beberapa orang sebagai penarik pajak pacumpleng (pajak rumah atau pintu) serta penyewaan tanah secara besar-besaran oleh Belanda. Disamping itu ada sebab khusus

yang memicu kemarahan Pangeran Diponegoro antara lain pengangkatan Beliau sebagai anggota dewan penasihat mendampingi Sultan HB V yang tanpa ijin lebih dulu, serta adanya usaha pembuatan jalan raya yang menerjang tanah leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalreja.

Perang berkobar sampai ke wilayah Pacitan, Purwodadi, Banyumas, Pekalongan, Semarang dan Madura. Karena pengaruhnya yang hampir meliputi seluruh Jawa maka perang tersebut dikenal dengan Perang Jawa (De Java-oorlog). Akibat perang tersebut kas negeri Belanda telah berkurang sebanyak 20 juta gulden dan kehilangan serdadu sebanyak 800 orang. Sedang pasukan Pangeran Diponegoro kehilangan 7.000 orang.

Tindakan Belanda dengan mengerahkan militernya untuk menangkap Pangeran Diponegoro selalu mendapat perlawanan sengit dari para pengikut Pangeran Diponegoro. Dalam kefrustasian, Belanda merencanakan siasat licik untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Jenderal De Kock mengutus Letkol Cleerens menjumpai Pangeran Diponegoro di Desa Crema untuk diajak berunding di Magelang. Jika perundingan gagal, Pangeran Diponegoro dan pengikutnya tidak ditangkap. Pada tanggal 18 Maret 1830 (bertepatan bulan Ramadhan), dengan didampingi oleh Pangeran Diponegoro Muda (Dipokusumo), Raden Mas Jonet, Raden Mas Roub, Raden Basah Mertonegoro dan Kyai Badarudin, Pangeran Diponegoro tiba di Magelang. Kepada Jenderal De Kock, Pangeran Diponegoro minta agar perundingan diundur setelah Idul Fitri (27 Maret 1830) dan disetujui tanggal 28 Maret 1830.

Belanda mulai bertindak licik. Tanggal 25 Maret 1830 Jenderal De Kock mengirim surat kepada Letnan Du Perro agar disiapkan pasukan untuk mengepung tempat perundingan. Jika perundingan gagal pasukan diperintahkan menangkap Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya.

Pada tanggal 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Diponegoro Muda (Dipokusumo), Raden Mas Jonet,

Raden mas Roub, Raden Basah Mertonegoro dan Kyai Badarudin mengadakan perundingan dengan Jenderal De Kock yang didampingi oleh Residen Valck, Letnan Roest, Mayor de Stuers, dan Kapten Roefs sebagai juru bahasa. Pangeran Diponegoro menuntut didirikannya negara merdeka yang bersih dari penjajahan dan bersendikan agama Islam. Tuntutan ditolak oleh Jenderal De Kock dan perundingan gagal. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado tanggal 3 Mei 1830. Tahun 1834 dipindahkan ke Ujung Pandang hingga wafat 8 Januari 1855.

Untuk memperbaiki kas negerinya, Belanda menerapkan sistem Tanam Paksa (*Cultuur Stelsel*). Ternyata sistem eksploitasi rakyat bumi putera yang diusulkan Gubernur Jenderal Johanes Van Den Bosch ini sangat hebat. Dari tahun 1831 hingga 1877 perbendaharaan kerajaan Belanda telah menerima uang sebanyak 832 juta gulden. Sebelum tahun 1850 kiriman uang ke negeri Belanda telah mencapai sekitar 19 persen dari pendapatan negara Belanda, dan pada tahun 1851 - 1860 mencapai kira-kira 32 persen. Hal ini mampu mengangkat kondisi Belanda antara lain terlunasinya hutang-hutang, diturunkannya pembayaran pajak-pajak, berkembangnya pembangunan dalam negeri Belanda yang meliputi kubu-kubu pertahanan, terusan-terusan, dan jalan kereta api. Amsterdam menjadi pasar dunia yang penting bagi hasil bumi daerah tropis, khususnya kopi dan gula.

Sementara itu terjadi gejolak di kalangan para pendukung haluan etika. Mereka antara lain Douwes Dekker dan Baron Van Hoovel. Kedua tokoh ini mengutuk keras praktek tanam paksa di Nusantara. Selanjutnya tahun 1899, Van Deventer dalam artikelnya yang terbit di majalah "De Gids" yang berjudul "Een Ereschuld" (hutang budi) menyatakan bahwa negeri Belanda mempunyai hutang budi kepada kaum bumi putera di Nusantara. Menanggapi hal itu, pada tahun 1901 Ratu Wilhelmina meresmikan diberlakukannya Politik Ethis. Adapun prinsip yang menjadi dasar gagasan baru tersebut adalah *educatie* (pendidikan), *emigratie*

(perpindahan penduduk), dan *irrigatie* (pengairan).

Meski politik tersebut dapat diartikan seperti sarung tangan sutera yang membungkus pemerintahan tangan besi Belanda yang sama saja mencekik kehidupan rakyat bumiputera, namun sedikit banyak telah memberikan secercah cahaya dalam perjuangan. Kelompok elite baru kaum terpelajar di Jawa lahir. Dari golongan inilah lahir organisasi Budi Utomo di Jakarta. Organisasi tersebut didirikan oleh para pelajar STOVIA pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya organisasi ini tidak dapat dilepaskan dari usaha Dr. Wahidin Soedirohoesodo dengan program studiefondnya. Sesampainya di STOVIA, apa yang diprogramkan oleh Dr. Wahidin Soedirohoesodo mendapat sambutan positif oleh Soetomo dan kawan-kawan, hingga akhirnya berdirilah organisasi modern yang pertama tersebut dengan nama Boedi Oetomo (Budi Utomo). Susunan pengurus yang pertama organisasi ini adalah : R. Soetomo (ketua), M. Soelaiman (wakil ketua), Soewarno (sekretaris I), M. Goenawan (sekretaris II), R. Angka (bendahara). Sedangkan anggota komisaris terdiri dari M. Soewarno, M. Muhammad Saleh, M. Soeradji, dan M. Goembrek.

Meskipun berdiri di Jakarta, namun kongres pertamanya dilaksanakan di Ruang Makan Kweekschool Yogyakarta (sekarang SMA 11, Jl. AM. Sangaji Yogyakarta). Kongres berlangsung tanggal 3 s.d. 5 Oktober 1908 dibawah pimpinan Dr. Wahidin Soedirohoesodo. Kongres tersebut berhasil memutuskan antara lain : *pertama*, mengusahakan kemajuan bangsa, terutama dengan memajukan pengajaran, pertanian peternakan, perdagangan, teknik, industri dan kebudayaan. *Kedua*, menetapkan ketua pengurus besar yang pertama yaitu RTA. Tirta Koesoemo (Bupati Karang Anyar) dan wakilnya Dr. Wahidin Soedirohoesodo. Juga dibentuknya pengurus besar. *Ketiga*, menetapkan Yogyakarta sebagai pusat perkumpulan Budi Utomo.

Sejalan dengan perkembangan Budi Utomo, para pemuda Indonesia di Belanda mendirikan organisasi yang bernama

Indische Vereeniging pada tahun 1908. Organisasi ini selanjutnya berubah menjadi Indonesische Vereeniging, dan kemudian menjadi Perhimpunan Indonesia. Dari para pemuda yang belajar di Belanda inilah haluan politik organisasi pergerakan di Indonesia bermula, sehingga muncullah organisasi-organisasi pergerakan yang berhaluan politik, antara lain Sarekat Islam yang didirikan oleh H. Samanhudi tahun 1912 di Solo. Semula organisasi ini bernama SDI (Sarekat Dagang Islam). Organisasi lain yang berhaluan politik adalah IP (Indiscek Partij) yang didirikan oleh tiga serangkai yaitu Dr. Ciptomangun Kusumo, Douwes Dekker, dan Ki Hadjar Dewantara di Bandung tanggal 25 Desember 1912.

Sementara itu di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 organisasi keagamaan "Muhammadiyah" didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan. Berdirinya organisasi ini dilatarbelakangi oleh kehidupan beragama umat Islam di Indonesia sampai akhir abad XIX yang sangat memprihatinkan. Amalan agama Islam banyak menyimpang dari Al Quran dan As Sunnah. Praktek-praktek khurofat (takhayul), Bid'ah (menambah ibadah) dan syirik (menyekutukan Tuhan), banyak dicampur aduk dalam pengamalan Islam. Di samping itu kehidupan pendidikan dan sosial dalam masyarakat Islam belum mengalami pencerahan, akibat adanya perlakuan diskriminasi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Keadaan itu mendorong Kyai Haji Ahmad Dahlan mengadakan Tadjid (reformasi), yaitu pembaharuan pengamalan Islam di Indonesia, yang dikembalikan kepada kemurnian sumber aslinya (Al Quran dan As Sunnah).

Upaya mengadakan tajdid diwujudkan dengan organisasi yang bernama Muhammadiyah. Muhammadiyah resmi berdiri tanggal 18 November 1912, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1330 H di Kauman Yogyakarta. Pada awal berdirinya Muhammadiyah didukung oleh para ulama antara lain KH. Abdullah Siraj, KH. Ahmad, KH. Abdurrahman, KH. R. Syarkowi, KH. Muhammad, KH. R. Jaelani, KH. Anies dan KH. R. Fekih.

Sebagai ketua adalah KH. Ahmad Dahlan dan sekretarisnya KH. Abdullah Siraj.

Berdirinya organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari adanya pengaruh luar, yaitu ketika gerakan reformisme dan modernisme muncul pada abad XX di negara-negara Islam Asia Barat. Gerakan ini berpusat di Universitas Al Azhar di Kairo Mesir di bawah pimpinan Jamaluddin al Afghani. Gerakan ini sampai ke Indonesia berkat para tokoh Islam antara lain Muhammad Iqbal dan Amir Ali. Reformasi yang dilakukan Muhammadiyah bersifat nasionalistis yang percaya pada kemajuan dan pengetahuan. Karena itu gerakan ini lebih menghargai hidup dengan rajin bekerja dari pada hidup dengan konsep fatalistis yaitu dengan bertapa serta tindakan yang tidak rasional. Kaum reformis menghendaki agama Islam bersih dari bid'ah. Kembali kepada Qur'an merupakan semboyannya, serta penghayatan pribadi lebih diutamakan daripada seremoni yang sudah menjadi kebiasaan. Di Indonesia reformisme dilakukan oleh sekelompok masyarakat Arab Hadramaut dan orang Muslim India.

Akibat Perang Dunia Pertama, situasi ekonomi di Eropa semakin buruk, yang ditandai dengan merosotnya produksi barang-barang pokok. Sementara itu Hindia Belanda sangat tergantung pada impor berbagai barang kebutuhan pokok dari Eropa. Oleh karena itu harga barang import menjadi mahal, sedangkan kenaikan upah buruh khususnya buruh bumiputera tidak sesuai dengan kenaikan harga-harga tersebut. Suasana kehidupan rakyat baik para petani maupun kaum buruh sangat buruk dan menyedihkan. Uang pajak yang telah ditarik dari rakyat ternyata tetap berhenti di tangan petugas. Rakyat tidak pernah menikmati hasil pajak. Pendidikan kurang diperhatikan bahkan kesempatan masuk sekolah sangat terbatas.

Dipihak lain kaum pengusaha menikmati keuntungan yang begitu besar. Menurut R.M. Suryopranoto pada saat itu seorang



Minirama 2 Di Ruang Minirama
R. Soetomo menyampaikan gagasannya dalam Kongres Pertama Budi Utomo di Yogyakarta



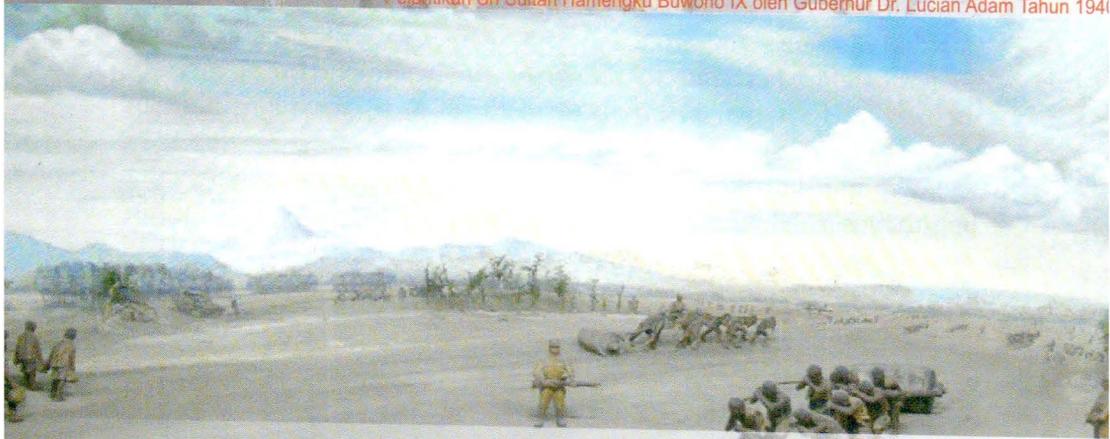
Minirama 5 Di Ruang Minirama I
Ki Hadjar Dewantara Menyatakan Berdirinya Tamansiswa Tahun 1922



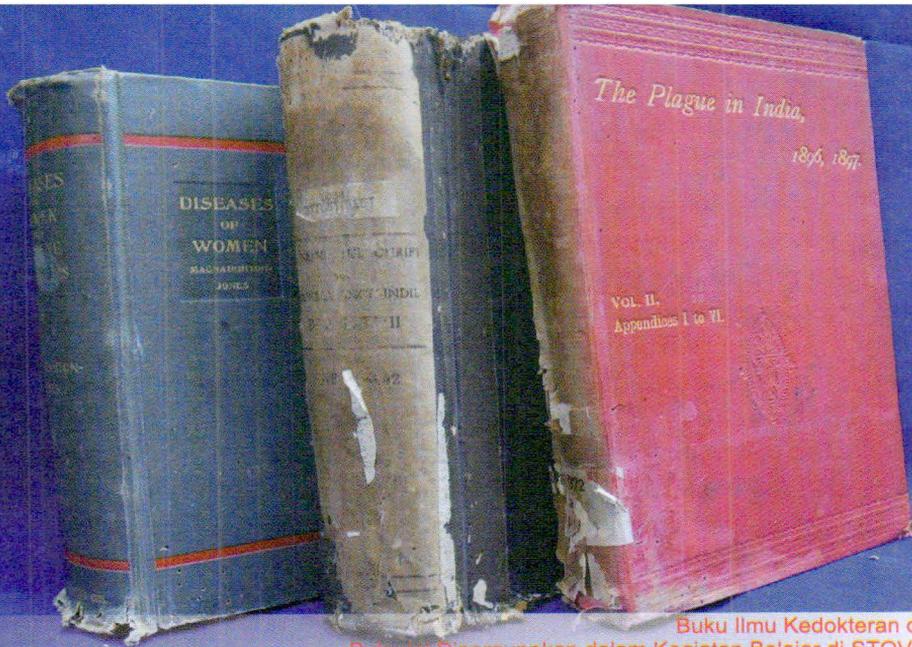
Minirama 4 Di Ruang Minirama
Aksi Pemogokan Buruh Pabrik Gula di Yogyakarta Tahun 1941



Minirama 8 Di Ruang Minirama
Pelantikan Sri Sultan Hamengku Buwono IX oleh Gubernur Dr. Lucian Adam Tahun 1941



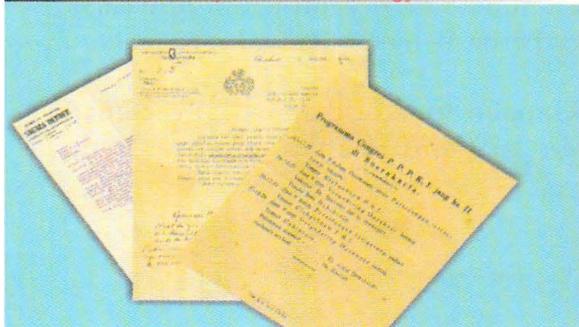
Minirama 11 Di Ruang Minirama
Penderitaan Rakyat Wonosari Pada Masa Pendudukan Jepang Di Yogyakarta Tahun 1942 - 1945



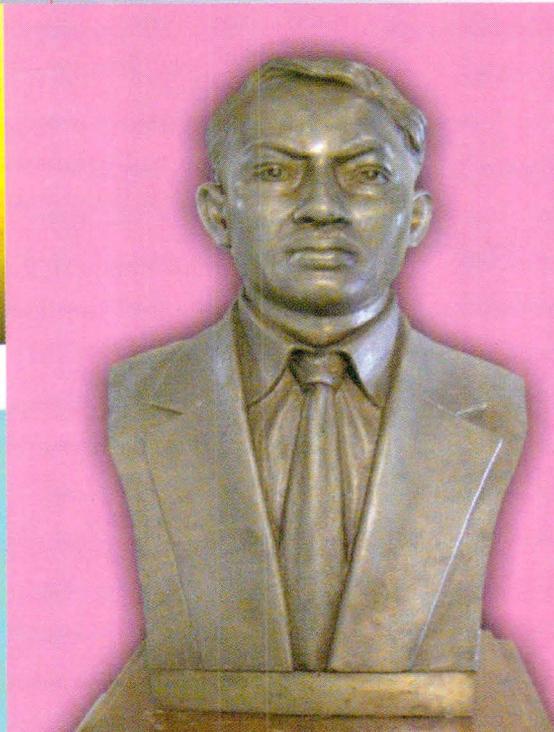
Buku Ilmu Kedokteran di STOVIA
Buku ini Dipergunakan dalam Kegiatan Belajar di STOVIA Jakarta
Tempat R. Soetomo dan Kawan Meraih Gelar Dokter



Mesin Ketik Milik RM. Soeryopranoto
Mesin Ketik dipergunakan Oleh RM. Soeryopranoto
Sewaktu Menjabat Ketua SI Yogyakarta dan PFB



Dokumen Milik R. Soetomo
Dokumen Tersebut Merupakan Sumber Sejarah Perjuangan
Soetomo Sejak Berdirinya Budi Utomo hingga Tahun 1940-an



R. Soetomo
R. Soetomo Merupakan Salah Seorang Pendiri Budi Utomo
Organisasi Pergerakan Nasional Modern Pertama di Indonesia

berketurunan ningrat saja yang mempunyai kesempatan belajar lebih banyak. Pendidikan masih berorientasi pada kepentingan bangsa barat. Kepincangan ini menjadi tantangan bagi kaum pergerakan untuk menciptakan iklim baru dalam dunia pendidikan yang berdasarkan pada kebudayaan dan kepentingan rakyat bumiputera. Kondisi ini memancing para pemikir untuk mencari cara baru untuk dapat mengentaskan penderitaan rakyat bumiputera. "Perkumpulan Selasa Kliwon", yaitu sebuah forum untuk membicarakan masalah nasib bangsa Indonesia dibentuk di Yogyakarta. Forum ini beranggotakan antara lain RM. Soetatmo Soerjokoesoemo, RM. Soerjopoetro, BRM. Soebono, Ki Pronowidigdo, RM. Soewardi Soerjoningrat (Ki Hadjar Dewantara), Ki Ageng Soerjo Mataram, Ki Soetopo Wonoboyo dan RM. Gondo Atmodjo.

Dari beberapa pertemuan, mereka berhasil membangun niat untuk membangun jiwa merdeka Bangsa Indonesia. Oleh karenanya dilanjutkan dengan pembagian tugas sebagai berikut :

- a. RM. Soewardi Soerjoningrat (Ki Hadjar Dewantara) bertugas dalam masalah pendidikan anak.
- b. Ki Ageng Soerjo Mataram bertugas menggarap jiwa merdeka bagi orang dewasa. Media ajarannya terkenal dengan "Kawruh Begja".
- c. RM. Suryopranoto (kakak Ki Hadjar Dewantara) seorang tokoh SI dan pemimpin Adidharma bertugas mematangkan pikiran kaum buruh.

Selanjutnya RM. Soewardi Soerjoningrat pada tanggal 3 Juli 1922 mendirikan National Onderwijs Instituut Tamansiswa di Tanjung Weg 32 (sekarang Jl. Gajah Mada 32 Yogyakarta). Sistem pendidikannya yang terkenal adalah Sistem Among yang mendasarkan pada dua landasan pokok yaitu : *Pertama*, Kemerdekaan sebagai syarat menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir-batin, sehingga dapat hidup berdiri sendiri. *Kedua*, Kodrat alam sebagai syarat menghidupkan dan mencapai

kemajuan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya.

Pada tanggal 6 Januari 1923 di dalam National Instituut Tamansiswa dibentuk majelis yang disebut "*Instituutraad*" yang bertugas memperlancar jalannya pendidikan. Dalam konferensi di Yogyakarta tanggal 20-22 Oktober 1923, perguruan ini memperluas *Instituut* menjadi *Hoofdraat* (majelis luhur), yang diketuai oleh RM. Soetatmo Soeryokoesoemo

Pada tahun 1930 nama *National Onderwijs Instituut Tamansiswa* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Perguruan Nasional Tamansiswa. Semboyan Tamansiswa selanjutnya menjadi lambang pendidikan di Indonesia yaitu : *Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani*. Atau sering disingkat Tut Wuri Handayani saja. Yang artinya kurang lebih sebagai berikut : "dapat memberi contoh, dapat memberi semangat, mampu memberikan dorongan atau motivasi".

Bayi nasionalisme yang dibidani Budi Utomo tahun 1908, melalui pendidikan tumbuh berkembang dan puncaknya terjadi kristalisasi pada Kongres Pemuda II yang berlangsung tanggal 27 s.d. 28 Oktober 1928. Hasil terpenting kongres tersebut adalah keluarnya satu pernyataan dari organisasi-organisasi pemuda kedaerahan yang mengakui bangsa, tanah air, dan bahasa yang satu yaitu Indonesia. Pernyataan tersebut terkenal dengan "Sumpah Pemuda".

Munculnya Sumpah Pemuda, segera ditindaklanjuti dengan adanya kesediaan organisasi-organisasi pemuda kedaerahan melebur dalam satu wadah yaitu Indonesia Muda. Di ndalem Joyodipuran Jalan Kintelan 139 (sekarang Jln. Brigjen Katamso 39) diselenggarakan Kongres Jong Java ke XI. Kongres tersebut sebagai langkah nyata Jong Java terkait lahirnya Sumpah Pemuda. Kongres berlangsung tanggal 25 s.d. 31 Desember 1928. Diputuskan dalam kongres tersebut Jong Java menyetujui dan menyambut baik adanya rancangan mengadakan fusi dengan organisasi lain. Dalam kongresnya di Semarang tanggal 23 s.d. 31 Desember 1929

rancangan organisasi pendirian badan fusi baru (Indonesia Muda) diterima baik, selanjutnya diambil keputusan pembubaran organisasi Jong Java. Para pemimpin kongres Jong Java XI di Yogyakarta antara lain : Mr. HR. Soerjadi (Sekretaris) dan Poerbopranoto (Ketua).

Kaum wanita tidak ketinggalan pula. Pengaruh Kongres Pemuda II di Jakarta, memberikan inspirasi bagi kaum wanita untuk mengadakan kongres. Kongres Perempuan Indonesia Pertama dilaksanakan di Yogyakarta di nDalem Joyodipuran, tempat diselenggarakannya kongres Jong Java XI. Kongres berlangsung pada tanggal 22 s.d. 25 Desember 1928 dan dipimpin oleh Ny. Soekonto dari organisasi Wanita Utomo.

Kongres dihadiri oleh kurang lebih 1000 orang wakil 30 organisasi wanita. Diantaranya Wanita Utomo, Aisyiah, Wanita Tamansiswa, Poetri Indonesia, Jong Islamieten Bond Dames Afdeling, Meisjeskring, dan Wanita Katholik. Organisasi pergerakan yang lain yang juga hadir antara lain Budi Utomo, PNI, Partai Syarikat Islam dan Muhammadiyah.

Kongres Perempuan Indonesia I ini diprakarsai oleh Ny. Sukonto (dari Wanita Utomo), Nyi Hadjar Dewantara (dari Wanita Tamansiswa) dan Nn. Sujatin (dari Putri Indonesia) dan didukung oleh tujuh organisasi wanita antara lain Wanita Utomo, Wanita Tamansiswa, Putri Indonesia, Wanita Katholik, Jong Java bagian gadis-gadis (Meisjeskring), Aisyiah dan JIBDA (Jong Islamietend Bond Dames Afdeling). Kongres berhasil memutuskan beberapa hal antara lain :

- a. Mendirikan badan federasi bersama "Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia" (PPPI) yang diketuai oleh Ny. Soekonto.
- b. Menerbitkan surat kabar, yang redaksinya dipercayakan kepada pengurus PPPI yang terdiri dari Nyi Hadjar Dewantara, Nn. Hajinah, Ny. Ali Sastroamidjono, Nn. Ismudijarti, Nn. Budiah dan Nn. Sunaryati.

- c. Mendirikan Studie Fonds yang menolong gadis-gadis yang tidak mampu.
- d. Memperkuat pendidikan kepanduan putri.
- e. Mencegah perkawinan pada usia anak-anak.
- f. Mengirimkan mosi kepada pemerintah (Hindia Belanda), agar :
 1. Secepatnya diadakan fonds bagi janda dan anak-anak.
 2. Tunjangan bersifat pensiun jangan dicabut.
 3. Sekolah-sekolah putri diperbanyak.
- g. Mengirimkan mosi kepada Raad Agama agar tiap talak dikuatkan secara tertulis sesuai dengan peraturan agama.

Satu hal yang menarik bagi kota Yogyakarta, yaitu keberadaan Kraton Kasultanan Yogyakarta yang didirikan Pangeran Mangkubumi (Sri Sultan HB I) tahun 1756. Pada tahun 1940 terjadi peristiwa besar di Kasultanan Yogyakarta. Tanggal 18 Maret 1940 oleh Gubernur Dr. Lucien Adams GRM. Dorojatun dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta yang ke IX menggantikan ayahnya.

Setelah menjadi sultan, GRM. Dorojatun bergelar Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ingalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Khalifatullah kaping IX. Lima menit sebelum penobatan, ketika beliau masih berstatus sebagai putra mahkota bergelar Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Sudibya Raja Putra Narendra Mataram.

Sebagai Sultan Yogyakarta ke IX, GRM. Dorojatun menyampaikan pidato saat pelantikannya yang disampaikan dalam bahasa Belanda. Pidato tersebut kurang lebih berisi sebagai berikut :

“Sepenuhnya saya menyadari bahwa tugas yang ada di pundak saya adalah sulit dan berat, terlebih-lebih karena ini menyangkut mempertemukan jiwa Barat dan Timur agar dapat bekerja sama dalam suasana harmonis, tanpa yang Timur harus kehilangan kepribadiannya. Walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya,

namun pertama-tama saya adalah dan tetap orang Jawa. Maka selama tak menghambat kemajuan, adat akan tetap menduduki tempat yang utama dalam Kraton yang kaya akan tradisi ini. Izinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji semoga saya dapat bekerja untuk kepentingan Nusa dan Bangsa sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya”.

Sungguh diluar dugaan Belanda. Kata-kata “...*bekerja untuk kepentingan Nusa dan Bangsa..*” disampaikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX benar-benar berasal dari lubuk hati yang paling dalam. Hal ini dapat dibuktikan oleh sikap beliau di kemudian hari ketika Yogyakarta menjadi ibukota RI.

Sementara itu tanggal 8 Desember 1941 Jepang menyerang Pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbour, sehingga pecahlah Perang Pacifik yang merupakan bagian dari Perang Dunia II yang telah berlangsung sejak tahun 1939 di Eropa. Jatuhnya Singapura ke tangan Jepang, membuat kedudukan pulau Jawa sebagai pusat pemerintah Hindia Belanda terancam. Dalam usahanya menyerang Indonesia, Jepang lebih dulu menguasai daerah-daerah penghasil minyak bumi di Kalimantan Timur seperti Tarakan, Pulau Bunyu dan Balikpapan. Selanjutnya sasaran Jepang adalah Sumatra yaitu Dumai, Pakan Baru, dan Palembang. Terakhir baru Jepang menyerang Pulau Jawa dengan mendaratkan pasukannya di Banten, Indramayu, dan Banyuwangi pada bulan Maret 1942 di bawah pimpinan Jenderal Imamura.

Pada tanggal 6 Maret 1942 Tentara Jepang memasuki Kota Yogyakarta. Mereka datang dari Jalan Solo menuju perempatan Tugu kemudian Jl. Malioboro dan Gedung Gubernur (Gedung Agung/Istana Kepresidenan Yogyakarta). Pasukan bergerak dengan kendaraan truk, bersepeda dan jalan kaki. Untuk menarik simpati rakyat, khususnya rakyat Yogyakarta serdadu-serdadu Jepang menyerukan “Nippon Indonesia Sama-sama”, serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Disamping itu secara demonstratif membawa gambar Ratu Belanda dan ditusuk-tusuk dengan bayonet.

Kedatangan pasukan Jepang ke Yogyakarta mengubah jalannya sejarah. Sri Sultan Hamengku Buwono IX bertindak tegas dan mantap. Di hadapan pembesar Jepang, Beliau menyatakan bahwa segala hal yang berhubungan dengan masalah Kasultanan Yogyakarta hendaknya dibicarakan dahulu dengannya. Hal ini dilakukan agar Sri Sultan Hamengku Buwono IX dapat terus memimpin rakyatnya secara langsung. Karena sikap tegasnya tersebut Sri Sultan Hamengku Buwono IX dikukuhkan sebagai penguasa dan Sultan Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1942 oleh Pembesar Tentara Jepang di Jakarta.

Di Indonesia, Jepang menerapkan sistem pemerintahan militer. Bagi para pelajar, sebelum mengikuti pelajaran diwajibkan melakukan "Taiso" dengan iringan musik dari radio, serta dilatih baris berbaris dan perang-perangan. Bagi para pemuda yang kebanyakan anggota kepanduan diselenggarakan *Seinen Kuurensyo* (pusat latihan pemuda). Kemudian bagi para pemuda usia 15-25 tahun yang diberi latihan kemiliteran diberikan wadah yaitu *Seinendan*. Tugas mereka adalah mengamankan desa-desa, pabrik-pabrik, maupun perusahaan. Untuk pemuda usia 20-30 yang bertugas membantu polisi lalu lintas dibentuk *Keibodan*. Bagi para pemuda yang ingin membantu prajurit diberikan wadah yaitu *Heiho*, dan guna melatih para calon perwira dibentuklah PETA (Pembela Tanah Air) yang pusat latihannya di Bogor.

Di Yogyakarta, tempat latihan kemiliteran masa pendudukan Jepang adalah lapangan *Bumijo*. Di lapangan tersebut para pemuda anggota *seinendan*, *keibodan*, serta pemuda pelajar berlatih kemiliteran. Dari organisasi-organisasi bersenjata jaman Pendudukan Jepang inilah, nantinya lahir tokoh-tokoh TNI pejuang kemerdekaan. Inilah salah satu akibat positif masa pendudukan Jepang.

Namun bagi bangsa Indonesia, Jepang adalah bangsa penjajah. Segala bentuk kebijakan yang dilakukan oleh tentara pendudukan Jepang, bagi bangsa Indonesia lebih banyak menyengsarakan

dibanding membahagiakan. Kesengsaraan rakyat akibat penjajahan Jepang yang amat menyedihkan adalah adanya program Romusha. Jepang memanfaatkan program ini untuk membuat jalan kereta api, jembatan, lapangan terbang, serta gua-gua persembunyian. Hal ini untuk menghadapi pecahnya Perang Pasifik. Tidak sedikit dari mereka yang masuk daftar pengerahan Romusha ke luar daerah dan akhirnya tidak diketahui nasibnya.

Di Yogyakarta, untuk meyelamatkan ribuan rakyat dari kekejaman proyek Romusha Jepang, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menciptakan proyek tandingan, yaitu proyek pembuatan Selokan Mataram. Kegiatan tersebut menyerap ribuan tenaga kerja rakyat Yogyakarta. Dengan demikian mereka selamat dari proyek Romusha Jepang.

2. Pameran Tetap Minirama II

Pameran tetap minirama II menyajikan koleksi museum yang terkait dengan peristiwa bersejarah di Yogyakarta sejak awal proklamasi tahun 1945 sampai dengan masa agresi militer pertama Belanda tahun 1947. Dalam ruang pameran ini disajikan visualisasi peristiwa-peristiwa bersejarah di Yogyakarta dalam bentuk minirama sebanyak 19 buah. Garis besar alur cerita dalam ruang tata pameran ini adalah sebagai berikut :

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, berhasil diketahui oleh Rakyat Yogyakarta setelah berita tersebut diterima oleh Kantor Berita Domei cabang Yogyakarta. Selanjutnya dari mulut ke mulut berita itu dapat disebarluaskan ke berbagai pelosok. Kebetulan hari itu adalah Jum'at, sehingga melalui khotbah Jum'at di masjid-masjid berita Proklamasi Kemerdekaan RI dapat disebarluaskan.

Meski berita proklamasi telah sampai ke Yogyakarta, namun karena masih adanya pasukan Jepang yang bersenjata lengkap, muncul keraguan pada sebagian besar rakyat. Namun keraguan tersebut lenyap setelah Harian Sinar Matahari edisi tanggal 19

Agustus 1945 memuat berita Proklamasi tersebut beserta teks UUD 1945.

Pada tanggal 19 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX segera mengirim telegram ucapan selamat kepada Ir. Soekarno dan Drs. M. Hatta atas terpilihnya beliau sebagai presiden dan wakil presiden. Sebagai tanggapan atas ucapan selamat ini, Presiden Soekarno segera membuat piagam penetapan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai daerah istimewa, dan hubungan antara kepala daerah dengan pemerintah pusat adalah secara langsung.

Setelah itu, pada hari dan tanggal yang sama, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengundang kelompok-kelompok pemuda untuk mengadakan pertemuan yang dilaksanakan di Gedung Wilis, Bangsal Kepatihan, Yogyakarta. Hadir dalam pertemuan itu wakil kelompok pemuda dari golongan agama, nasionalis, kepanduan, dan keturunan Cina yang jumlahnya kurang lebih 100 orang. Sambutan Sultan HB IX dalam pertemuan tersebut antara lain: *"Kita telah beratus-ratus tahun dijajah bangsa lain. Maka selama itu perasaan kita tertekan dan sekarang kita merdeka. Tentu perasaan yang lepas dari tekanan akan melonjak. Melonjaknya ini yang harus kita jaga. Biarlah melonjak setinggi-tingginya, sepuas-puasnya. Akan tetapi jangan sampai menyerempet-nyerempet yang tidak perlu yang bisa menimbulkan kerugian. Menurut sejarah, di mana terjadi perubahan besar dan mendadak seperti yang terjadi di tanah air kita sekarang, pemuda senantiasa memegang peranan penting. Oleh karena itu, saudara-saudara saya minta menjaga keamanan masyarakat, baik di kampung-kampung, di perusahaan-perusahaan, di toko-toko dan lain-lain jangan sampai terjadi kerusuhan. Kalau terjadi sesuatu laporkan kepada saya. Dan bertindak sebagai wakil saya dalam hubungannya dengan saudara-saudara adalah Pangeran Bintoro."*

Satu hari kemudian (20 Agustus 1945), Sri Sultan HB IX menyampaikan himbauan melalui Surat Kabar Harian Sinar Matahari yang berisi antara lain agar seluruh lapisan masyarakat bersatu padu bahu-membahu rela berkorban demi kepentingan bersama menjaga, memelihara, membela kemerdekaan nusa dan bangsa. Kemudian

dalam kapasitasnya sebagai Ketua Koci Hokokai (Badan Kebaktian Rakyat Yogyakarta), Sri Sultan HB IX kembali mengirim telegram kepada Ir. Soekarno dan Drs. M. Hatta, bahwa Yogyakarta sanggup berdiri dibelakang kepemimpinan Ir. Soekarno dan Drs. M. Hatta. Langkah ini juga diikuti oleh Sri Paku Alam VIII.

Setelah memperhatikan keinginan rakyat dan atas persetujuan KNID maka Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengeluarkan amanat tanggal 5 September 1945 yang menyebutkan bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan Negeri Paku Alaman, yang keduanya bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia. Perhubungan antara kedua daerah tersebut dengan pemerintah pusat bersifat langsung, kedua penguasanya bertanggungjawab langsung terhadap Presiden.

Berkumandangnya berita tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Yogyakarta, mendapatkan respon positif dari masyarakat Yogyakarta, khususnya pemuda dan pelajar. Aksi perampasan fasilitas milik Jepang segera terjadi. Salah satu diantaranya adalah Gedung Percetakan Harian Sinar Matahari yang terletak di Jalan Malioboro. Di bawah komando pejuang pers Samawi dan Sumantoro, dibantu oleh para pekerja Harian Sinar Matahari antara lain Bramono, Moeljono, Soeprijo Djojosupadmo, Djoemadi, Boerhan, Moehammad Noer, Drijodipoero serta para pemuda pelajar aksi pengambilalihan Gedung Percetakan Harian Sinar Matahari dilakukan. Pada waktu itu pula Sumarmadi juga berhasil mengambil alih Radio Jepang dan berkumandanglah RRI yang pertama di Yogyakarta.

Di bawah penguasaan para pejuang pers, percetakan Harian Sinar Matahari turut berperan dalam menegakkan proklamasi 17 Agustus 1945, antara lain dalam terbitannya tanggal 19 Agustus 1945 yang memuat berita proklamasi dan teks UUD 1945. Di samping itu, pada terbitannya tanggal 20 Agustus 1945, harian ini memuat himbauan Sri Sultan HB IX agar seluruh rakyat untuk rela berkorban demi kepentingan nusa dan bangsa

Dengan pertimbangan keamanan, atas bantuan Samawi, Sumantoro dan Bramono, KNID melakukan penyegelan terhadap Percetakan Harian Sinar Matahari. Namun karena pertimbangan kebutuhan masyarakat akan informasi maka pada tanggal 26 September 1945 segel dibuka kembali. Dengan nama baru yang diperoleh dari Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo (Ketua KNID Yogyakarta), yaitu Kedaulatan Rakyat, keesokan harinya, hari Kamis Kliwon 27 September 1945 terbit pertama kali ditengah kancah revolusi.

Disamping masalah nasionalisasi aset-aset milik Jepang, setelah dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan masalah pengibaran bendera merah putih makin dipergiat. Tentang pengibaran bendera ini dipertegas lagi dengan dengan keputusan konferensi para pemuda masyarakat, pegawai, polisi, BKR, dan Barisan Pelopor dari seluruh Jawa yang berlangsung tanggal 20 September 1945 di Jakarta. Konferensi tersebut mempunyai maksud antara lain untuk membulatkan tekad sebagai pendukung proklamasi dan pembela Republik.

Menanggapi hal tersebut, pada tanggal 21 September 1945, ribuan rakyat Yogyakarta yang sebagian besar pemuda pelajar, bermaksud mengibarkan bendera Merah Putih di Senisono namun kemudian dihalau oleh tentara Jepang. Selanjutnya mereka berkumpul di depan Gedung Cokan Kantai (Gedung Agung) dengan dikawal oleh satu kompi pasukan Polisi Istimewa. Rombongan bergerak untuk mengganti bendera Jepang "Hinomaru" yang berkibar di atap Gedung Agung dengan bendera Merah Putih. Tanpa takut sedikitpun Slamet, Sutan Ilyas, Supardi dan Rusli, serta pemudi Siti Ngaisah (ada yang memanggil Widowati) segera naik ke atas Gedung Cokan Kantai menurunkan bendera Hinomaru dan menggantikannya dengan bendera Merah Putih. Saat itu pula bergema lagu Indonesia Raya dengan khidmat.

Sesudah bendera Merah Putih berkibar rakyat Yogyakarta bergerak di sepanjang Jl. Malioboro dipimpin oleh Polisi Istimewa

dengan senjata lengkap. Arak-arakan berpapasan dengan satuan Kenpeitei yang bermarkas di Pingit. Meski demikian peristiwa yang tidak diinginkan tidak sempat terjadi.

Namun pertemuan tersebut, memberikan ilham pasukan Jepang untuk melakukan tindakan antisipasi. Dimulai dengan keluarnya maklumat Seiko Shikikan tentang adanya larangan memiliki senjata api bagi rakyat, maka diadakanlah gerakan pelucutan bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal 23 September 1945, tentara Jepang secara diam-diam melucuti kesatuan Polisi Istimewa di Gayam yang kemudian disimpan di gudang (sekarang SD Gayam). Selaku komandan kompi Polisi Istimewa, Oni Sastroadmodjo segera melaporkan kejadian ini kepada komisaris polisi RP. Sudarsono. Selanjutnya RP. Sudarsono segera mengadakan perundingan dengan pemimpin tentara Jepang. Tetapi karena perundingan gagal, maka tanggal 23 September 1945 pukul 21.00 WIB massa rakyat dan polisi istimewa mengepung markas dan gudang senjata Jepang di Gayam. Akhirnya senjata-senjata itu dapat direbut kembali dan dibagi-bagikan pada Polisi Istimewa untuk modal perjuangan.

Keberhasilan pelucutan senjata Jepang di Gayam Yogyakarta memberi inspirasi bagi para pemuda untuk mengadakan pelucutan senjata Jepang di tempat lain. Usaha pelucutan senjata Jepang secara damai di Kotabaru (markas Kido Butai) telah diusahakan oleh R. Mohammad Saleh (Ketua KNID), RP. Sudarsono, Sunjoto, Bardosono (dari BKR) dengan Mayor Otzuka, Kenpeitai Cho Sasaki, Kapten Ito dan Kiabuco. Namun usaha tersebut menemui jalan buntu, dan pertempuran tidak dapat dihindarkan. Akibat dari pertempuran tersebut gugur 21 orang pejuang bangsa Indonesia. Nama-nama mereka diabadikan menjadi nama-nama jalan di Kotabaru dan sekitarnya antara lain : I Dewa Nyoman Oka, Amat Djazuli, Faridan M. Noto, Bagong Ngadikan, Suroto, Syuhada, Sudjjiono, Sunaryo, Supadi, Djuwadi, Hadidarsono, Sukartono, A. Djohar Nurhadi, Sabirin, Mohammad Sareh, Mohammad Wardani, Trimo, Ahmad Zakir, Umar Kalipan, Abu Bakar Ali, dan Atmo Sukarto.

Dengan korban nyawa para pahlawan tersebut, akhirnya senjata Jepang berhasil dilucuti. Pukul 10.30 WIB Pasukan Jepang mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Sekitar 360 orang serdadu Jepang berhasil ditawan. Polisi Istimewa membawanya ke penjara Wirogunan dengan berjalan kaki. Sore harinya, Komandan Garnizun Jepang diterima oleh GBPH (Gusti Bendara Pangeran Harya) Prabuningrat di pintu gerbang Keben untuk menghadap Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Para perwira Jepang itu diterima Sultan di kantor beliau, Emper Purworetno guna menyatakan penyerahan pasukan dan senjatanya. Senjata Jepang kemudian disimpan di Bangsal Pracimusono dan selanjutnya diserahkan kepada TKR.

Sejalan dengan usaha-usaha perebutan aset Jepang oleh para pejuang, maka daerah-daerah kekuasaan Jepang yang memiliki lapangan terbang juga menjadi sasaran. Tugas ini dikerjakan oleh BKR bagian Udara dan rakyat. Pada bulan Oktober 1945, Lapangan terbang Maguwo berhasil dikuasai oleh BKR Udara dibantu para pejuang lainnya. Pesawat-pesawat hasil rampasan yang sebagian besar sudah berupa rongsokan diperbaiki oleh para teknisi Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1945 Agustinus Adisucipto berhasil menerbangkan pesawat Cureng dengan identitas merah putih di Lapangan Terbang Maguwo. Peristiwa ini merupakan hal pertama kalinya setelah Indonesia Merdeka. Selanjutnya atas prakarsanya, pada tanggal 7 Nopember 1945 di Yogyakarta diadakan pertemuan beberapa tokoh penerbang dari Yogyakarta, Malang, dan Surabaya. Hasil pertemuan tersebut adalah dibukanya pendidikan bagi para penerbang Indonesia pada tanggal 15 Nopember 1945.

Sejak berdirinya BKR Udara, dari hari kehari mengalami peningkatan dalam kegiatan. Ketika BKR menjadi TKR, maka BKR Udara ditingkatkan menjadi TKR Jawatan penerbangan. Sesuai dengan perkembangan organisasi TKR, pada tanggal 24 Januari 1946 menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia), maka TKR Jawatan Penerbangan ditingkatkan menjadi TRI Angkatan Udara (TRI AU),

dan kemudian terkenal dengan AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia). Hal ini berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 6/SD tahun 1946 tanggal 9 April 1946. Selanjutnya tanggal 9 April dijadikan hari HAPENAS (Hari Penerbangan Nasional). Adapun susunan pucuk pimpinan dalam AURI waktu itu adalah : Komodor Udara Suryadi Suryadarma (Kepala Staf), Komodor Sukarman Martokusumo (Wakil Kepala Staf I), Komodor Muda Udara Agustinus Adisucipto (Wakil Kepala Staf II).

Sementara itu dalam sidang kabinet tanggal 15 Oktober 1945 di Jakarta memutuskan markas besar umum (MBU) TKR berkedudukan di Yogyakarta. Dan sekaligus menunjuk bekas Mayor KNIL Oerip Soemohardjo sebagai Kepala Staf Umum Angkatan Perang yang bertugas menyusun TKR dan perkembangannya. Semula MBU TKR bertempat di Grand Hotel (sekarang Hotel Garuda), kemudian dipindahkan ke Gedung yang terletak di Jl. Jenderal Soedirman Yogyakarta (sekarang Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama). Sedang Menteri Keamanan Rakyat waktu itu ditunjuk Moh. Sulyoadikusumo dan pemimpin tertinggi TKR ditentukan tanggal 20 Oktober 1945 yaitu Soepriyadi seorang tokoh pemberontakan PETA di Blitar Januari 1945. Karena sejak tanggal tersebut Soepriyadi belum diketahui jejaknya, MBU TKR berada di tangan Letjen Oerip Soemoharjo.

Pada tanggal 30 Oktober 1945 MBU TKR Yogyakarta juga mengeluarkan pengumuman tentang pengangkatan Anggota Agung Markas Tertinggi bagian MBU TKR yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Sri Susuhunan Paku Buwono XII, Sri Mangkunegara dan Sri Paku Alam VIII. Selain itu diangkat pula sebagai opsir penghubung yaitu Gusti Pangeran Haryo (GPH) Suryohamijoyo untuk divisi istimewa Surakarta dan Bendara Pangeran Haryo (BPH) Bintoro untuk divisi istimewa Yogyakarta.

Tanggal 12 November 1945 diadakan konferensi TKR yang dihadiri oleh para panglima dan komandan divisi se Jawa dan Sumatra di MBU TKR. Hasil konferensi antara lain mengangkat Pangsar

Jenderal Soedirman sebagai Panglima Besar.

Untuk selanjutnya TKR dirubah menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia) pada tanggal 25 Januari 1946 berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 4/SD. Dan kemudian pada tanggal 3 Juni 1947 berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 24 tahun 1947 berubah menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia). Segenap anggota angkatan perang yang ada dan segenap anggota laskar yang bersenjata dimasukkan secara serentak ke dalam TNI. Setelah ada penataan ulang, para pucuk pimpinan TNI dilantik di Yogyakarta pada tanggal 28 Juni 1947, bersamaan dengan pelantikan Jenderal Soedirman sebagai Panglima Besar. Para pucuk pimpinan TNI waktu itu antara lain Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo, Laksamana Muda M. Nazir, Komodor Udara S. Suryadarma, Soetomo (Bung Tomo), Ir. Sakirman dan Djoko Suyono.

Sejalan dengan perkembangan kemiliteran di Indonesia pada masa awal kemerdekaan, dirasa perlu adanya lembaga pendidikan militer yang mendidik para calon perwira. Oleh karena itu atas prakarsa Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo selaku Kepala Staf Umum TKR dibentuklah Militer Akademi (MA) di Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 1945. Syarat untuk memasuki MA Yogyakarta ini adalah pemuda Indonesia yang bersemangat kemerdekaan, minimal lulus SR (setingkat SD) bagi pendidikan kader dan lulusan Sekolah Menengah untuk MA. Lama pendidikan adalah 2 bulan baik untuk MA dan Kader. Setelah lulus dari MA berpangkat Letnan Dua dan dari Kader berpangkat Sersan Dua. Kemudian lama pendidikan ditambah untuk MA diperpanjang sampai tiga tahun dan untuk Kader diperpanjang sampai enam bulan.

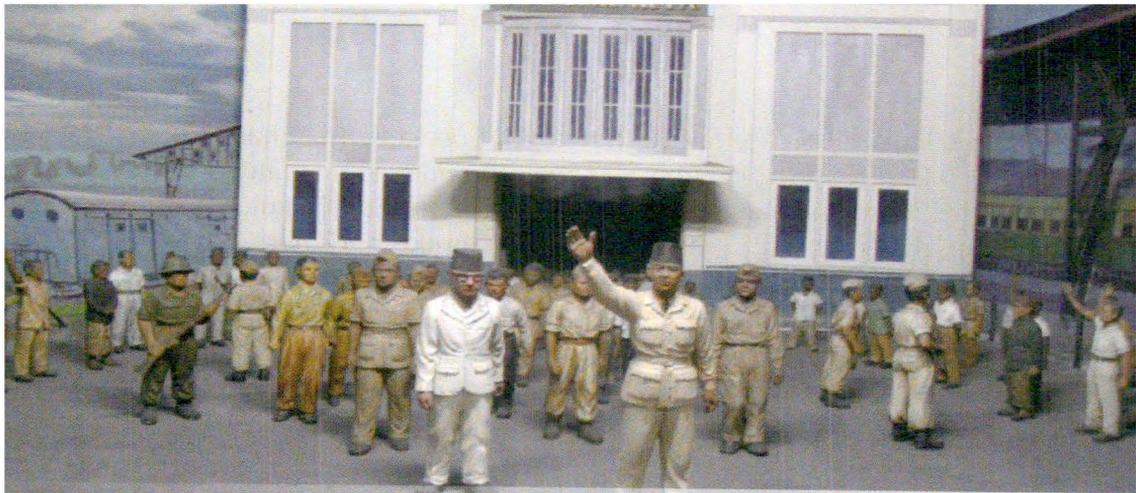
Sebagai tempat dilaksanakannya proses pendidikan MA Yogyakarta adalah di Gedung Christeljik Mulo Yogyakarta (Sekarang SMU BOPKRI I Kotabaru, Yogyakarta). Sebagai tenaga-tenaga instruktur di MA Yogyakarta antara lain Kapten Sukirdjan, Kapten R. Ismail, Kapten Setiaji, Kapten Moch Nor dan Kapten Soekasno. Sebagai direktur Militer Akademi Yogyakarta adalah

Mayor Jenderal R. Memet Rachman Ali Soewardi (mantan Kapten KNIL). Dan Kolonel Samidjo Mangoenwirono sebagai wakil. Ketika Kolonel Samidjo Mangoenwirono harus memimpin sekolah kader militer di Gombong, kedudukan wakil direktur Militer Akademi dijabat oleh Wardiman Wirjosapoetro. Pada tanggal 19 Oktober 1948 direktur MA Mayor Jenderal R. Memet Rachman Ali Soewardi digantikan oleh Kolonel Gusti Pangeran Haryo (GPH) Djati Koesoemo.

Pada pembukaan angkatan I, bulan November 1945 dari 3.502 pendaftar diterima 442 orang. Tersaring dalam wisudawan I tahun 1948 berjumlah 198 orang yang diwisuda pada tanggal 28 Nopember 1948 di halaman Istana Presiden Yogyakarta (Gedung Agung) oleh Presiden Soekarno. Beberapa wisudawan waktu itu yang mendapat prestasi tertinggi antara lain Letnan Dua Utoyo Notodirdjo dan Letnan Dua Susilo Sudarman.

Angkatan II yang dibuka tahun 1946 dari 400 pendaftar diterima 150 orang. Jumlah itu bertambah dengan diintegrasikannya Sekolah Kader Malang ke MA Yogyakarta. Dari jumlah yang ada berhasil diwisuda sebanyak 156 orang dalam tiga kali upacara. Satu kali di Yogyakarta yaitu tahun 1949 dan dua kali di Jakarta tahun 1950. Tahun 1957 MA menjelma menjadi Akademi Militer Negara (AMN) di Magelang. Tahun 1966 berintegrasi dengan akademi angkatan yang lain menjadi satu dengan nama AKABRI (Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Dalam rangka pembelaan negara dari gangguan penjajah yang ingin menjajah Indonesia, selain memasuki anggota BKR para pemuda juga menggabungkan diri dalam badan-badan kelaskaran. Guna menyatukan pemahaman tentang perjuangan maka tanggal 25 Oktober 1945 di Yogyakarta digelar rapat yang dihadiri para pemuda. Hasil rapat dibentuk suatu badan yang bernama "Gerakan Pemuda Republik Indonesia" (GERPRI). Selanjutnya GERPRI bermaksud mengadakan kongres pemuda Indonesia. Sebagai langkah persiapan GERPRI mengadakan pertemuan di Gedung Senisono Yogyakarta.



Minirama 22 Ruang Minirama II
Pemerintah RI Hijrah Ke Yogyakarta Tahun 1946



Minirama 19 Ruang Minirama II
Pangsar Jenderal Soedirman Mengadakan Inspeksi Pada Saat Peringatan 6 Bulan MA Yogyakarta



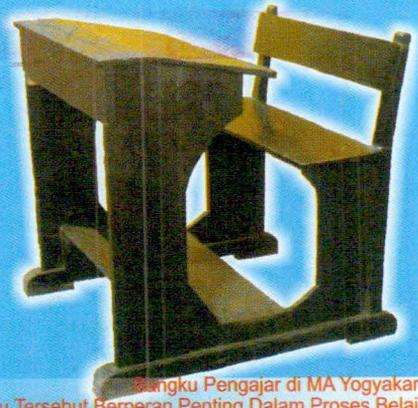
Minirama 2 Ruang Minirama II
Kegiatan Para Pemuda Pelajar Yang Tergabung Dalam Tentara Pelajar Tahun 1946-1949



Stempel dan Tinta Cap PMI
Merupakan Perlengkapan Yang Dipergunakan Oleh PMI Cabang
Wirobrajan Yogyakarta Pada Masa Revolusi Fisik 1945 - 1949



Perlengkapan Milik Soekimin
Buku, Pasam, Topi, Bendera, dan Dokumen Tersebut
datuk milik Soekimin Anggota TP Bagian PHB Yang Aktif di Brigade XVII



Bangku Pengajar di MA Yogyakarta
Bangku Tersebut Berperan Penting Dalam Proses Belajar
Mengajar MA Yogyakarta Sejak Tahun 1945-1949



Mesin Ketik
Merupakan Mesin Ketik Yang Dipergunakan Oleh TP
Di Mertaya, Padosongo Donokerto Turi Sleman Tahun 1948



Pamflet Perjuangan
TP di Mertaya Para serikman Guna Memberikan
Gemanang Dalam Perjuangan Tahun 1945 - 1949

Untuk lebih memantapkan pelaksanaan kongres, pada tanggal 31 Oktober 1945 diadakan pertemuan yang dihadiri oleh para utusan dari Markas Besar Barisan Pelopor Jakarta, API (Angkatan Pemuda Indonesia) Jakarta, PRI (Pemuda Republik Indonesia) Bandung dan Surabaya, IPI (Ikatan Pelajar Indonesia) Jakarta, GERPRI Yogyakarta dan Staf Wartawan Kementerian Penerangan.

Setelah segala sesuatunya dianggap siap, maka Kongres Pemuda Indonesia dilaksanakan tanggal 10-11 Nopember 1945. Kongres dihadiri oleh 332 orang utusan dari 30 organisasi pemuda di Indonesia. Pembukaan kongres dilaksanakan di Alun-alun Utara Yogyakarta, sedangkan pemimpin kongres adalah Chaerul Saleh. Dalam kongres tersebut berkenan memberikan amanat antara lain Presiden Soekarno, Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII. Hadir dalam kongres Drs. M. Hatta, menteri negara dan wartawan asing. Ketika kongres berlangsung peserta dari Surabaya meninggalkan kongres karena bertepatan dengan Pertempuran Surabaya melawan Sekutu (10 Nopember 1945).

Hasil terpenting dari pelaksanaan kongres adalah diadakannya penggabungan diantara semua gerakan pemuda dalam Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia (BKPRI), yang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat Republik Indonesia dibantu Dewan Pekerja Perjuangan dan Dewan Pekerja Pembangunan. Untuk selanjutnya, sebagai realisasi hasil kongres, pada tanggal 24-25 November 1945 di Yogyakarta dibentuk Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Indonesia Yogyakarta yang diketuai BRM. Hertog dan wakilnya Darwis Tamim.

Sementara itu, Sekutu yang diboncengi NICA tanggal 29 September 1945 mendarat di Jakarta dan mengadakan provokasi. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1945 di bawah pimpinan Jenderal Bethel pasukan Sekutu mendarat di Semarang, kemudian menuju Ambarawa dan Magelang. Bulan November dan Desember 1945, kontak senjata antara tentara Sekutu dengan para pejuang sering terjadi di Ambarawa. Untuk mendukung pejuang di Ambarawa, dari Yogyakarta dikirim pasukan batalyon gabungan (Batalyon VII, X, XV,

XVII, XX, dan XXIV dibawah pimpinan Letkol Umar Slamet dan Letkol Palal. Juga pasukan Polisi istimewa pimpinan Oni Sastroadmodjo, Laskar Tentara Rakyat Mataram pimpinan Bung Tardjo, Laskar Barisan Macan (para nara pidana yang dipersenjatai), dan Laskar Tentara Rakyat Mataram Puteri dibawah pimpinan Widayati.

Selain dorongan fisik, dorongan moral melalui siaran radio juga dilakukan. Melalui siaran-siaran perjuangannya RRI Yogyakarta di Jl. Ngabean 1 (sekarang BNI 1946) turut berperan aktif. Disamping itu peranan radio pemancar gelap yang menamakan dirinya sebagai Radio Pemberontak Mataram di Kampung Kadipaten di bawah pimpinan Bung Tardjo juga cukup besar peranannya. Oleh karena itu dengan dalih membungkam siaran sombong dari kaum ekstrimis dan teroris tersebut tentara Sekutu dengan pesawat RAF menjatuhkan bom di atas kota Yogyakarta dengan sasaran RRI. Tanggal 25 November 1945 bom mengenai sebagian bangunan Museum Sonobudoyo. Akibatnya atap bangunan runtuh dan sebagian koleksi hangus terbakar. Meski demikian siaran radio tetap mengudara sehingga menjadikan jengkel Sekutu. Tanggal 27 November 1945 bom kembali dijatuhkan dan mengenai bagian depan Balai Mataram sehingga hancur rata dengan tanah.

Di Jakarta aksi berlebihan juga dilakukan tentara NICA Belanda yang datang membonceng tentara Sekutu. Mereka melakukan aksi terror dan menyebabkan suasana di Jakarta tidak aman. Pembunuhan dan penculikan oleh tentara NICA sering terjadi tiap hari. Adanya usaha pembunuhan terhadap Perdana Menteri Sutan Sjahrir tanggal 26 Desember 1945, juga terhadap Amir Sjarifudin tanggal 28 Desember 1945 menunjukkan keadaan Jakarta tidak aman bagi para pemimpin negara. Ditambah lagi adanya pendaratan pasukan marinir Belanda yang mendarat di Tanjung Priuk tanggal 30 Desember 1945. Oleh karena itu dalam sidangnya tanggal 3 Januari 1946, kabinet memutuskan untuk memindahkan ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta. Pada tanggal 4 Januari 1946, Presiden Soekarno, Drs. Muhammad Hatta dan para pemimpin negara lainnya hijrah ke

Yogyakarta menggunakan Kereta Api. Kemudian diikuti oleh pindahnya instansi-instansi dan jawatan pemerintah yang lain. Ketika itu Sutan Sjahrir masih tetap di Jakarta. Hal itu untuk mempermudah jika sewaktu-waktu terjadi perundingan dengan Belanda. Selanjutnya rombongan menuju ke Gedung Negara. Sejak saat itu (4 Januari 1946) Yogyakarta menjadi ibukota RI. Sebagai rumah dinas, Presiden Soekarno menempati Gedung Agung sedang Wakil Presiden Mohammad Hatta menempati Gedung di Jl. Reksobayan 4 Yogyakarta (sekarang Makorem 072 Pamungkas Yogyakarta). Dengan hijrahnya para pemimpin RI ke Yogyakarta, praktis Yogyakarta menjadi pusat perjuangan. Hal ini dengan asumsi bahwa Yogyakarta menjadi sasaran Belanda yang ingin menjajah lagi Indonesia.

Banyaknya korban pertempuran membuka wacana untuk mendirikan organisasi PMI (Palang Merah Indonesia). Terkait dengan hal tersebut Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Kesehatan Dr. Buntaran Martoadmodjo untuk membentuk Palang Merah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dr. Buntaran segera menunjuk tim yang beranggotakan 5 orang yang dipimpin oleh Prof. Dr. R. Mochtar. Kemudian pada tanggal 3 September 1945 berdirilah PMI. Sedangkan pengurus besar PMI baru terbentuk pada tanggal 17 September 1945 setelah diselenggarakan konferensi PMI di Yogyakarta. Hasil konferensi tersebut antara lain menetapkan Drs. M. Hatta sebagai ketua pusat dan Prof. Dr. Sarwono Prawirohardjo sebagai ketua pengurus harian PMI.

Di DIY secara resmi PMI dibentuk pada tanggal 27 Oktober 1945 berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 tanggal 27 Oktober 1945 tentang kesehatan, pengobatan dan perawatan anggota-anggota TKR. Ketika terjadi pertempuran PMI selalu mendampingi TKR. Dalam rangka pelaksanaan pelucutan senjata Jepang dan aksi NICA Belanda, Pos PMI didirikan di Pos Polisi Gondokusuman. Sebagai pelopor PMI Yogyakarta antara lain Ibu Astuti Darmosugito.

Menyadari akan pentingnya arti pendidikan dalam memajukan bangsa, pada tanggal 3 Maret 1946 diresmikanlah Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada di Yogyakarta yang hanya mempunyai Bagian Hukum dan Bagian Sastra. Pada tanggal 20 Mei dibentuklah sebuah komite antar kementerian yang akan membahas masalah pendidikan tinggi di Indonesia. Komite itu memutuskan untuk menggabungkan semua lembaga pendidikan yang ada di Yogyakarta, Solo dan Klaten. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tanggal 16 Desember 1949 tentang Peraturan Sementara Penggabungan Perguruan Tinggi Menjadi Universiteit maka perguruan tinggi yang ada di tiga kota tersebut digabungkan menjadi Universiteit Negeri Gadjah Mada yang berkedudukan di Yogyakarta. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 1949, di Sitihinggil Kraton Yogyakarta diresmikan Universiteit Negeri Gadjah Mada. Prof. Dr. A. Sardjito ditetapkan sebagai Presiden Universiteit yang pertama. Pada tahun 1954 nama Universiteit Negeri Gadjah Mada diganti menjadi Universitas Gadjah Mada. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang memutuskan untuk menggunakan istilah universitas dan fakultas untuk seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Gemblengan untuk menjadi bangsa yang kuat bagi Indonesia datang silih berganti. Setelah sukses dengan perjuangan mengadakan pelucutan senjata Jepang, tugas baru segera menanti yaitu melakukan tugas internasional berupa pengangkutan bekas tawanan perang dan interneeran Sekutu APWI (Allied Prisoner of War and Interneer) yang ditawan Jepang selama Perang Dunia II dari daerah RI Yogyakarta ke Jakarta. Untuk melaksanakan tugas ini dibentuk "Panitia Oentoek Pengembalian bangsa Djepang dan Asing" (POPDA) di bawah pimpinan Jenderal Mayor Sudibyo dan Jenderal Mayor Adul Kadir. Untuk itu pada tanggal 28 April 1946 dari Yogyakarta diberangkatkan 550 orang tawanan Belanda dan Jepang dari Stasiun Tugu menuju Stasiun Manggarai. Tugas pengawalan ini dilakukan oleh TRI Kompi Widodo.

Melihat begitu besar tugas tentara dalam mempertahankan

kemerdekaan, para pelajar tidak bisa tinggal diam. Mereka membentuk organisasi-organisasi yang berorientasi pada perjuangan baik bersenjata maupun tidak. Di Yogyakarta mereka menggabungkan diri ke dalam GAPI (Gabungan Pemuda Indonesia), MOBPEL (Mobilisasi Pelajar), IPI (Ikatan Pelajar Indonesia), dan TP (Tentara Pelajar). Hal ini sebagai langkah antisipatif jika Belanda hendak menjajah lagi Indonesia.

Terbentuknya TP Yogyakarta, berawal dari dibentuknya IPI Pertahanan yang diprakarsai oleh Martono, Soetomo, Honggowongso, Moh. Said, Abdul Gafar dan Warsito. Pembentukan IPI pertahanan ini diresmikan pada tanggal 17 Juli 1946 di halaman asrama TKR Pingit Yogyakarta oleh Jenderal Mayor Mustopo atas nama Menteri Pertahanan RI. Sejalan dengan reorganisasi dan rasionalisasi dalam APRI, maka pada tanggal 14 Mei 1948 dibentuklah brigade Tentara Pelajar yang langsung berada dibawah pimpinan Panglima Besar APRI Jenderal Soedirman. Brigade ini diresmikan pada tanggal 17 November 1948 di Kepatihan Yogyakarta dengan nama Brigade XVII TNI. Sebagai Komandan ditunjuk Kolonel Sudarto. Pada masa revolusi fisik anggota brigade ini sering mengadakan latihan di lapangan Bumijo Yogyakarta.

Masa revolusi merupakan masa perjuangan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Dalam masa ini pembentukan angkatan perang dilakukan dalam jumlah besar, baik yang terdaftar dalam organisasi resmi tentara maupun badan-badan kelaskaran. Supaya kinerjanya mencapai hasil yang optimal tentunya harus didukung dengan persenjataan yang memadai baik jumlah maupun mutunya. Untuk memenuhi kebutuhan senjata pada tahun 1946 didirikan pabrik senjata di Demakijo Yogyakarta. Pabrik tersebut menempati bangunan bekas pabrik gula masa kolonial Belanda. Personil dan peralatan pabrik senjata tersebut merupakan pindahan dari Bandung. Pabrik senjata ini didukung oleh kurang lebih 1.000 orang pekerja. Produk yang dihasilkan antara lain pistol, granat gomyok, mortir maupun stengun. Pabrik ini juga mengerjakan

modifikasi senjata rampasan. Bahan-bahan yang digunakan amat sederhana dan menggunakan bahan daur ulang seperti pipa air, bekas tiang telpon dan sebagainya. Pimpinan pabrik dijabat oleh Mayor Ario Damar dari SAD IV, sedangkan pimpinan laboratorium dijabat oleh Letnan Barnas dibantu oleh Ir. Herman Johannes. Pabrik ini hanya beroperasi hingga tahun 1948 dan tutup selamanya karena terjadinya Agresi Militer Belanda II.

Panggilan jaman masa perjuangan revolusi fisik tidak dibatasi oleh kategori-kategori tertentu. Selain pelajar, panggilan ibu pertiwi juga mengusik hati para seniman untuk menyumbangkan dharma baktinya bagi perjuangan. Mereka dalam rangka membakar semangat juang para anggota laskar pembela kemerdekaan membuat poster perjuangan, plakat-plakat perjuangan, selebaran-selebaran perjuangan. Juga dalam rangka pencetakan mata uang masa revolusi, goresan tangan para seniman turut menghias lembar demi lembar ORI (Oeang Republik Indonesia) uang lambang identitas bangsa tersebut.

Jauh sebelum masa kemerdekaan di Indonesia telah berdiri sebuah wadah tempat berkumpulnya para seniman. Atas inisiatif para seniman antara lain Sudjojono, Sumardjo, Sunindyo dan Suradji, pada tahun 1936 dibentuklah organisasi Seniman Indonesia Muda (SIM). Kemudian pada tahun 1947, di Yogyakarta berdiri Perkumpulan Pelukis Rakyat sebagai pecahan dari SIM. Perkumpulan tersebut didirikan atas inisiatif Affandi dan Hendro. Sedangkan anggotanya terdiri dari Rahmat, Bathara Lubis, Tarmizi dan Armus. Dari merekalah semboyan-semboyan, poster-poster, serta plakat-plakat perjuangan di Yogyakarta bermuculan.

Sejalan dengan perkembangan politik yang terjadi di Indonesia, perundingan RI Belanda selalu mengalami jalan buntu. Hal ini karena Belanda selalu memberikan tafsir sepihak dalam hasil perundingan sehingga jelas tidak akan mendapat kata sepakat dari pihak RI. Dari situlah Belanda memanfaatkannya sebagai alasan untuk melakukan aksi sepihak dalam usahanya menguasai kembali RI. Usaha Belanda tersebut terlihat nyata dengan terjadinya Aksi Militer Pertama Belanda

tanggal 21 Juli 1947. Lapangan terbang Maguwa mendapat serangan hebat dari angkatan udara Belanda. Bersamaan dengan ini, daerah-daerah penghasil bahan makanan di Jawa Barat, Jawa Timur dan daerah penghasil bahan ekspor di Jawa Barat, Jawa Timur serta Sumatra juga menjadi sasaran pesawat-pesawat pembom Belanda.

Serangan Belanda atas lapangan Maguwo, memicu kemarahan para kadet penerbang. Pada tanggal 29 Juli 1947, dinihari para kadet penerbang melakukan serangan terhadap tempat-tempat yang diyakini sebagai markas tentara Belanda di Semarang, Ambarawa, dan Salatiga. Mereka adalah Suharnoko Harbani, Sutarjo Sigit (penyerang Ambarawa dan Salatiga), Mulyono (pengebom Semarang). Dibantu oleh penembak udara antara lain Kaput, Sutardjo dan Dulrachman. Serangan tersebut membuat pasukan Belanda kalang kabut sehingga pagi hari hingga sore harinya giat mengadakan patroli udara.

Sementara itu pesawat VT-CLA yang dicarter oleh pemerintah RI yang mengangkut obat-obatan bantuan Palang Merah Malaya hendak mendarat di lapangan terbang Maguwo. Menjelang pendaratannya, tiba-tiba secara membabi buta pesawat diserang oleh pesawat Belanda Kitty Hawk P-40 dan jatuh pecah di daerah Desa Jatikarang, Kelurahan Tamanan, Kapanewon Gondowulung, Kabupaten Bantul. Gugur dalam peristiwa tersebut para tokoh penerbang Indonesia antara lain Komodor Muda Udara Agustinus Adisucipto, Komodor Muda Udara Abdurachman, serta Kapten Udara Adisumarmo Wiryokusumo. Satu-satunya penumpang yang selamat dalam peristiwa tersebut adalah Abdul Gani Handonotjokro.

Untuk mengenang peristiwa tersebut maka pada tempat jatuhnya pesawat tersebut didirikan monumen yang dikenal dengan nama Monumen Ngoto atau Tugu Ngoto. Karena peristiwa tersebut merupakan pengabdian insan AURI maka sejak tahun 1962, tanggal 29 Juli ditetapkan sebagai Hari Bhakti TNI AU.

3. Pameran Tetap Minirama III

Dalam ruang pameran tetap minirama III ini disajikan koleksi-koleksi museum yang terkait dengan peristiwa-peristiwa bersejarah sejak disetujuinya perjanjian Renville sampai dengan adanya pengakuan kedaulatan RIS, terdiri dari 18 buah minirama adegan peristiwa bersejarah di Yogyakarta. Garis besar alur ceritanya adalah sebagai berikut:

Aksi militer pertama Belanda mendapat reaksi keras dari dunia internasional. Kondisi ini memberi angin segar bagi perjuangan bangsa Indonesia. Atas resolusi yang diajukan India dan Australia maka AS mengajukan usul kompromis kepada DK PBB untuk menyelesaikan masalah RI dan Belanda. Langkah yang diambil adalah antara RI dan Belanda harus menghentikan tembak menembak. Selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan RI dan Belanda dibentuklah KTN (Komisi Tiga Negara) yang beranggotakan Australia, Belgia, dan Amerika Serikat, yang masing-masing diwakili oleh Richard Kirby, Paul Van Zeeland, dan Prof. Graham. Atas jasa mereka maka dapat dicapai kesepakatan yang terkenal dengan Persetujuan Renville. Isi persetujuan tersebut antara lain Belanda hanya mengakui wilayah RI hasil persetujuan yang meliputi Jawa, Sumatra, dan Madura. Namun secara sepihak, selama perundingan berlangsung Belanda membuat garis demarkasi Van Mook yang nantinya akan dipergunakan sebagai garis status quo.

Setelah ditandatanganinya persetujuan Renville tanggal 17 Januari 1948, maka ditindaklanjuti dengan pengosongan daerah kantong-kantong dari pasukan TNI. Hijrah pasukan segera dilakukan dengan meninggalkan kantong-kantong gerilya menuju daerah DIY dan Jawa Tengah. Pada tanggal 11 Pebruari 1948 pasukan hijrah tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta. Pimpinan pasukan hijrah adalah Mayor Mokoginto. Hadir menerima pasukan hijrah adalah para pemimpin negara antara lain Wakil Presiden Mohammad Hatta, Arudji Kartawinata dan ibu-ibu Kowani. Untuk selanjutnya pasukan hijrah tersebut segera di salurkan ke pos-pos yang ditentukan.

Perjuangan para diplomat RI menanggapi aksi-aksi sepihak yang dilakukan oleh Belanda, mampu mengetuk hati dunia internasional. Pengakuan akan keberadaan Negara Indonesia mulai bermunculan antara lain dari India, Birma, Srilangka, Afganistan, Mesir, Arab Saudi, Irak, Siria, dan Libanon. Rasa simpati atas perjuangan bangsa Indonesia juga diwujudkan dengan tindakan nyata seperti pengiriman obat-obatan dari pemerintah Mesir yang tiba di Maguwo pada tanggal 5 Maret 1948. Selanjutnya obat-obatan tersebut didistribusikan ke pos-pos PMI yang memerlukannya.

Meski masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia begitu berat dengan adanya tekanan dari luar berupa gangguan keamanan oleh Belanda serta dari dalam berupa gangguan keamanan dari PKI Madiun, namun agenda dalam negeri tetap menjadi prioritas. Pada tanggal 9 - 12 September 1948, diselenggarakan PON (Pekan Olah Raga Nasional) yang pertama. Meski kegiatan PON dilaksanakan di Solo, namun acara pembukaan dilaksanakan di halaman Istana Negara Yogyakarta (Gedung Agung). Setelah pembukaan selesai, dilanjutkan gerak jalan massal membawa bendera PON dari Yogyakarta menuju Solo. Sebagai ketua penyelenggara adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan ketua pelaksana di Solo adalah P. Soerjohamidjojo.

Sementara itu apa yang dikhawatirkan oleh bangsa Indonesia bahwa Belanda akan menyerang lagi Indonesia menjadi kenyataan. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer keduanya dengan mengadakan serangan atas Maguwo. Dalam waktu singkat, setelah berhasil menaklukkan pasukan penjaga di bawah pimpinan Kadet Udara Kasmiran, Sersan Mayor Tanumiharjo, dan Kopral Tohir, lapangan terbang Maguwo bersama fasilitasnya dikuasai oleh Belanda. Selanjutnya pasukan Belanda Brigade T di bawah pimpinan Kapten Van Langen bergerak ke pusat kota Yogyakarta sambil menembak apa saja yang ditemui selama perjalanan. Kurang lebih pukul 16.00 WIB tentara Belanda berhasil menguasai seluruh kota Yogyakarta. Presiden Soekarno, Wakil

Presiden Moh. Hatta, H. Agus Salim, KSAU Suryadi Suryadarma yang sedang mengadakan rapat kabinet di Gedung Agung ditawan Belanda. Selanjutnya para pemimpin negara tersebut diasingkan ke Bangka. Meski para pemimpin ditangkap bukan berarti RI telah runtuh, karena pucuk pimpinan telah diberikan kepada pemimpin PDRI Mr. Sjafrudin Prawiranegara di Sumatera.

Dengan terpisah-pisahannya para pemimpin negara akibat agresi militer Belanda kedua, maka peranan radio untuk sarana komunikasi sangat penting. Dengan peralatan ini hubungan antar pucuk pimpinan dapat diselenggarakan dengan rapi. Di samping itu peralatan ini mempunyai arti politis terkait dengan perjuangan diplomasi. Sebagai contoh adalah pemancar radio milik AURI yaitu PC 2. Di bawah pimpinan Bapak Budiharjo, dari rumah keluarga Pawirosetomo di Banaran, Playen, Gunung Kidul dengan menggunakan pemancar radio PC 2 dapat dikirim berita-berita penting secara berantai melalui Bukit Tinggi (stasiun radio PDRI), Aceh (stasiun radio AURI), Birma (stasiun radio AURI pada Indonesia Airways di Rangoon) dan India (All India Radio). Salah satu dari berita penting waktu itu adalah keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949.

Sementara itu, agresi militer kedua Belanda mendapat perlawanan sengit dari para gerilyawan. Meski dengan senjata seadanya para pejuang mengadakan perlawanan dengan cara gerilya. Hutan-hutan, gunung-gunung, dan desa-desa menjadi pusat-pusat perjuangan. Pasukan Belanda dalam jumlah kecil yang berpatroli selalu menjadi sasaran empuk mereka. Menghadapi aksi para gerilyawan tersebut, tidak jarang tindakan berlebihan dilakukan oleh Belanda. Sebagai contoh adalah peristiwa yang terjadi di Dusun Jati, Wonokromo, Bantul. Pada tanggal 1 Februari 1949 tentara Belanda melakukan pembersihan di Dusun Jati, Wonokromo, Bantul. Dengan dalih mencari gerilyawan, kemudian melakukan intimidasi terhadap rakyat yang ditemui. Mereka dipaksa menunjukkan sarang gerilyawan. Jika tetap bungkam tidak jarang mereka disiksa,

rumahnya dibakar, dan bahkan ada yang sampai dibunuh.

Meski demikian rakyat dan pejuang tetap setia pada perjuangan. Penyergapan, penghadangan dan sabotase terhadap patroli Belanda terus berlangsung. Pada tanggal 19 Februari 1949 di Dusun Mrisi, Kasihan, Bantul gerilyawan TNI Batalyon Sardjono pimpinan Mayor Sardjono melakukan penghadangan terhadap patroli pasukan Belanda. Dalam peristiwa tersebut sebuah bran carier dan sebuah truk Belanda meledak sehingga 13 orang serdadu Belanda tewas dan 4 orang lainnya mengalami luka-luka.

Dalam menghadapi pasukan Belanda, kadang harus dengan sabotase. Salah satunya adalah sabotase jembatan Duwet yang melintas di atas Sungai Progo yang menghubungkan wilayah Kulon Progo dengan Kabupaten Sleman. Peristiwa ini terjadi pada masa perang kemerdekaan kedua (1948-1949) guna melindungi para pejabat tinggi RI yang mengungsi di daerah Kalibawang dan Samigaluh. Dengan adanya sabotase jembatan tersebut selamatlah markas-markas perjuangan yang ada di wilayah Kalibawang dan Samigaluh sampai dengan Yogyakarta kembali ke tangan RI pada tanggal 29 Juni 1949. Belanda hanya dapat menembusnya dengan tembakan mortir yang dilancarkan dari markasnya di Cebongan.

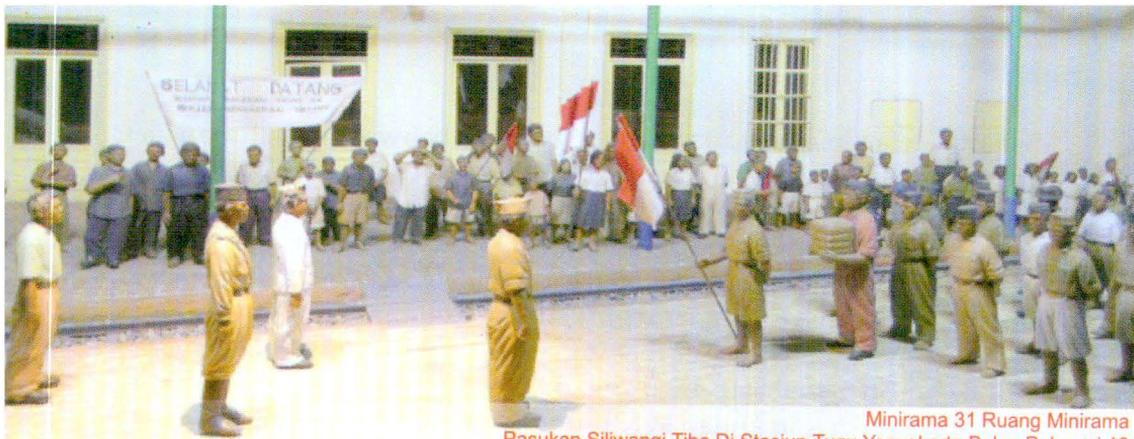
Pada masa revolusi fisik peranan desa sungguh besar. Di samping dipergunakan sebagai markas perjuangan, desa-desa juga berfungsi sebagai gudang logistik pasukan gerilyawan. Di desa-desa banyak diselenggarakan dapur umum untuk menyediakan makanan bagi para pejuang. Salah satu dapur umum adalah dapur umum yang diselenggarakan di rumah Bapak Kariyo Utomo di Dusun Banaran, Banjarasri, Samigaluh, Kulon Progo. Dapur umum ini harus menyediakan kebutuhan makan para gerilyawan yang jumlahnya kurang lebih 150 orang. Pimpinan dapur umum adalah Ny. Kariyo Utomo dibantu oleh ibu-ibu di daerah tersebut antara lain Sutilah, Rujiah, Rubinah, Sadirah, Inem, Rubinem dll.

Sementara itu permasalahan yang terjadi antara Indonesia dan Belanda sudah menjadi agenda Dewan Keamanan PBB. Di pihak lain

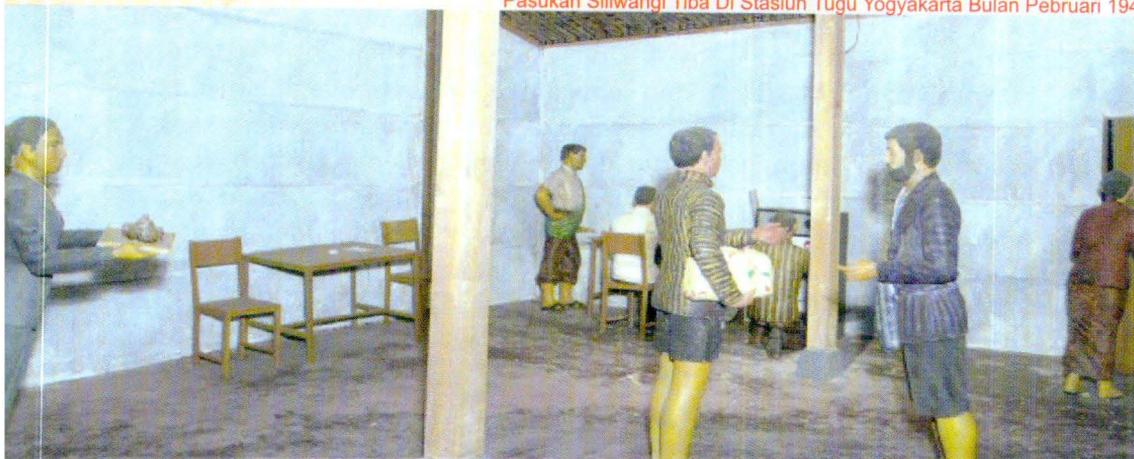
Belanda telah menyebarkan kabar bohong bahwa RI telah hancur bersama angkatan perangnya. Perlawanan-perlawanan yang terjadi hanya dianggap merupakan ulah para teroris belaka. Berita bohong itu akhirnya didengar oleh Sri Sultan HB IX melalui radio kasultanan yang tidak disegel oleh Belanda. Untuk membongkar kebohongan Belanda tersebut perlu dibuktikan kebenarannya dengan diadakannya serangan besar-besaran yang dilakukan pada siang hari. Untuk itu Sri Sultan HB IX mengadakan pertemuan dengan Letkol Soeharto selaku komandan WKIII untuk membicarakan pelaksanaan Serangan Umum 1 Maret 1949. Sasaran serangan tersebut adalah markas Belanda di Gedung Agung, Kantor Pos, Benteng Vredeburg, Stasiun Tugu, Hotel Tugu dan sebagainya. Meski hanya dalam waktu 6 jam berhasil menguasai Yogyakarta, namun secara politik sangat besar artinya sehingga kedudukan Belanda menjadi terpojok dan bersedia mengadakan perundingan kembali. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari peranan pemancar radio PC 2 di Banaran Playen Gunung Kidul.

Akibat dari Serangan Umum 1 Maret 1949, Belanda giat mengadakan pengejaran terhadap gerilyawan ke desa-desa. Namun hal itu justru menjadi bumerang bagi mereka. Karena dengan melakukan konvoi ke daerah-daerah berarti menjadi sasaran empuk para gerilyawan. Seperti yang terjadi di Jembatan Piyungan Bantul pada bulan Maret 1949. TNI di bawah pimpinan Kapten Widodo berusaha menghambat laju konvoi tentara Belanda dengan memasang trek bom di bawah jembatan Piyungan Bantul, jalan menuju Wonosari. Tindakan konvoi Belanda dalam jumlah besar ini dimaksudkan untuk pamer kekuatan (*show of force*) setelah dipermalukan oleh TNI dan para gerilyawan dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

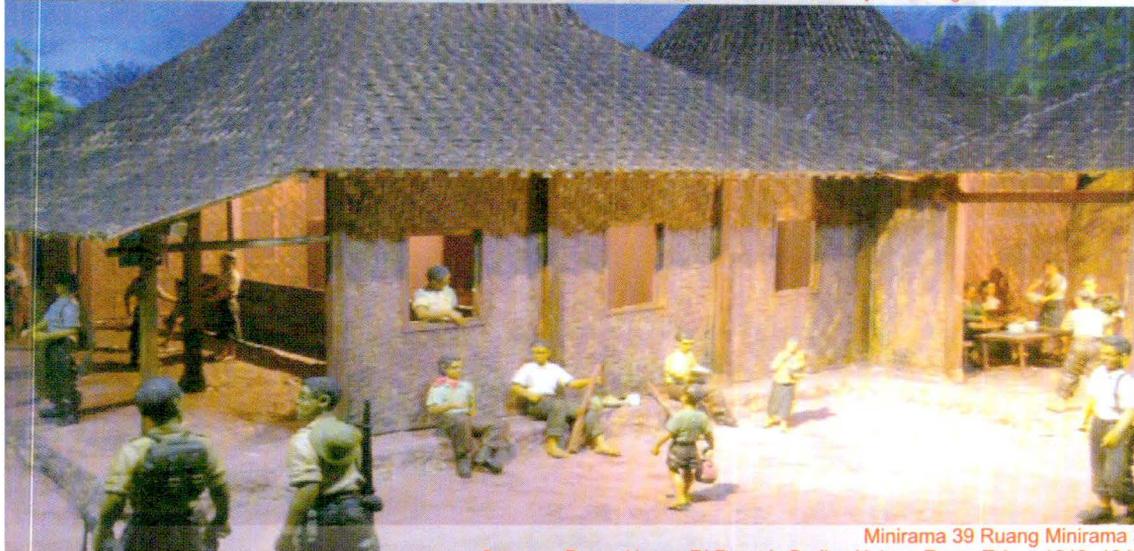
Sementara itu, posisi Belanda di meja perundingan PBB semakin terjepit. Akhirnya dengan terpaksa bersedia membuka perundingan kembali dengan Indonesia setelah macet cukup lama. Perundingan tersebut dikenal dengan Perundingan Roem Roeyen



Minirama 31 Ruang Minirama
Pasukan Siliwangi Tiba Di Stasiun Tugu Yogyakarta Bulan Pebruari 1948



Minirama 35 Ruang Minirama I
Sepak Terjang Para Pejuang Radio Gerilya P2 Di Banaran Playen Gunung Kidul Tahun 1948-1949



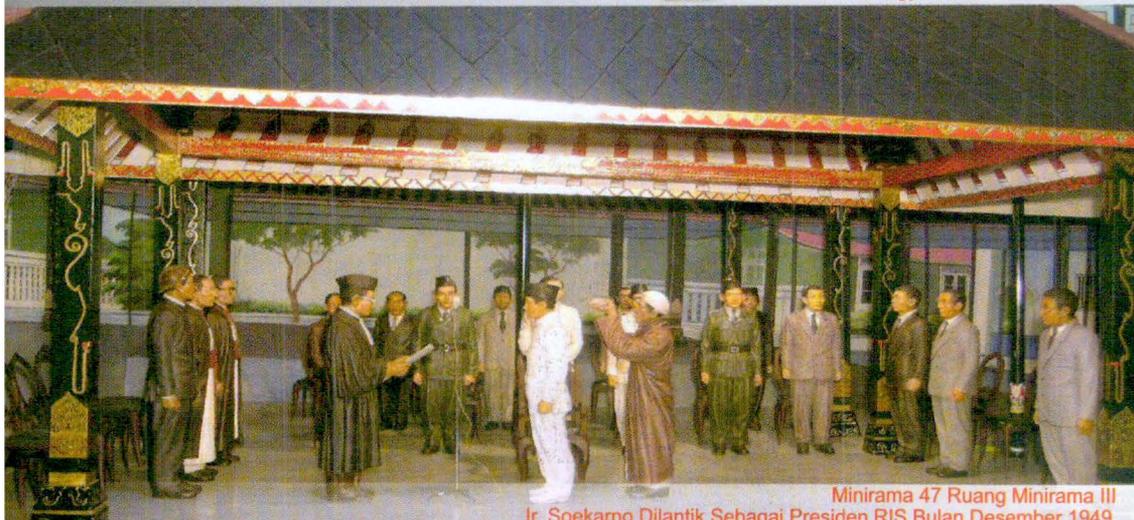
Minirama 39 Ruang Minirama I
Gubernur Dan Menteri Di Depan Gedung Kotabaru Bantul Tahun 1948-1949



Minirama 45 Ruang Minirama III
Pangsar Jenderal Soedirman Masuk Kota Yogyakarta Bulan Juli 1949



Minirama 46 Ruang Minirama III
Drs. Mohammad Hatta Membuka Konferensi Inter Indonesia di Yogyakarta Bulan Juli 1949



Minirama 47 Ruang Minirama III
Ir. Soekarno Dilantik Sebagai Presiden RIS Bulan Desember 1949



Khendhir Dhalung Untuk Memasak Telur Bagi Pangsar Soedirman Ketika Bermalam Di Karang Duwet Gunung Kidul Bulan Desember 1948



Topi Baja Model Inggris Dipakai Oleh Pejuang Anshor Pada Mara Revolusi Fisik 1948-1949 Dalam Kesatuan Laskar Hisbulla



Mesin Jahit Engkel Tangerang Dipakai Untuk Menjahit Pakaian TNI Dan Gerilyawan Di Markas Perjuangan Banaran Banjarasri Samigaluh Kulon Progo Tahun 1948-1949



Perlengkapan Minum Dipakai Oleh Pangsar Jenderal Soedirman Ketika Beristirahat Di Dusun Krejo Gunung Koti Dalam Rangka Kembali Masuk Kota Yogyakarta Bulan Juli 1949

yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Hasil perundingan antara lain : ibukota RI dikembalikan ke Yogyakarta, para pemimpin RI yang ditawan sejak 19 Desember 1948 dikembalikan, serta sepakat akan dilaksanakan KMB. Untuk merealisasi semua itu maka Yogyakarta harus dikosongkan dari pasukan Belanda.

Pada tanggal 10 Mei 1949, Komandan Brigade T Kolonel Van Langen memerintahkan kepada pasukannya yang berada di Yogyakarta untuk menghindari pertempuran dengan pasukan RI. Selanjutnya Menteri Negara Koordinator Keamanan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX memerintahkan kepada komandan TNI di Yogyakarta untuk menghindari pertempuran dengan Belanda.

Sementara itu pada tanggal 29 Mei 1949 ada pengumuman dari komandan Wehrkreise III Brigade X/Divisi III bahwa mulai tanggal 29 Mei 1949 berlaku gencatan senjata antara pihak tentara Belanda dengan RI yang telah berperang sejak 19 Desember 1948. Oleh karena itu Letda Alijadi komandan TP di Sleman Utara berangkat ke Balong menghadap atasannya untuk mendapatkan kejelasan berita tersebut. Namun tiba-tiba datang laporan bahwa ada pasukan Belanda bergerak dari selatan menuju desa Ngetiran di mana desa tersebut menjadi markas TP. Karena itu Sersan Suwono sebagai Komandan Regu I mengambil alih tugas pimpinan dibantu oleh Harsono. Namun setelah diladeni ternyata pasukan Belanda tersebut berjumlah 2 kompi. Karena terjepit maka anggota TP dapat dihancurkan oleh Belanda dan pasukannya yang berjumlah 8 orang seluruhnya gugur di palagan Rejodani pada tanggal 29 Mei 1949. Mereka antara lain : Harsono, Suwono, Sukardi, Suroyo, Supanoto, Daryono, Soenarto dan Alibasah, gugur sebagai kusuma bangsa dalam membela kemerdekaan RI.

Sementara itu, sebagai tindak lanjut dari perundingan Roem Royen, pada tanggal 23 Juni 1949 ada berita dari Pihak Belanda yang memberitahukan kepada pihak RI di Yogyakarta, bahwa tentara Belanda akan ditarik dari Yogyakarta mulai tanggal 24 Juni 1949 dari Pos Wonosari. Penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta akan

dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 1949 yang diatur dalam empat tahap mulai dari selatan ke utara dan keluar kota ke jurusan Magelang.

Oleh karena itu sejak tanggal 24 Juni 1949 dilakukan penarikan mundur tentara Belanda dari Yogyakarta dan berakhir pada tanggal 29 Juni 1949. Selanjutnya diikuti dengan masuknya TNI dan gerilyawan ke dalam kota. Salah satu pasukan TNI yang masuk dalam kota pada tanggal 29 Juni 1949 adalah Pasukan MA (Militer Akademi) yang dipimpin oleh Letnan Wiyogo Atmodarminto. Sebelumnya mereka menyiapkan diri di Gejayan. Kemudian di Gejayan dijemput oleh Sri Paku Alam VIII. Pukul 12.00 pasukan mulai masuk kota didampingi Sri Paku Alam VIII dengan rute Pelemkecut Demangan Pengok dan kemudian menempatkan pos komandonya untuk sementara di Rumah Sakit Pusat (Bethesda sekarang) dan dilanjutkan dengan upacara pengibaran bendera Merah Putih di halaman rumah sakit tersebut.

Setelah Yogyakarta telah benar-benar kembali ke tangan pemerintah RI, dan kondisinya aman serta terkendali, maka para pemimpin RI tiba di Yogyakarta dari pengasingannya. Pada hari Rabu Kliwon, tanggal 6 Juli 1949, rombongan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Drs. M. Hatta, Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim, menteri Pendidikan Ali Sastroamidjojo, Ketua delegasi Muhammad Roem, Kepala Staf Angkatan Perang Suryadi Suryadarma, beserta para pemimpin lainnya tiba di Lapangan Terbang Maguwo (Adisucipto, sekarang) dengan pesawat milik UNCI (United Nations Commission for Indonesia). Selanjutnya rombongan segera menuju ke Gedung Agung. Di Gedung Agung rombongan disambut dengan upacara sederhana.

Setelah para pemimpin negara kembali ke Yogyakarta, sekarang tiba gilirannya Pangsar Jenderal Soedirman yang turun dari gerilya dan masuk Kota Yogyakarta. Setelah melakukan perjuangan gerilya dengan diikuti oleh anak buahnya yang setia sejak tanggal 19 Desember 1948, setelah mendapat surat dari Sri Sultan HB IX dan

Kolonel Gatot Subroto, pada tanggal 10 Juli 1949 Beliau masuk kota Yogyakarta. Pangsar Jenderal Soedirman langsung menuju Gedung Agung dan bertemu dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta serta Kolonel TB. Simatupang. Setelah selesai menghadap Presiden dan memberikan laporan, kemudian Pangsar Jenderal Soedirman menuju ke Alun-alun Utara untuk menerima devile penyambutan. Pada waktu itu berlangsung parade kebesaran dari pasukan TNI dan barisan pejuang lainnya.

Hasil keputusan dari persetujuan Roem Royen yang lain adalah sepakat untuk dilaksanakannya KMB. Oleh karena itu sebelum mengikuti KMB perlu diadakan pendekatan terlebih dulu antara RI dengan BFO (*Bijeenkomst Voor Federal Overleg atau Pertemuan Musyawarah Federal*) terutama dalam hubungannya dengan pembentukan negara RIS. Bertolak dari pemikiran itulah maka Konferensi Inter Indonesia (KII) Pertama diselenggarakan. Konferensi diselenggarakan pada tanggal 19 sampai dengan 22 Juli 1949 di Hotel Toegoe Yogyakarta Jl. Pangeran Mangkubumi Yogyakarta. Pada Konferensi Inter Indonesia Tahap Pertama ini membicarakan masalah pembentukan RIS (Republik Indonesia Serikat) terutama tentang susunan dan hak-hak negara bagian atau otonom, bentuk kerja sama RIS dengan Belanda dalam perserikatan Uni, dan masalah kewajiban RIS dan Belanda akibat penyerahan kekuasaan.

Selanjutnya Konferensi Inter Indonesia dilanjutkan kembali di Jakarta pada tanggal 31 Juli s.d. 3 Agustus 1949 yang dipimpin oleh Perdana Menteri Drs. Mohammad Hatta. Masalah yang dibahas adalah masalah pokok yang telah disetujui di Yogyakarta. RI dan BFO setuju untuk membentuk Panitia Persiapan Nasional yang bertugas menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan sesudah Konferensi Meja Bundar (KMB). Setelah masalah intern antara RI dan BFO telah terjadi kata sepakat maka kini bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan telah siap menghadapi KMB. Pada tanggal 4 Agustus 1949 telah diangkat delegasi RI untuk perundingan di KMB dibawah pimpinan Drs. Mohammad Hatta. Sedangkan Delegasi BFO dipimpin oleh

Sultan Hamid II dari Pontianak.

KMB (Konferensi Meja Bundar) berlangsung di Den Haag tanggal 23 Agustus s.d. 2 Nopember 1949. Delegasi RI diketuai oleh Drs. M. Hatta, delegasi Belanda diketuai oleh Mr. Van Maarseveen sedangkan UNCI (United Nations Commission for Indonesia) diketuai oleh Chritchley. Setelah melalui pembicaraan yang rumit, pada tanggal 29 Oktober 1949 dilakukan penandatanganan Piagam Persetujuan tentang konstitusi RIS di kota Scheveningen, Nederland. Pada tanggal 2 Nopember 1949 dilangsungkan upacara penutupan KMB di Riderzaal, Den Haag dengan hasil ketentuan bahwa Kedaulatan Belanda di Indonesia akan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.

Selanjutnya setelah diadakan pemilihan presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno yang berlangsung pada tanggal 15 dan 16 Desember 1949, Ir. Soekarno dilantik sebagai presiden RIS pada tanggal 17 Desember 1949 di Bangsal Manguntur Tangkil Sitihinggil Kraton Kasultanan Yogyakarta. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Mr. Kusumah Atmadja dengan disaksikan para undangan yang hadir antara lain : Drs. Mohammad Hatta, Mr. Muhammad Roem, Anak Agung Gde Agung, Mr. Sugiyo Pranoto, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan Sri Paku Alam VIII. Hadir pula wakil-wakil dari negara bagian termasuk RI Yogyakarta, pejabat Belanda dan wakil dari UNCI (United Nations Commission for Indonesia).

Setelah KMB selesai, dengan hasil terpenting adanya pengakuan kedaulatan RIS dari Belanda, maka pada tanggal 27 Desember 1949 baik di Jakarta maupun di Belanda dilakukan upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan. Di Jakarta dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan A.H.J. Lovink masing-masing mewakili RIS dan Belanda. Sedangkan di Belanda penandatanganan dilakukan oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Mr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. AMJA. Sassen selaku wakil Belanda dan Ketua delegasi RIS Drs. M. Hatta.

Sehari kemudian, yaitu pada tanggal 28 Desember 1949

Ir. Soekarno meninggalkan Yogyakarta dan bertolak ke Jakarta untuk memangku jabatan barunya sebagai Presiden RIS. Sebelumnya berkenan menuliskan kesan atas Yogyakarta, bahwa “Yogyakarta menjadi termashur oleh karena jiwa kemerdekaannya. Hidupkanlah terus jiwa kemerdekaan itu.”

4. Pameran Tetap Minirama IV

Ruang pameran tetap mimirana IV merupakan ruang pameran tetap yang menyajikan koleksi-koleksi museum yang terkait dengan peristiwa-peristiwa bersejarah di Yogyakarta sejak tahun 1951 sampai dengan tahun 1974. Garis besar alur cerita dalam ruang tata pameran ini adalah sebagai berikut :

RIS yang telah berdiri sejak adanya pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, belum genap berusia delapan minggu sudah digoncang oleh adanya aspirasi masyarakat yang menginginkan tetap eksisnya NKRI. Hingga bulan Mei 1950 hanya tinggal tiga negara bagian di Indonesia yaitu RI, NIT, NST. Melihat desakan rakyat untuk segera kembali ke NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) maka setelah RIS, NST dan NIT berunding diputuskan bahwa untuk mewujudkan keinginan rakyat untuk kembali ke NKRI, harus diadakan pembicaraan antara RIS dan RI. RIS diwakili oleh Drs. M. Hatta dan RI diwakili oleh Dr. Halim, tanggal 19 Mei 1950 kedua belah pihak (RIS dan RI) telah menandatangani kesepakatan terbentuknya NKRI. Oleh karena itu presiden segera mengeluarkan UU No. 20/1950, tanggal 14 Agustus 1950. Keesokan harinya, 15 Agustus 1950 Mr. Asaat menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Dan saat itu pula negara kembali ke bentuk NKRI.

Dengan demikian kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi berubah. Melalui UU No. 3/1950 kedudukan DIY berubah dari ibukota RI menjadi Daerah Istimewa yang bestatus Swatantra Satu. Dengan demikian mengandung konsekuensi akan dilanjutkannya usaha-usaha demokratisasi di Yogyakarta. Oleh karena itu dibentuklah badan-badan pemerintah seperti DPRD

(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang anggotanya dipilih melalui pemilu.

Selanjutnya di Yogyakarta diadakan Pemilu yang berlangsung dari tanggal 16 Juli - 10 Nopember 1951 dengan sistem bertingkat. Artinya rakyat dalam memilih anggota DPR/DPRD harus melalui "wali pemilih". Setiap satu orang wali pemilih mewakili 250 jiwa. Kemudian para anggota DPRD DIY hasil pemilihan umum bertingkat ini pada tanggal 24 Desember 1951 dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Mr. Iskaq Cokrohadi Surya di Gedung DPRD Jl. Malioboro.

Pemilu tahun 1951 di DIY mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain. Mereka masing-masing mengirimkan tim peninjau. Kantor Pemilihan Pusat mengirim Mr. Subagyo Resodipuro dan Ny. Pujobuntoro. Sedangkan DPRS mengirim Hadikusumo, Amels, Mari Yara, Moch Tauchid, Andi Gappa dan Meizir Achmadiyah. Daerah-daerah lain yang mengirim peninjau antara lain Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Pada tahun 1959, suatu kehormatan besar diterima oleh Kota Yogyakarta, karena pada tahun itu Yogyakarta dipercaya sebagai tempat diselenggarakannya Konferensi Rencana Kolombo ke XI. Konferensi Rencana Colombo di Yogyakarta ini terbagi dalam dua bagian, yaitu Konferensi Tingkat Ahli yang berlangsung tanggal 26 Oktober - 6 Nopember 1959, dan Konferensi Tingkat Menteri yang berlangsung tanggal 11 - 14 Nopember 1959. Penunjukkan Yogyakarta sebagai penyelenggara dalam Konferensi Rencana Colombo 1959 ini berdasarkan pertimbangan bahwa di Yogyakarta sampai saat itu telah diselenggarakan dua buah konferensi internasional yaitu International Rubber Study Group Conference bulan Juli 1957 dan ECAFE Conference bulan Oktober 1957. Atas dasar tersebut maka Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyanggupkan diri untuk menerima tugas sebagai penyelenggara Konferensi Rencana Colombo tahun 1959. Konferensi ini

dimaksudkan untuk membahas rencana pembangunan ekonomi dengan sistem pemberian bantuan bagi negara-negara persemakmuran di Asia Selatan dan Tenggara secara kerjasama internasional dalam hal pembangunan dan perkembangan ekonomi.

Sementara itu melihat perkembangan yang terjadi di Indonesia, sejak tahun 1950 hingga tahun 1958 banyak terjadi pergolakan di daerah. Waktu itu disintegrasi bangsa mengancam keutuhan NKRI. Beberapa peristiwa yang terjadi cenderung bersumber pada permasalahan dasar hukum di Indonesia. Bertolak dari fenomena tersebut maka esensi dari Pancasila perlu dibicarakan. Oleh karena itu para pemuda yang tergabung dalam Liga Pancasila ingin menyumbangkan pemikirannya terhadap bangsa dan negara kearah pengisian Pancasila dengan mengadakan Seminar Nasional Pancasila yang pertama di Yogyakarta. Mereka berusaha bersama-sama dengan golongan masyarakat Indonesia untuk mengembangkan ajaran Pancasila dan memperkaya perbendaharaan dengan memohon kepada para ahli untuk mengupas persoalan yang menyangkut kenegaraan dan kemasyarakatan dari segi Pancasila. Seminar berlangsung tanggal 16 - 20 Pebruari 1959 di Sasana Hinggil Dwi Abad Yogyakarta, dan diketuai oleh Drs. Imam Pratignya. Diselenggarakannya seminar ini bertujuan untuk : merumuskan ajaran Pancasila dalam segala bidang kenegaraan dan kemasyarakatan, serta memperdalam ajaran yang timbul dari Pancasila.

Setelah seminar ditutup, tanggal 21 Pebruari 1959 Ir. Soekarno memberikan kuliah tentang keadilan sosial dan demokrasi terpimpin di Sitinggil Yogyakarta. Sore harinya di Alun-alun Utara Yogyakarta berlangsung rapat akbar menuntut kembali ke UUD 1945. Berkenan menyampaikan sambutan dalam rapat akbar tersebut antara lain : Prof. Mr. Muhammad Yamin, H. Roeslan Abdul Gani, Chaerul Saleh serta Presiden Soekarno.

Pada masa demokrasi liberal dimana sistem pemerintahan menggunakan sistem kabinet parlementer, salah satu program yang

selalu muncul dalam setiap kabinet namun selalu gagal mencapai tujuannya adalah masalah Irian Barat. Usul-usul yang diajukan oleh Belanda dalam setiap perundingan masalah Irian Barat selalu tidak bisa diterima oleh pemerintah RI. Dari waktu ke waktu ketegangan semakin memuncak. Akhirnya setelah berbagai upaya dilakukan dan gagal, maka dicetuskanlah TRIKORA.

Trikora dicetuskan oleh Presiden Soekarno di Yogyakarta (Alun-alun Utara Yogyakarta) pada tanggal 19 Desember 1961. Pemilihan waktu dan tempat dicetuskannya Trikora ini dilakukan oleh Mohammad Yamin. Tanggal 19 Desember merupakan tanggal di saat Belanda melakukan pengeboman atas kota Yogyakarta dalam agresi militer keduanya. Dan Kota Yogyakarta dipilih untuk mengengang usaha pengusiran Belanda dari Jakarta yang dilakukan oleh Sultan Agung tahun 1628 dan 1629. Trikora tersebut berisi antara lain gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial, kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat dan bersiaplah untuk mobilisasi umum.

Melihat keadaan tersebut, maka perlu diadakan perundingan lanjutan. Pada tanggal 15 Agustus 1962 persetujuan New York berhasil ditandatangani oleh Menlu Subandrio dan Van Royen serta Schuurman dengan disaksikan oleh sekjen PBB, U Than. Akhirnya campur tangan PBB dengan UNTEA-nya membuahkan hasil yang gemilang. Pada tanggal 1 Mei 1963, Irian kembali ketangan pemerintah RI. Selanjutnya sesuai dengan persetujuan New York, pada tanggal 14 Juli s.d. 2 Agustus 1969 diadakan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat). Hasil Pepera Irian tetap menjadi bagian dari RI. Pepera itu kemudian diterimakan kepada Majelis Umum PBB dalam persidangan tahun 1969.

Sementara itu meski kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang tangguh dapat diterima oleh sebagian besar rakyat Indonesia, namun PKI salah satu partai politik terbesar pada tahun 1964 berusaha memutarbalikkan fakta. Dasar-dasar komunis hendak ditanamkan di Indonesia oleh partai tersebut. Cara-cara

konstitusional telah ditempuh dengan cara memasukkan tokoh-tokoh komunis dalam aparaturnya pemerintahan melalui pemilu. Disamping itu cara-cara yang inkonstitusional juga dilaksanakan dengan teror dan pembunuhan. Seperti yang terjadi di Jakarta pada tanggal 30 September 1965.

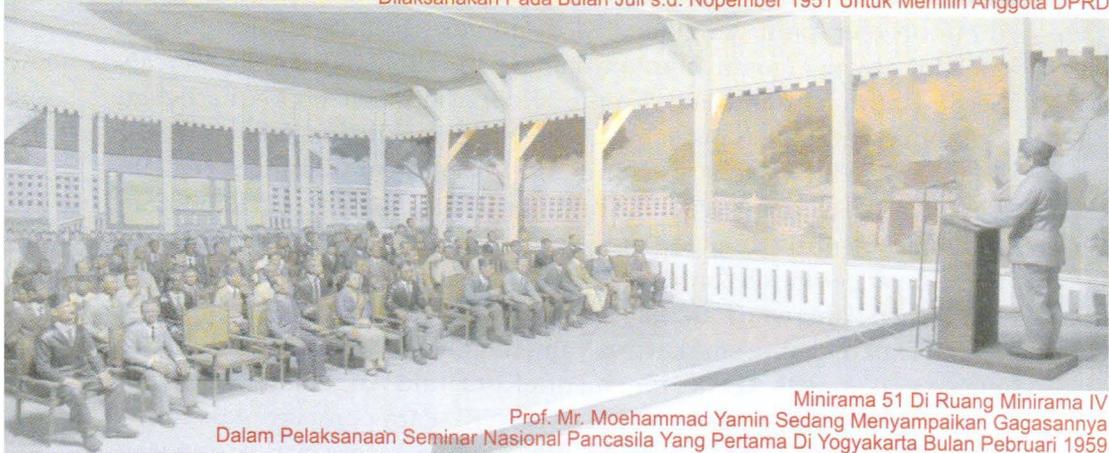
Untuk mencapai tujuan politiknya PKI mengadakan penculikan dan pembunuhan terhadap para pucuk pimpinan Angkatan Darat. Aksi itu pun kemudian juga berdampak di Yogyakarta. Penculikan dan pembunuhan para pucuk pimpinan TNI AD di Yogyakarta juga terjadi. Korbannya adalah Danrem Kolonel Katamsa dan Kasrem Letkol Soegiyono. Mereka diculik oleh pemberontak dan kemudian dibunuh oleh para pengkianat di Kompleks Batalyon L Kentungan melalui algojo-algojanya antara lain Sertu Alip Toyo, Serda Darmo, Serda Katimin dan Pelda Kamil. Kemudian jenazah kedua beliau dikubur dalam satu liang. Jenazah mereka berhasil diangkat tanggal 21 Oktober 1965, dan sehari kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta dalam upacara kebesaran militer. Untuk mengenang peristiwa tersebut maka dilokasi terjadinya pembunuhan dibangun sebuah monumen dengan nama Monumen Pahlawan Pancasila.

Dalam waktu singkat apa yang terjadi di Jakarta dapat dikuasai oleh pasukan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) dan kesatuan lain yang masih setia terhadap RI. Para pemberontak kocar-kacir dan meninggalkan Jakarta. Setelah Jakarta, sasaran penupasan pemberontak PKI adalah Jawa Tengah dan DIY. Operasi penumpasan dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edie Wibowo.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menyambut kedatangan pasukan RPKAD di Yogyakarta diselenggarakan rapat kebulatan tekad untuk membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Rapat akbar dilaksanakan tanggal 20 Oktober 1965 di Alun-alun Utara Yogyakarta. Hadir pula dalam rapat akbar tersebut Danrem 072 Kolonel Widodo yang sekaligus sebagai inspektur, dan dari Pemda DIY yang diwakili oleh Badan Pengurus Harian masing-masing H.



**Minirama 49 Di Ruang Minirama IV
Pelaksanaan Pemilu Pertama Di Yogyakarta Pada Tahun 1951
Dilaksanakan Pada Bulan Juli s.d. Nopember 1951 Untuk Memilih Anggota DPRD**



**Minirama 51 Di Ruang Minirama IV
Prof. Mr. Moehammad Yamin Sedang Menyampaikan Gagasannya
Dalam Pelaksanaan Seminar Nasional Pancasila Yang Pertama Di Yogyakarta Bulan Pebruari 1959**



**Minirama 53 Di Ruang Minirama IV
Penggalian Jenazah Pahlawan Revolusi Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Soegiyono
Di Komplek Batalyon L Kentungan Yogyakarta Pada Bulan Oktober 1965**



Kamera Yashica Mat - 124
Merupakan Kamera Yang Dipakai Oleh Anggota CWP (Corps Wartawan Perang)
Moslyono Ketika Mengikuti Batalyon F Dalam Penumpasan PKI Di Jawa Tengah Tahun 1965-1966



Replika Batu Dan Kunci Mortir
Benda Asli Dari Batu Dan Kunci Mortir Tersebut Dipergunakan Oleh Para Algojo PKI
Untuk Membunuh Dua Pahlawan Revolusi Kolonel Katamsa Dan Letkol Soegiyono Tahun 1965



Foto Pemakaman kolonel Katamsa dan Letkol Soegiyono
Setelah Diketemukan Jenazahnya Pada Tanggal 20 Oktober 1965 Selanjutnya
Kolonel Katamsa Dan Letkol Soegiyono Dimakamkan Di TMP Kusumanegara Yogyakarta Dengan Upacara Militer

Tolchah Mansur dan HJ. Sumarta. Dalam pidatonya, Kolonel Widodo menyampaikan Surat Keputusan larangan kegiatan PKI dan ormas-ormasnya serta Baperki di wilayah Korem 072. Pengumuman tersebut merupakan hal yang pertama kali terjadi di Indonesia, secara resmi dan diumumkan di tempat terbuka tentang larangan kegiatan PKI. Selanjutnya penumpasan dan pengejaran terhadap mereka yang terlibat dalam G 30 S / PKI dilakukan oleh aparat keamanan. Hal ini mengakibatkan mereka yang komunis tidak berani secara terang-terangan dan hanya melakukan teror saja, itupun bila mungkin.

Terjadinya berbagai gejolak di Indonesia sejak tahun 1950 sampai dengan 1965 adalah bersumber pada adanya krisis ideologi. Perbedaan pemahaman prinsip yang berakibat terjadinya konflik vertikal bersumber pada hal dasar yaitu landasan ideologi. Oleh karena itu adanya penyatuan paham yang kompak dalam satu negara tentang ideologinya sangat diperlukan.

Dengan latar belakang pengalaman sejarah tersebut, maka dalam peringatan Dies Natalis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta XXV, Presiden Soeharto pada tanggal 19 Desember 1974 berkenan menyampaikan amanatnya tentang pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Ideologi Pancasila. Pada tahun 1977, gagasan tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang telah terhimpun diajukan ke Sidang Umum MPR untuk dibahas dan ditetapkan. Akhirnya MPR dengan Tap MPR No. II/MPR/ 1978 menetapkan tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang kemudian lebih populer dengan P4.

Sebagai konsekuensinya maka P4 harus dimasyarakatkan. Maka pada tanggal 1 Oktober 1978 di Istana Bogor Presiden Soeharto mencanangkan awal gerakan untuk memahami kembali gagasan dasar kita. Dan akhirnya penataran P4-pun dimulai. Tahap demi tahap, P4 ditartarkan kepada semua golongan dan lapisan rakyat Indonesia. Mulai dari Pegawai Negeri Sipil, Pemimpin Organisasi dan Partai Politik, Pengusaha, Mahasiswa dan Pelajar. Bahkan sampai masyarakat umum.

Setelah kurang lebih dua dasa warsa berjalan, perubahan-perubahan banyak terjadi. Pancasila sebagai motor pengarah proses demokratisasi segenap aspek kehidupan telah gagal dalam pelaksanaannya. Hal ini mengharuskan diadakan reformasi yang mengarah pada deskripsi dan fungsi dari kandungan di dalamnya. Reinterpretasi dari kandungan yang terdapat dalam Pancasila terhadap pandangan hidup bangsa Indonesia sangat diperlukan supaya gambaran tentang bentuk kehidupan yang dianjurkan dan sekaligus mempersatukan dapat diwujudkan oleh masyarakat secara tepat. Bertolak dari situlah akhirnya pedoman pengamalan dari Pancasila tersebut perlu diadakan reformasi.

Pancasila sebagai mana yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945, perlu ditegaskan posisi dan peranannya dalam kehidupan bernegara. Ketetapan MPR RI nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, materi muatan dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara perlu dipertegas lagi.

Oleh karena itu berdasarkan keputusan Pimpinan MPR nomor 10/PIMP/1998 diselenggarakanlah Sidang Istimewa MPR RI. Sidang berjalan sejak tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998. Materi yang dibahas adalah Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Pencabutan dan Penggantian Ketetapan MPR RI nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR RI. Hasil dari sidang tersebut menetapkan bahwa berdasarkan Tap MPR nomor XVIII/MPR/1998 telah dicabut Tap MPR nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Demikianlah, peristiwa demi peristiwa terjadi mengisi lembaran-lembaran album sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peninggalan-peninggalan sejarah baik berupa material maupun informasi menjadi "kenang-kenangan" (*souvenir*) masa silam yang harus dimiliki dan

diketahui oleh generasi muda. Kenang-kenangan tersebut tidak akan punya banyak manfaat, jika dari padanya tidak dimaknai kembali. Pemaknaan kembali itulah yang menjadi hal pokok bagi museum terkait dengan koleksi-koleksi materi pamerannya. Pemaknaan tentang kelampauan dalam kontek kekinian merupakan sebuah langkah antisipatif terhadap permasalahan yang timbul di masa depan. Pola pikir futuristik inilah yang harus dimiliki oleh generasi muda agar tetap eksis di masa yang akan datang.

BAB V PENUTUP

Setelah menyimak uraian sekilas visualisasi peristiwa-peristiwa bersejarah di Yogyakarta yang disajikan dalam ruang pameran Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebutan sebagai “Kota Perjuangan” bagi Kota Yogyakarta memang sudah layak dan sepantasnya. Sejarah telah mencatat bahwa Yogyakarta sejak masa merintis, mencapai, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan selalu tampil ke atas panggung sejarah. Ide-ide dan gagasan-gagasan baru banyak dimunculkan di Yogyakarta.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut merupakan momen historis yang sangat besar maknanya dalam menumbuhkan rasa cinta akan sejarah bangsa. Oleh karenanya harus ada suatu wadah tempat berlangsungnya komunikasi antara masa lampau dan masa sekarang. Sehingga “kelampauan” tersebut dapat menjadi kaca benggala bagi generasi masa kini dalam memantapkan jati dirinya sebagai bangsa guna menyongsong masa depan.

Masa lampau hanyalah akan berupa potret usang yang tak bermakna apapun, apabila dari padanya tidak dilakukan “*rethinking*” atau pemikiran kembali. Dari proses tersebut akan dapat ditemukan pesan secara berkesinambungan. Perubahan-perubahan yang terjadi dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya akan tampak adanya sebuah pola kecenderungan umum. Dari sanalah akhirnya proyeksi masa depan akan dapat dilihat sehingga sebuah generasi akan dapat melangkah secara bijak dalam menapaki masa depannya. Kelampauan masa silam hendaknya dapat dipandang dalam konsep kekinian.

Bertolak dari pemikiran seperti tersebut di atas maka dengan adanya Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta, kita semua dapat berharap :

1. Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta merupakan museum yang menempati bangunan bersejarah dimana nilai-nilai luhur banyak terkandung didalamnya, dapat dikenal, dimengerti dan diwarisi oleh

generasi penerus.

2. Kelampauan yang berkaitan dengan keberadaan Kota Yogyakarta, apapun bentuknya merupakan bagian dari pengalaman kolektif bangsa Indonesia. Oleh karena itu harus dapat dilestarikan dan diwariskan kepada generasi mendatang untuk mempertebal jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.
3. Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta sebagai salah satu sumber informasi, dapat melayani masyarakat untuk melakukan “perlawatan ke masa silam” melalui koleksi-koleksinya.
4. Berdirinya Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta perlu disambut positif. Peran serta masyarakat yang bersikap pro aktif dalam memanfaatkan museum sebagai wahana komunikasi masa sekarang dan masa lampau perlu direalisasikan. Dengan begitu rasa cinta akan sejarah dapat dipupuk sejak dini.
5. Dengan berkunjung ke museum masyarakat dapat mengetahui, mencermati, serta memahami makna yang terkandung dalam sajian materi koleksi di ruang pameran sehingga dapat merangsang aspirasi masyarakat guna mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang positif.
6. Pengunjung museum turut berperan serta dalam ikut membantu memelihara dan mempublikasikan keberadaan museum kepada masyarakat luas sehingga fungsi edukatif, rekreatif dan inspiratifnya dapat optimal.
7. Masyarakat dapat berperan pro aktif membantu tugas museum untuk menyelamatkan benda-benda bukti material peristiwa sejarah yang masih banyak berada di masyarakat.

Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta, adalah sebuah museum khusus sejarah perjuangan bangsa yang didirikan untuk melayani masyarakat tanpa adanya kategori-kategori tertentu. Oleh karena itu tidak ada alasan apapun untuk melarang masyarakat berkunjung ke Museum. Marilah kita kunjungi museum, dan manfaatkan museum seoptimal mungkin, selama masih ada kesempatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbi Sanit, Reformasi Politik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.
- Boediharjo, Peran Perhubungan Radio TNI-AU Dalam Perang Kemerdekaan, (Makalah) Disampaikan dalam rangka ceramah di Monumen Radio PC 2 di Banaran, Banaran, Playen, Gunung Kidul tanggal 18 Pebruari 1993.
- Daud Sinjal, Laporan Kepada Bangsa : Militer Akadei Yogyakarta, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Depdikbud, Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka, Jilid I, PT. Citra Lamtorogung Persada, Jakarta, 1985.
- , Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta, Peroyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Yogyakarta, 1977.
- Djamal Marsudi, dkk, Yogyakarta Benteng Proklamasi, Penerbit Barahmus DIY Perwakilan Jakarta, Jakarta, 1985.
- Hadisutjipto, S.Z, Drs., Gedung STOVIA Sebagai Cagar Sejarah, Depdikbud, Jakarta, 1966 (Cetakan ke IV)
- Hardi, Menarik Pelajaran Dari Sejarah, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 1998.
- MPR RI, Ketetapan-Ketetapan MPR RI Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998, PT. Pabelan, Jakarta, 1998.
- Moedjanto, G, Drs., Indonesia Abad Ke 20 Jilid I : Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggajati, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1992. (Cetakan Ke III).
- , Indonesia Abad Ke 20 Jilid II : Dari Perang Kemerdekaan sampai PELITA III, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1992. (Cetakan Ke III).
- Nagazumi Akira, Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, Budi Utomo

- 1908 1918**, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1989.
- Nani Mulyani, dkk, **50 Tahun Indonesia Merdeka 1965 1995**, PT. Citra Media Persada, Jakarta, 1995.
- Saleh, RHA, **Akademi Militer Tangerang dan Peristiwa Lengkong**, Yayasan Pustaka bekerjasama dengan Sebelas Maret University Press, Yogyakarta, 1994.
- Simbolon, Parakirti, T. **Menjadi Indonesia Buku I : Akar-akar Kebangsaan Indonesia**, Kompas-Grasindo, Jakarta, 1995.
- Soebagijo, I.N., **Perjuangan Pelajar IPI IPPI**, Balai Pustaka, Jakarta, 1987. (Cetakan I)
- Soedarsono, R.G., **Peranan Pelajar Dalam Perang Kemerdekaan**, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1985. (Cetakan I)
- Soetardono, Drs, Dkk., **Sewindu Monumen Yogya Kembali 1989 1997**, Yayasan Monumen Yogya Kembali, Yogyakarta, 1997.
- Sudirjo, Radik Utoyo, **Album Perang Kemerdekaan 1945 1950**, Almanak RI/BP. ALDA, 1983. (Cetakan VI)
- Suhardo Hatosprapto, **Kota Yogyakarta dan Benteng Vredeburg. Buku II, Rencana Pelestarian dan Pengembangan Benteng Vredeburg**, Yogyakarta, LSPK, 1976.
- Sulistyo Admodjo, S., **Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Nasional 1945 1949 ke I, Riwayat dan Perjuangan, Mengenang Almarhum Panglima Besar Jenderal Soedirman Pahlawan Besar**, Yayasan 10 Juli 1949 Pusat, Yogyakarta, 1988. (Cetakan II)
- Suryo Haryono, P, Drs, Dkk., **Monumen Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta**, Depdikbud, Jakarta, 1987.
- Sutrisno Kutoyo, **Sri Sultan Hamengu Buwono IX, Riwayat Hidup dan Perjuangan**, PT. Mutiara Sumber Widya Ofset, Jakarta, 1997.
- Tashadi, dkk, **Buku Kenangan 50 Tahun Republik Indonesia di**

Yogyakarta, Sebuah Lintasan Sejarah, Panitia Gabungan Peringatan HUT Ke 50 Kemerdekaan RI Bhakti Pertiwi Propinsi DIY, 1995.

-----, **Mengenal Sekilas Dalem Joyodipuran**, Depdikbud, Yogyakarta 1987.

-----, **Peranan Desa Dalam Perjuangan Kemerdekaan : Studi Kasus Keterlibatan Beberapa Desa di DIY Periode 1945 1949**, Depdikbud, Jakarta, 1992.

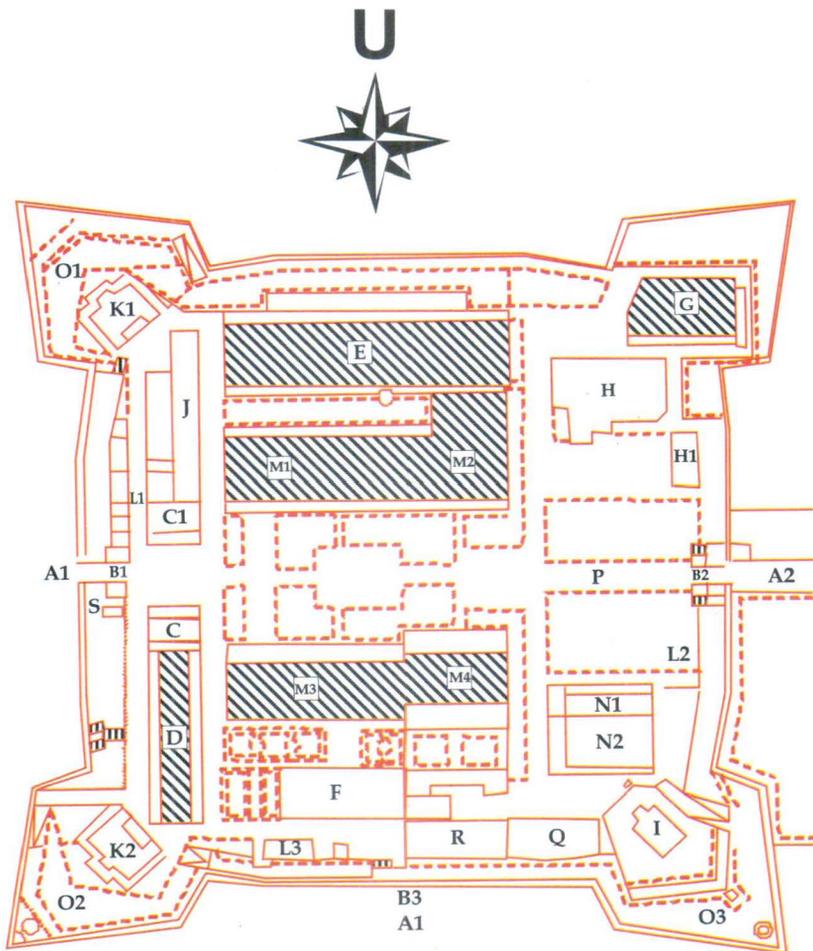
-----, **Sejarah Museum Benteng Yogyakarta**, Depdikbud, Museum Benteng Yogyakarta, 1994

Tim Penyusun Bahtera Jaya, **Album 97 Pahlawan Nasional**, Bahtera Jaya, Jakarta, 1994 (Cetakan VIII)

Yayasan 19 Desember 1948, **Perang Rakyat Semesta 1948 1949**, Balai Pustaka Jakarta, 1994 (Cetakan I)

LAMPIRAN

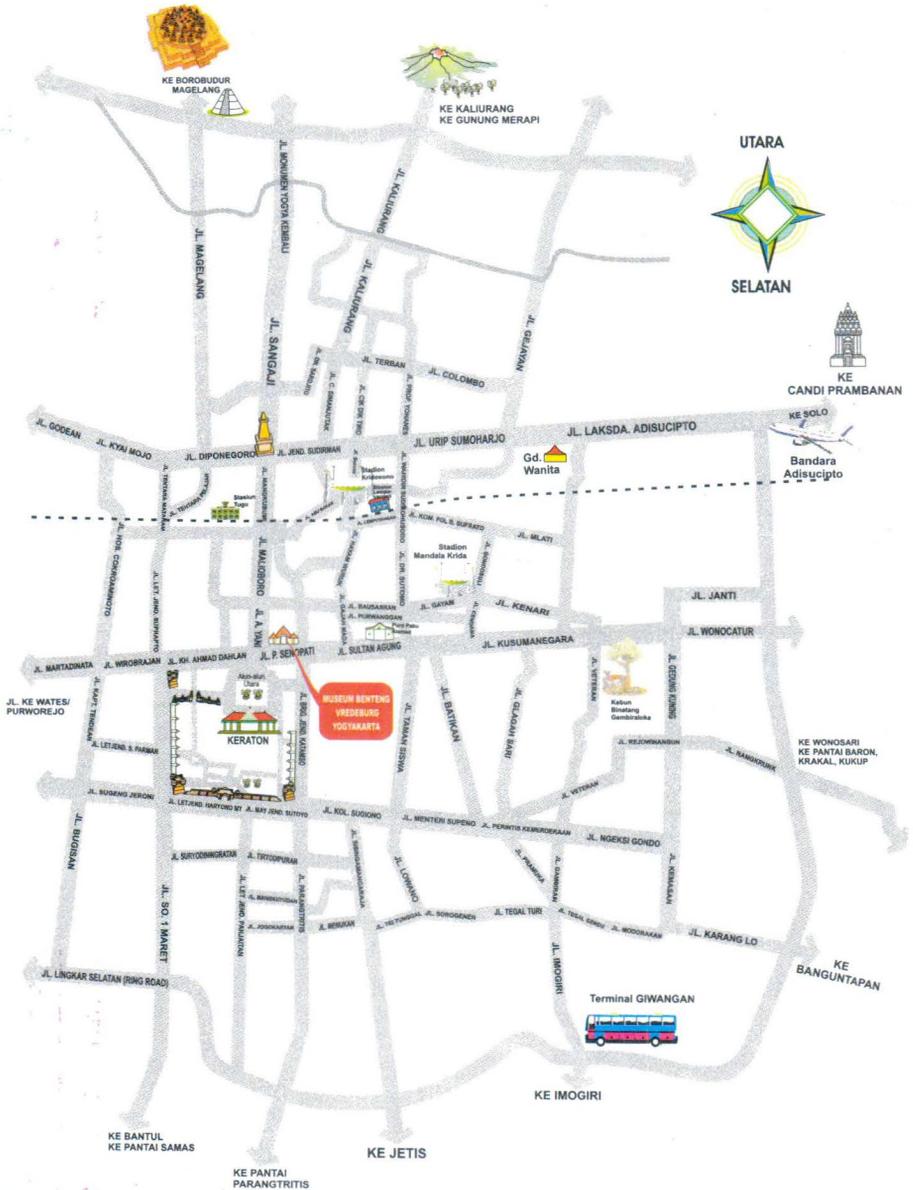
DENAH TATA RUANG MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA



KODE	FUNGSI SEKARANG	FUNGSI DULU
A1	Jembatan dan kolam utama barat	Jalan masuk dari arah barat dan parit pertahanan sisi barat
A2	Jembatan dan kolam timur	Jalan masuk dari arah timur dan parit pertahanan sisi timur
A3	Kolam selatan	Parit pertahanan sisi selatan
B1	Gerbang sebelah barat	Bangunan gerbang utama sebelah barat
B2	Gerbang sebelah timur	Bangunan gerbang sebelah timur
B3	Gerbang sebelah selatan	Bangunan gerbang sebelah selatan
C1	Ruang tamu VIP	Bangunan sel tahanan khusus
C2	Ruang Bimbingan	Bangunan kantor administrasi
D	Ruang Pameran Tetap (Realia) dan Pengenalan	Bangunan barak prajurit barat
E	Ruang Pameran Temporer dan Tetap Minirama III	Bangunan barak prajurit utara
F	Ruang Audio Visual dan perpustakaan	Bangunan Fasilitas Umum (Hospital)
G	Ruang Auditorium dan Pameran Tetap Minirama III	Bangunan pertemuan / militaire societet hall
H	Guest House	Pavilion
I	Storage Koleksi	Gudang Mesiu
J	Perkantoran Tata Usaha	Gudang perlengkapan non militer / logistik
K1	Storage Koleksi	Dapur sebelah utara
K2	Storage Koleksi	Dapur sebelah selatan
L1	Ruang PPPK, Gudang, Mushola	Bangunan untuk tahanan / sel
L2	Ruang Gudang	Kamar mandi sebelah timur
L3	Ruang Gudang	Kamar mandi sebelah selatan
M1	Ruang Pameran Tetap Minirama II	Bangunan perumahan perwira sebelah utara (I)
M2	Ruang Pameran Tetap Minirama II	Bangunan perumahan perwira sebelah utara (II)

KODE	FUNGSI SEKARANG	FUNGSI DULU
M3	Ruang Pameran Tetap Minirama I	Bangunan perumahan perwira sebelah selatan (I)
M4	Ruang Pameran Tetap	Bangunan perumahan perwira sebelah selatan (II)
M5	Kamar Mandi	Bangunan kamar mandi, dapur, WC, bagi penghuni M4, dan kamar mandi umum (selatan)
N1	Ruang Perawatan dan Dokumentasi	Gudang senjata ringan dan barak prajurit
N2	Ruang Kantor Pengkajian, Perawatan, dan Fumigasi	Gudang senjata berat (meriam)
O1	Anjungan Barat Laut	Anjungan Pertahanan sebelah Barat Laut
O2	Anjungan Barat Daya	Anjungan Pertahanan sebelah Barat Daya
O3	Anjungan Tenggara	Anjungan Pertahanan sebelah Tenggara
P	Tanah Lapang (Open Space depan Gerbang Timur)	Bangunan Utama (VIP Guest House)
Q	Bengkel Preparasi	Bangunan Garasi
R	Tempat Parkir Karyawan	Bangunan Istal (Kandang Kuda), Dapur, dan lain-lain
S	Sumur	Bangunan Kamar Mandi dan Tempat Sepeda

PETA LOKASI MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA



Perpustakaan
Jenderal

62

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA

Jl. Jenderal A. Yani 6 Yogyakarta 55121, Telp. (0274) 586934, Fax. (0274) 510996
e-mail : vrede_burg@yahoo.co.id
www.vredeburg.com